

LAPORAN TRIWULAN



# **DAFTAR ISI**

RINGKASAN EKSEKUTIF	4
I. Rencana Kerja ICCTF Tahun 2021	7
II. Progres dan Capaian	12
1. Progres Proyek	12
A. Coremap-CTI World Bank	12
B. Coremap-CTI Asian Development Bank	33
C. Blended Finance	78
D. Blue Carbon	80
2. Program Strategis dan Penggalangan Dana (Fundraising)	83
2.1 Pembahasan Grant Eco Fishing Port	83
2.2 Pembahasan "Sustainable Shrimp Aquaculture Value Chain Development"	84
2.3 ICCC - ADB Knowledge Event Repository	85
2.4 Diseminasi katalog WIPO GREEN/WIPO GREEN Catalogue Dessimination Event	86
2.6 Multi Stakeholder Dialog (MSD) ke-8 "Reporting Gender Inclusion and Diversity"	86
2.7 Pertemuan Teknis Climate Finance Focal Point	88
2.8 Lokakarya Nasional Penyusunan Neraca SDL Indonesia	88
2.9 Undangan Perayaan Hari Maritim Nasional	89
3. Komunikasi, Outreach dan Kemitraan	90
3.1 Media Sosial	91
3.2 Produksi Media	99
3.3 Media Monitoring	104
III. Audit, Keuangan dan Operasional	114
1 Laporan Audit Tahun 2021	115
2. Informasi Keuangan Periode Juli-September 2021	115
3. Operasional / Kesekretariatan	115



ndonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) merupakan Lembaga Wali Amanat Nasional (National Trust Fund) dalam bidang penanganan perubahan iklim. Sebagai Satuan Kerja (Satker) di bawah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, ICCTF mengelola dana APBN dan dana hibah dari mitra pembangunan dengan tujuan untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam menekan emisi gas rumah kaca serta implementasi adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Kegiatan yang dilaksanakan ICCTF meliputi pengelolaan proyek, penggalangan dana, komunikasi dan outreach serta operasional Satker. Dalam hal pengelolaan proyek, ICCTF membagi proyek-proyek yang dikelola berdasarkan thematic windows ke dalam empat fokus area, yaitu i) Land-based Mitigation; ii) Adaptation and Resilience; iii) Energy, dan; iv) Marine-based. Sejalan dengan peningkatan komitmen Pemerintah Indonesia terhadap pengelolaan laut dan sumber dayanya, saat ini ICCTF menitikberatkan fokus pada tema program berbasis kelautan (Marine-based) sejak tahun 2020.

Saat ini ICCTF sedang mengimplementasikan proyek hibah COREMAP - CTI World bank (WB) yang dilaksanakan pada 4 lokasi yaitu TNP Laut Sawu, SAP Waigeo Sebelah Barat, KKPD Raja Ampat, dan SAP Raja Ampat di 2 provinsi Nusa Tenggara Timur dan Papua Barat. Kegiatan utama yang dicapai pada periode ini meliputi pembangunan infrastuktur menara pengawas, pusat informasi ekowisata, pusat monitoring Cetacea dan karamba jaring apung. Progress pembangunan infrastruktur tersebut sebagian masih dalam proses pembangunan dan sebagian sudah selesai, serta dalam proses penyerahan kepada stakeholder setempat. Pengadaan peralatan penunjang survei dan peralatan penunjang pengawasan sudah diadakan dan menunggu pendistribusian. Pada periode ini juga telah dilaksanakan beberapa pelatihan untuk masyarakat dan para *stakeholder* terkait pengelolaan kawasan pesisir.

ICCTF sudah mulai mengimplementasikan seluruh kegiatan COREMAP - CTI Asian Development Bank (ADB) yang dilaksanakan oleh Konsultan

Perusahaan dan LSM. Kegiatan yang sudah dilaksanakan berada di 3 lokasi di KKPD Nusa Penida, Provinsi Bali; TPK Gili Balu, dan TWP Gili Matra, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada periode ini kegiatan yang dicapai adalah survei dan identifikasi ekosistem di lokasi project. identifikasi potensi sumber daya perikanan di lokasi project, serta pelatihan untuk Pokmaswas. Selain itu telah dilaksanakan penanaman mangrove di Pulau Namo. Progress pembangunan infrastruktur masih dalam proses penyusunan DED. Pada periode ini juga telah dilaksanakan kegiatan Short Course Supply Chain Perikanan Tuna Longline dan Pencapaian Sertifikasi Marine Stewardship Council (MSC). Empat dari tiga mahasiswa master degree telah menyelesaikan semester pertama, sementara satu mahasiswa baru memulai studinya bulan Juli 2021. Pada periode ini, tiga mahasiswa pertama juga telah mendapatkan co-supervisor dari IPB University.

Pada periode ini kegiatan Blended Finance melanjutkan komunikasi dengan BPDLH terkait skema blue ocean. Selain itu, pada periode ini ICCTF juga bertemu

dengan Kehati (Blue Abadi Fund) untuk membahas suatu pilot project yang dapat menarik impact investment.

Kegiatan Blue Carbon pada periode ini berupa diskusi dengan DISER - Australia untuk membahas persiapan menjelang agenda United Nations Climate Change Conference COP 26 di Glasgow, UK.

Penggalangan dana lainnya juga mulai dilakukan yaitu penjajakan dengan ADB dalam program Sustainable Fisheries pada komoditas udang yang dibudidayakan. Selain itu pambahasan tentang potensi dukungan pendanaan dari WB masih terus dilanjutkan.

Hasil kegiatan diwartakan dalam website ICCTF dan melalui media sosial ICCTF. Selain itu kerjasama penyebaran informasi kegiatan lapangan juga menggunakan media sosial yang dilakukan bersamasama dengan Mitra Pelaksana. Perbaikan website ICCTF mulai dilakukan pada masa ini. Selanjutnya tim komunikasi ICCTF melakukan analisis media sosial setiap akhir bulan guna melihat perkembangan sosialisasi program kepada masyarakat umum.





- Monev dan spotcheck Paket Kegiatan COREMAP-CTI WB
- Implementasi Paket Kegiatan COREMAP-CTI WB
- Pengadaan konsultan COREMAP-CTI ADB
- Pelaksanaan beasiswa master degree COREMAP-CTI ADB
- Pelaksanaan Kick-Off COREMAP-CTI ADB
- Persiapan studi bioekonomi rumput laut di Lesser Sunda
- Pelaksanaan workshop hasil kajian studi bioekonomi perikanan udang di Laut Arafura

#### Penggalangan Dana

- Persiapan proyek LAUTRA dengan WB
- Persiapan proyek Eco Fishing Port dengan AFD
- Penggalangan Pendanaan Sustainable Aquaculture

#### Komunikasi

- Keikutsertaan dalam forum, pameran dan sponsorship
- Produksi materi komunikasi ICCTF melalui media cetak dan elektronik
- Distribusi kalender ICCTF 2021

#### **Dukungan Operasional**

- Entry meeting
- Pengadaan staf ICCTF
- Workshop Koordinasi Kuartal I ICCTF 2021



- Monitoring lapangan COREMAP-CTI WB
- Implementasi Paket Kegiatan COREMAP-CTI WB
- Pengadaan konsultan COREMAP-CTI ADB
- Implementasi Paket Kegiatan COREMAP-CTI WB
- Persiapan studi bioekonomi Tuna, Kakap Merah dan rumput laut di Lesser Sunda

## Penggalangan Dana

- Persiapan proyek LAUTRA dengan WB
- Persiapan proyek Eco Fishing Port dengan AFD
- Penggalangan Pendanaan Sustainable Aquaculture

#### Komunikasi

- Keikutsertaan dalam forum, pameran dan sponsorship
- Produksi materi komunikasi ICCTF melalui media cetak dan elektronik

#### **Dukungan Operasional ICCTF**

- Audit BPK
- Pengadaan staf ICCTF
- Workshop Koordinasi Kuartal II ICCTF 2021



- Implementasi Paket Kegiatan COREMAP-CTI WB
- Implementasi Paket Kegiatan COREMAP-CTI ADB
- Implementasi studi bioekonomi tuna, kakap merah dan rumput laut di Lesser Sunda
- Workshop Evaluasi Proyek Hibah

## Penggalangan Dana

- Persiapan proyek LAUTRA dengan WB
- Persiapan proyek Eco Fishing Port dengan AFD
- Penggalangan Pendanaan Sustainable Aquaculture

#### Komunikasi

- Keikutsertaan dalam forum, pameran dan sponsorship
- Produksi materi komunikasi ICCTF melalui media cetak dan elektronik

## **Dukungan Operasional ICCTF**

Workshop Koordinasi Kuartal III ICCTF 2021



- Programmatic and Finance Monitoring
- Implementasi Paket Kegiatan COREMAP-CTI WB
- Implementasi Paket Kegiatan COREMAP-CTI ADB
- Implementasi dan pelaporan studi bioekonomi tuna, kakap merah dan rumput laut di Lesser Sunda
- Workshop Evaluasi Proyek Hibah

## Penggalangan Dana

- Persiapan proyek LAUTRA dengan WB
- Persiapan proyek Eco Fishing Port dengan AFD
- Partisipasi dalam UNFCCC COP 26 2021

#### Komunikasi

- Keikutsertaan dalam forum, pameran dan sponsorship
- Produksi materi komunikasi ICCTF melalui media cetak dan media elektronik
- Produksi Kalender ICCTF 2021

#### **Dukungan Operasional ICCTF**

Workshop Koordinasi Kuartal IV ICCTF 2021

Pada kuartal keempat, secara garis besar ICCTF merencanakan sudah memulai implementasi proyek yaitu Paket Kegiatan COREMAP-CTI ADB dan studi bioekonomi tuna, kakap merah dan rumput laut di Lesser Sunda. Rencana kerja utama COREMAP - CTI World Bank pada periode triwulan keempat 2021 (periode Oktober-Desember 2021) adalah melanjutkan implementasi program enam paket kegiatan yang akan dilakukan oleh Mitra Pelaksana di Raja Ampat dan TNP Laut Sawu yang sudah hampir mencapai akhir project.

Pada periode ini juga akan dilakukan kegiatan kunjungan untuk pemantauan implementasi di lapangan baik dari sisi program maupun keuangan, serta Workshop Evaluasi Proyek Hibah. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan implementasi kegiatan proyek berjalan secara efektif dan sesuai SOP, demi terwujudnya akuntabilitas pengelolaan proyek. Selain itu, pada kuartal keempat, ICCTF akan berpartisipasi pada forum internasional UNFCCC - COP 26 di Glasgow, Skotlandia.



## **PROGRESS PROYEK**

## A. COREMAP-CTI World Bank



#### **Kegiatan PIU COREMAP - CTI World Bank**

#### a. Monitoring dan Evaluasi Paket 1 dan 5 – Terangi

Pada tanggal 7 Juli 2021 telah dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi paket kegiatan 1 dan 5 secara daring melalui zoom. Dalam kegiatan monitoring ini ditekankan bahwa paket 1 dan paket 5 dapat melakukan implementasi kegiatan sesuai dengan timeline yang sudah disepakati dan menyampaikan laporan keuangan dan program sesuai dengan tata waktu yang telah ditentukan. Pada kegiatan ini disampaikan juga catatan hasil monev infrastruktur, pengadaan, ESAP, dan pelaporan untuk kemudian dtindaklanjuti oleh mitra dengan merevisi dan melengkapi dokumen pendukung dari setiap kegiatan. Mitra diiminta untuk melakukan sosialisasi program ke masyarakat dan stakeholder, untuk bisa memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang proyek dan kegiatan yang dilakukan oleh mitra.



Gambar. 1. A. 1 Diskusi Monev Paket 1 COREMAP-CTI WB

#### b. Monitoring dan Evaluasi Paket 2 - YAPEKA

Pada tanggal 29 Juli 2021 telah dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi paket kegiatan 2 melalui zoom. Hal yang menjadi perhatian dalam kegiatan ini adalah terkait infrastruktur Pusat Informasi Ekowisata, PLTS, dan Menara pantau Cetacean. Diharapkan infrastruktur yang sudah selesai sudah jelas penerima manfaat dan pemeliharaan selanjutnya, selain itu perlu dibuatkan engineering completion report. Terkait program, sudah dilakukan pelatihan pemandu ekowisata dimana 24 masyarakat sudah dilatih. Pelatihan penanganan by-catch, modul sudah ada dan kegiatan sudah dilakukan bersama 34 nelayan di Tablolong, alat yang digunakan untuk pencegahan by catch adalah pisces. Nelayan mengharapkan panduan pengunaan dan penyimpanan alat pisces tersebut.



Gambar 1.A.2 Sambutan Direktur Kelautan dan Perikanan Bappenas pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi Paket 2 COREMAP-CTI WB

#### c. Rapat Revisi AWP dan Termin 2 2021

Rapat Revisi AWP dan Termin 2 2021 dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2021. Kegiatan ini membahas kendala-kendala strategi penyerapan terkait adanya pemotongan kembali anggaran dana rupah murni. Untuk itu Mitra disarankan untuk merevisi AWP dengan menggunakan 2 strategi, yaitu Strategi AWP Optimistis dan Strategi AWP Realistis.



Gambar 1.A.3 Dokumentasi revisi AWP dan Termin 2021

## d. Diskusi Panduan/SOP Pariwisata Alam Perairan/Ekowisata **Bahari TNP Laut Sawu**

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2021 melalui zoom. Hal yang menjadi perhatian dalam diskusi ini adalah bagaimana kawasan konservasi tidak hanya memberi dampak positif pada lingkungan, namun juga dapat memberi manfaat ekonomi. Dibutuhkan panduan atau SOP untuk Ekowisata Bahari sehingga dampak negatif terhadap lingkungan akibat kegiatan wisata dapat berkurang atau bahkan tidak memberi dampak negatif sama sekali. Oleh karena itu, Yappeka dan Reefcheck selaku mitra akan bekerja sama dengan BKKPN selaku salah satu stakeholder untuk mengelaborasi dokumen SOP dan Code of Conduct (CoC). Langkah-langkah pengembangan ekowisata Kawasan Konservasi Perairan Nasional adalah sebagai berikut: Informasi potensi wisata > data detail > daya dukung dan daya tamping > penyiapan sarpras > penyusunan perda dan kelembagaan pengelola > penyusunan SOP > pelaksanaan dan pengembangan ekowisata > Monev. Selain SOP dan CoC wisata, diskusi ini juga membahas aspek kedaruratan karena fasilitas kesehatan di daerah Laut Sawu masih terbatas.

#### e. Diskusi Sinkronisasi Program dan Bantuan Kelompok Yayasan Terangi dan PILI

Kegiatan ini dilakukan untuk sinkronisasi program dan bantuan dari kelompok Yayasan Terangi dan PILI agar tidak ada duplikasi dalam pemberian bantuan. Diskusi ini dilakukan tanggal 20 Agustus 2021 melalui zoom. Tindak lanjut dari diskusi ini adalah agar TERANGI mengirim DED ke PILI, selanjutnya PILI melakukan assessment kelayakan DED tersebut untuk kampung Mutus

#### f. Monitoring dan Evaluasi Pusat Informasi Ekowisata Oesina

Diskusi ini dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2021 melalui zoom. Hal yang menjadi perhatian dalam diskusi ini adalah terkait dokumentasi detail bangunan seperti foto pembesian pondasi yang memperlihatkan pembesian pondasi dan kolom, balok lantai dan lantai supaya bisa terlihat kesesuaian tulang-tulang bangunannya. Ukuran bangunan, jarak antar kolom, tinggi, lantai ke ring balok juga perlu ada dokumentasi. Selain itu perlu diinformasikan konstruksi yang berubah apa saja dari DED dan perlu penjelasan alasan perubahannya.

#### g. Pembahasan Hasil Reviu Dokumen Keuangan Paket 4 PKSPL

Hal yang dibahas dalam diskusi ini adalah penyesuaian paket meeting yang sesuai dengan pagu. Selain itu diskusi ini untuk mengingatkan mitra agar dokumen-dokumen administrasi khususnya bagian keuangan dapat dilengkapi. Hasil reviu Januari-Juli 2021 masih diperlukan perbaikan dan pemenuhan kelengkapan dokumen. Dalam rapat ini diharapkan SPJ dapat segera dilengkapi sebagai syarat pencairan termin ketiga.



Gambar 1.A.4 Diskusi Hasil Reviu Keuangan Paket 4 COREMAP-CTI WB

## h. Finalisasi Rencana Pengelolaan Perikanan di Laut Sawu dan Raja Ampat bersama PILI

Latar belakang penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan tidak dapat terlepas dari kewenangan desa. Dalam pengelolaan perikanan, apa yang menjadi kewenangan pemerintah belum tentu masyarakat adat setuju dengan kewenangan tersebut, begitu pula dengan sebaliknya. Pada awal tahun 2021, Dinas PMK sudah memberi masukan ke bagian hukum untuk penerbitan PerGub tentang kewenangan desa, hak asal usul skala desa, serta memasukkan poin tambahan untuk sasi di darat ataupun laut. Setelah ada PerGub, baru dapat dilanjutkan ke penentuan batas desa. Desa dapat menganggarkan untuk penentuan batas desa untuk pengelolaan sumber daya laut. Terdapat program TEKAD (transformasi ekonomi kampung terpadu) salah satunya untuk pembangunan desa mandiri. Selain itu dalam perencanaan pengelolaan perikanan tidak dapat melepaskan peran Pokmaswas, oleh karena itu kesejahteraan Pokmaswas akan terus diperhatikan, seperti jaminan keamanan, insentif, dan sebagainya. Perlu memisahkan tupoksi Pokmaswas dan pemerintah kampung, seperti dalam hal retribusi dan pemberian izin.

## 1. Sub Komponen 3.1 Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan dan Konservasi Jenis Terancam

#### 1.1 Indikator 3.1 Infrastruktur Kecil Ekowisata

#### 1.1.1 Paket Kegiatan 1 – Yayasan Terangi

#### a. Pembangunan Infrastruktur

Hingga September 2021, terdapat 3 unit infrastruktur yang masih memerlukan penyusunan DED karena adanya perubahan lokasi, yaitu 1 unit Jalur Pendakian di Kampung Tomolol, Distrik Misool Selatan, 1 unit Jetty Apung di Pulau Meosara Kecil, Kampung Meosmanggara, Distrik Waisai Kepulauan, dan 1 unit Pusat Informasi Kampung Yellu, Distrik Misool Selatan. Ketiga DED tersebut sedang dalam proses penyusunan oleh Terangi yang dibantu dengan konsultan perencana. Final DED tersebut diharapkan dapat selesai pada bulan November 2021, sehingga pembangunan infrastruktur dapat dimulai pada bulan Desember 2021.

Tabel 1.A.1.1 Progress pembangunan infrastruktur Paket 1

Infrastruktur	Status	Progres
Stasiun Pemantauan Pari Manta di Yefnabi Kecil (SAP Raja Ampat)	Konstruksi	100%
Stasiun Pemantauan Pari Manta di Dayan (KKPD Selat Dampier)	Konstruksi	100%
Pusat Informasi Ekowisata di Miosara Kecil (SAP Raja Ampat)	Konstruksi	100%
Pusat Informasi Ekowisata di Kampung Yelu (KKPD Misol)	Penyusunan DED (Ada Perubahan Lokasi)	0%
Jetty Apung (SAP Raja Ampat)	Penyusunan DED (Ada Perubahan Lokasi)	0%
Jalur Pendakian di Danau Ubur-ubur (KKPD Mis0ol)	Penyusunan DED (Ada Perubahan Lokasi)	0%
KJA di Yenbeser atau Waiweser (SAP Raja Ampat)	Identifikasi lokasi baru	0%
KJA di Arefi Selatan (KKPD Selat Dampier)	Konstruksi	100%
KJA di Yensawai Timur (KKPD Selat Dampier)	Konstruksi	100%

#### b. Cold Storage Mobile dan Solar System

Terangi memberikan bantuan berupa cold storage mobile dan solar system untuk digunakan sebagai pendingin bagi masyarakat penerima manfaat yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Kegiatan instalasi di Kampung Mutus dilakukan pada tanggal 13-14 Agustus 2021, sedangkan kegiatan instalasi di Kampung Sawandarek dilakukan pada tanggal 15-16 Agustus 2021. Cold storage mobile ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan es batu Kelompok Usaha Bersama (KUB) Mujur dan KUB Inkonem. Hingga bulan September 2021 masih dilakukan proses diskusi dengan Yapeka dan masyarakat untuk menyusun SOP pengelolaan cold storage mobile dan solar system, termasuk decommissioning plan. Berdasarkan hasil diskusi dengan kelompok masyarakat, cold storage tersebut perlu penambahan daya pada lemari pendingin tenaga surya agar dapat menghasilkan es batu sehingga manfaat dari lemari pendingin dapat dirasakan oleh lebih banyak anggota kelompok. Hal tersebut masih dalam proses diskusi dengan masyarakat.



Gambar 1.A.5 Pendistribusian cold storage

#### 1.1.2 Paket Kegiatan 2 - Yapeka

#### a. Pembangunan Infrastruktur Ekowisata Skala Kecil

Salah satu fokus kegiatan yang dilakukan dalam implementasi kegiatan Paket 2 COREMAP - CTI World Bank pada periode triwulan ketiga adalah pembangunan 2 unit infrastruktur ekowisata skala kecil yaitu Pusat Informasi Ekowisata (PIE) di kawasan wisata Pantai Oesina, Desa Lifuleo dan Menara Pemantauan Cetacean di Pulau Semau, Kabupaten Kupang. Kegiatan pembangunan PIE di Pantai Oesina Desa Lifuleo dan Menara Pemantauan Cetacean di Pulau Semau, Kabupaten Kupang terus berlanjut hingga mencapai 100%. Progres pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Yapeka di TNP Laut sawu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.A.1.2. Progress pembangunan infrastruktur Paket 2

No.	Infrastruktur	Progres pembangunan	
1	PLTS di Nusa Manuk	100%	
2	Pusat Informasi Ekowisata di Sabu	100%	
3	Pusat Informasi Ekowisata di Oesina	100%	
4	Menara Pantau Cetacea di Semau	100%	

## b. Sosialisasi Panduan Pemanfaatan, Pemeliharaan serta Decommisioning PLTS dan Penandatanganan Berita Acara Penitipan PLTS Pendukung Kegiatan Perikanan

Saat ini Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Pulau Nusa Manuk yang berada di kawasan TNP Laut Sawu sudah bisa digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Pada tanggal 28-29 Juli 2021, YAPEKA melakukan kegiatan sosialisasi yang bertujuan untuk memberikan panduan bagi pengelola dan masyarakat pengguna PLTS dalam memanfaatakan, merawat dan rencana decomissioning instalasi PLTS di Dusun Nusa Manuk Desa Fuafuni Kecamatan Rote Barat Daya Kabupaten Rote Ndao. Instalasi PLTS meliputi berbagai komponen dan bahan yang memerlukan perawatan secara rutin untuk menjamin keberlanjutan operasional PLTS. Dalam melakukan pemeriksaan dan perawatan instalasi PLTS perlu mempertimbangkan faktor keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Di samping itu, komponen-komponen PLTS memiliki umur pakai tertentu dan limbahnya sulit terdegradasi secara alami sehingga disampaikan juga panduan prosedur penonaktifan komponen dan instalasi PLTS, untuk menghindari kerusakan lingkungan. Pada kegiatan tersebut dilakukan juga penandatanganan Berita Acara Penitipan aset PLTS. Penandatanganan dilakukan oleh Kepala Dusun Nusa Manuk, Bapak Arfin Tumuni. Dengan adanya

penandatanganan berita acara penitipan aset, diharapkan masyarakat menjadi lebih peduli dalam merawat dan memanfaatakan PLTS dengan bijak, sehingga keberadaannya bisa membawa manfaat yang berkenlanjutan bagi Masyarakat Nusa Manuk.



Gambar 1.A.6 Penandatangan berita acara penitipan aset PLTS oleh kepala Dusun Nusa Manuk

## c. Pelatihan Rehabilitasi Mangrove: Pemantauan dan Pemeliharaan Demplot Desa Holulai Kabupaten Rote Ndao

Salah satu kegiatan proyek COREMAP - CTI World Bank dalam paket 2 adalah Pelatihan Rehabilitasi Mangrove yang telah dilaksanakan di Desa Holulai pada bulan Agustus 2021. Kegiatan pelatihan tersebut meliputi pembuatan demplot praktik penanaman mangrove dengan 1000 bibit.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan tersebut, pada tanggal 11 - 14 September 2021 dilakukan kegiatan pemantauan dan pemeliharaan demplot mangrove di Desa Holulai, Kecamatan Loahulu, Kabupaten Rote Ndao. Tujuan dari kegiatan ini antara lain untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait dengan keterampilan teknik pemantauan dan pemeliharaan demplot mangrove serta pemahaman akan pentingnya menjaga ekosistem mangrove untuk keberlanjutan sumber daya perairan. Kegiatan ini diikuti oleh 21 orang peserta yang merupakan kelompok masyarakat peduli mangrove Desa Holulai, selain dari masyarakat kegiatan ini juga diikuti oleh BKKPN Kupang dan mahasiswa dari Fakultas Biologi UGM yang sedang melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat di Pulau Rote. Dari hasil monitoring yang dilakukan sekitar 10 bibit tercatat hilang terbawa arus, sisanya sudah mulai muncul pucuk daun. Kegiatan penyulaman mangrove dilakukan untuk mengganti bibit mangrove yang hilang dan juga penambahan penanaman bibit sekitar 200 bibit, serta penyiapan cadangan bibit mangrove untuk penyulaman kembali di kemudian hari sebanyak 300 bibit. Cadangan bibit dibuatkan rumah bibit yang langsung di pasang di area pembibitan dengan memberi naungan berupa paranet yang dibentangkan.



Gambar 1.A.7 Penyulaman tanaman dan pembuatan pagar pelindung di demplot

## d. Fasilitasi/Pendampingan Penguatan Kelembagaan POKDARWIS Desa Palanggay dan Desa Napu, Kabupaten Sumba Timur

Pada bulan Juli 2021, Yapeka melakukan kegiatan pendampingan penguatan kelembagaan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) di Kabupaten Sumba Timur. Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan peningkatan kapasitas/pelatihan pengembangan ekowisata berbasis masyarakat di TNP Laut Sawu. Kegiatan di Pantai Kambu Omang, Desa Palanggay, dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2021 dan diikuti oleh 17 peserta. Sedangkan kegiatan di Desa Napu dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2021, bertempat di Pantai Larawali, Desa Napu dan diikuti oleh 21 peserta. Capaian dari kegiatan ini antara lain terbentuknya POKDARWIS di Desa Palanggay dan Desa Napu di Kabupaten Sumba Timur, teridentifikasinya Daerah Tujuan Wisata (DTW) di masing masing lokasi, serta teridentifikasinya peluang dan tantangan dalam pengembangan ekowisata di Desa Napu dan Palanggay. Tindak lanjut dari kegiatan ini, Yapeka akan membantu proses pengukuhan POKDARWIS oleh Pemda Kabupaten Sumba Timur serta akan dilakukan lanjutan kegiatan pelatihan pengembangan ekowisata berbasis masyarakat yaitu melatih POKDARWIS yang telah dibentuk terkait Sapta Pesona, dasar-dasar pengembangan ekowisata, dan penataan kawasan.

Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan oleh tim Yapeka pada bulan Juli, kegiatan penguatan kapasitas dan kelembagaan untuk pengembangan ekowisata desa melalui penguatan POKDARWIS akan dilakukan di dua lokasi terpilih yaitu desa Napu dan Desa Palanggai, Kabupaten Sumba Timur. Desa Napu yang memiliki potensi wisata budaya dan pantai pasir putih yang indah, serta Desa Palanggay yang memiliki potensi ekowisata mangrove. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk berbagi pengetahuan dan pemahaman kepada anggota Pokdarwis di Desa Napu dan Palanggay perihal program Sapta Pesona dan Desa Wisata, serta pengetahuan dan kapasitas anggota Pokdarwis di Desa Napu dan Palanggay dalam pengembangan desa wisata yang meliputi pembuatan rencana tapak (site plan) pengembagan desa wisata dan pembuatan paket wisata. Kegiatan Pelatihan dilaksanakan pada tanggal 20 - 25 September 2021 dan diikuti oleh 30 orang peserta yang berasal dari anggota Pokdarwis Napu dan Pokdaeris Palanggay.



Gambar 1.A.8 FGD materi pelatihan pembuatan Rencana Tapak

Kegiatan pelatihan ini meliputi pelatihan di dalam ruangan, FGD praktek pembuatan rencana tapak dan paket wisatas, dan pembuatan sarana pendukung ekowisata. Secara umum tujuan pemberian materi ini adalah peserta yang baru mengenal tentang kepariwisataan dan akan mengembangkan di desanya mengetahui dasardasar Pokdarwis, serta mengetahui kegiatannya perencanaan pembangunan desa wisata yang mencakup Sapta Pesona dengan beberapa kegiatannya dalam mendukung kepariwisataan.

## 1.2 Indikator 3.4 Implementasi Rencana Aksi Nasional (RAN) Hiu, Cetacea dan Pari Manta0

#### 1.2.1 Paket Kegiatan 3 - Yayasan Reefcheck Indonesia

#### a. Lampu LED sebagai alat mitigasi bycatch elasmobranchii di TNP Laut Sawu

Selama periode triwulan ketiga 2021, YRCI rutin melaksanakan uji coba untuk menilai efektivitas penggunaan lampu LED sebagai alat mitigasi bycatch elasmobranchii di TNP Laut Sawu. Semua trip penggunaan lampu LED untuk mitigasi bycatch dilakukan di Pulau Mules. Kondisi cuaca menjadi kunci utama dalam kegiatan ini. Jika terkendala oleh cuaca yang kurang baik untuk melaut, YRCI melakukan kegiatan di darat yaitu mewawancarai beberapa nelayan mengenai pendataan kapal dan alat tangkap yang digunakan serta menanyakan sesering apa bycatch yang tertangkap di daerah Pulau Mules tersebut dan juga melakukan pelatihan cara pengguna GPS dan kamera.



Gambar 1.A.9 Pengambilan hasil tangkapan dari jaring dengan lampu LED

b. Pendataan Hasil Tangkapan Elasmobranchii di Papua Barat melalui Enumerasi di Lokasi Pendaratan Perikanan dengan Menerapkan Sistem **Website Database dan Mobile Apps** 

Selama bulan Agustus 2021 tercatat sebanyak enam kali kegiatan pendataan terhadap produk pengusaha penangkap serta pengumpul hiu dan pari di Kota Sorong, dimana dari pendataan tersebut tercatat 9 jenis hiu dengan total berat 3129.47 kg. Sedangkan selama bulan September 2021, dari enam kali kegiatan pendataan tersebut tercatat tercatat 8 jenis hiu dengan total berat 2085.56 kg.

c. Pengembangan sistem database dan platform pendataan hasil tangkapan hiu, pari, dan cetacea, serta database photo ID pari manta dan opportunistic sighting cetacea

Aplikasi pendataan hasil tangkapan hiu, pari, dan cetacea, serta database photo ID pari manta dan opportunistic sighting cetacea sudah dalam final version. Aplikasi tersebut dapat diunduh di Play Store (Android) dan App Store (iOS) untuk publik.

d. Pelatihan dasar mengenai wisata dan industri penunjangnya kepada pemangku kepentingan terkait termasuk praktek pemakaian bantuan sarana pengembangan

Pada bulan Juli telah dilaksanakan pelatihan komunikasi bisnis via sosial media untuk pemasaran dan promosi produk masyarakat, pelatihan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi zoom dan materi yang diberikan adalah:

- 1. Pengantar aplikasi sosial media (tiktok, FB, instagram, tweeter, youtube, dll) untuk membantu pemasaran, termasuk metoda penyebaran
- 2. Teori dasar pembuatan foto produk dengan metode latar putih dan pengenalan pentingnya branding suatu produk
- 3. Dasar dasar fotografi dan teknik dasar pembuatan video dengan menggunakan telepon seluler
- 4. Etika bersosmed

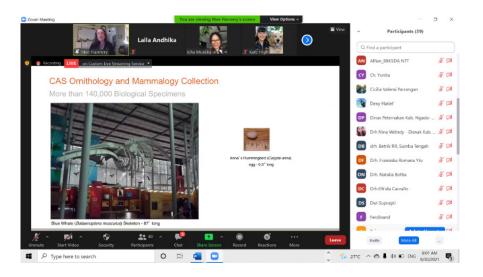
Peserta juga diberikan tugas untuk mengambil foto dan membuat caption yang menarik dari potensi-potensi bisnis yang ada di lingkungan sekitar lalu hasilnya dikirimkan di Whatsapp Group dan didiskusikan. Pada bulan Agustus dilakukan analisa perkembangan peserta pada pelatihan yang dinilai menggunakan kuesioner sebelum dan sesudah pelatihan. Daftar kuesioner terdiri dari 11 pertanyaan. Enam pertanyaan merupakan pertanyaan skala untuk diperbandingkan antara sebelum dan sesudah pelatihan.

Pada tanggal 15-20 September telah dilakukan peningkatan kapasitas secara pararel untuk target kelompok di Kupang maupun Rote. Kegiatan pelatihan dilakukan dengan kombinasi pertemuan online maupun offline. Tantangan yang secara konsisten tercatat selama pendampingan adalah pengorganisasian dan penstrukturan dalam mengemas dan mengimplementasikan aktivitas wisata secara flexible, namun terarah. Disiplin waktu dan kerapihan administrasi juga sering menjadi kendala. Hal ini berpotensi mengganggu kelancaran bisnis wisata di dalam kawasan taman nasional yang mempunyai peraturan yang lebih ketat daripada kawasan wisata biasa. Selain itu, kami juga mengidentifikasi perlunya peningkatan kepercayaan diri peserta dalam melakukan pemanduan.

Kendala terbesar penerapan WSBM ada di faktor cuaca dan keterbatasan sarana dan pra sarana. Di Perairan Sulamu Semau, saat cuaca buruk (bergelombang), naik dan turun perahu menjadi masalah tidak hanya untuk kenyamanan, namun juga keselamatan. Saat surut jauh juga membuat proses naik dan turun kapal menjadi sulit. Alat-alat keselamatan (jaket pelampung, donat pelampung, dll) dan surat-surat kapal yang berpotensi digunakan untuk melihat lumba-lumba seringkali tidak lengkap/ tidak memenuhi standard. Dalam pendampingan ini, kelompok pendamping WSBM lumba-lumba sudah terbentuk secara informal.

## e. Pelatihan penanganan kejadian mamalia laut terdampar bagi para penanggap pertama dan dokter hewan

Pada tanggal 29 - 30 September 2021, YRCI melakukan pelatihan penanganan kejadian mamalia laut terdampar bagi para penanggap pertama dan dokter hewan. Pelatihan penanganan kejadian mamalia laut terdampar bagi para dokter hewan membahas beberapa materi diantaranya: 1) Anatomi Paus dan Lumba-lumba; 2) Penanangan Cetacea Terdampar dalam Kondisi Hidup dan Mati; 3) Sampling dan Pencatatan Cetacea Terdampar; 4) Nekropsi mamalia ukuran besar, studi kasus dari California Academy of Science; 5) Teknik Nekropsi, Pelaporan dan Diagnose Kematian pada Cetacea; dan 6) Diskusi Jejaring Dokter Hewan (dan tindak lanjut) dalam Penanganan Cetacea Terdampar.



Gambar 1.A.10 Pemaparan materi nekropsi pada mamalia besar oleh Maureen Flannery pada pelatihan dokter hewan

## 2. Sub Komponen 3.2 Pengelolaan Pesisir Terpadu (RZWP-3-K) Papua Barat

#### 2.1. Paket Kegiatan 4 - PKSPL IPB

## a. Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Teknis Pemanfaatan di Kawasan Konservasi Perairan Berdasarkan Daya Dukung

Pada tanggal 13 dan 22 Juli 2021, PKSPL IPB mengadakan kegiatan rapat koordinasi terkait dengan penyusunan rencana teknis pemanfaatan di Kawasan Konservasi Perairan berdasarkan daya dukung. Rencana Teknis Pemanfaatan di Kawasan Konservasi merupakan salah satu output untuk mendukung Implementasi RZWP-3-K Provinsi Papua Barat. Kegiatan dilakukan secara virtual dan diikuti oleh berbagai stakeholders baik pemerintah pusat, pemerintah daerah. Rapat koordinasi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi antar para pemangku kepentingan terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan, serta meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pengayaan rencana teknis dan implementasinya kedepan. Dalam Sambutannya, Direktur Kelautan dan Perikanan Bappenas menyampaikan bahwa rencana teknis harus disusun berdasarkan kondisi aktual di lapangan dengan data penunjang tentang status pengelolaan dan pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan, serta berharap agar rencana teknis yang akan disusun ini dapat diaplikasikan oleh pemangku kepentingan di daerah.



Gambar 1.A.11 Diskusi dalam rapat

#### b. Pelatihan Sistem Informasi Geografis (SIG)

Terlaksananya kegiatan pelatian SIG dan tata ruang pesisir di Manokwari pada tanggal 24-28 Agustus 2021. Acara tersebut dihadiri hybrid oleh 47 yang melibupti 31 peserta offline dasn 16 peserta online. Peserta berasal dari berbagai instansi pemerintah baik di lingkup kabupaten maupun provinsi di Papua Barat. Pelaksanaan kegiatan merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia pemangku kepentingan dalam pengelolaan pesisir terpadu. Pelatihan ini dilaksanakan dengan metode andragogy dengan cara penyampaian materi secara class room. diskusi, case study, praktek, kunjungan lapangan, presentasi kelompok dan evaluasi. Pelatih SIG dan Tata Ruang merupakan tim ahli yang berkompeten di bidang penginderaan jauh. Secara terangkum, harapan dari kegiatan ini adalah peserta dapat mengelola data spasial terkait pemahaman secara komprehenasif dalam mengelola dan mendayagunaan data spasial untuk perencanaan dan implementasi zonasi sesuai RZWP-3-K, mengenal teknologi SIG, membuat peta tematik, mengaplikasika SIG dalam pengelolaan spasial, mengolah berbagai jenis data menjadi data SIG/data spasial, menganalisis kesesuaian dengan zonasi dalam mendukung implementasi RZWP-3-K, dan menyajikan berbagai data dalam bentuk spasial yang siap pakai sesuai dengan tujuan pengguna sebagai masukan kepada pengambilan kebijakan dalam menyusun program pengelolaan sumberdaya pesisir terpadu (ICM).

#### c. workshop penyusunan Sistem Monitoring Nusantara (SIMONA)

Pada tanggal 20 September 2021, PKSPL IPB melakukan kegiatan workshop penyusunan Sistem Monitoring Nusantara (SIMONA), Monitoring dan Evaluasi RZWP3K Provinsi Papua Barat. Dalam workshop yang dihadiri Bappenas dan pakar dari berbagai disiplin ilmu itu, tema yang dibahas adalah tentang pengelolaan zonasi wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil. Kegiatan ini diselenggarakan di IICC Bogor. Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu akan membantu pemerintah daerah dalam mengimplementasikan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K). Substansi dari RZWP3K berupa rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap satuan perencanaan dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan yang memuat kegiatan boleh dan tidak boleh dilakukan. Hasil workshop adalah adanya Tampilan dan konten isi SIMONA disepakati sesuai dengan pertemuan, Pengelolaan SIMONA akan diserahkan ke Papua Barat dengan batuan support oleh PKSPL IPB dan Panduan penggunaan sistem dibuat bukan hanya untuk pengguna, tetapi juga untuk administrator, masyarakat, dan OPD.

#### d. Survei dan pengumpulan data di Sorong dan Raja Ampat

Pada tanggal 9 September-27 September 2021, dilakukan kegiatan survei oleh PKSPL IPB yang terdiri atas 8 laki-laki dan 6 perempuan pada tanggal. Survei ini bertujuan untuk pengambilan data lapang (primer & sekunder) kegiatan penyusunan rencana teknis pengelelolaan kawasan konservasi perairan Raja Ampat. Pengambilan data dilaksnaakan di beberapa lokasi, diantaranya di Pulau Meos Menggara, Pulau Asbekar, Pulau Meos Arar Besar, Pulau Yenfabi Besar, Pulau Ronsuar, Pulau Yen Mo, Pulau Yen Kabu, Pulau Mutus Besar, Pulau Gitunun, Pulau Gof, Desa Wiweser, Yen Adobak, Marendan Weser, Paulau Dayan, Pulau Yeben, Tanjung Putus, Pulau Arborek, Sawandarek, Pulau Friwen, dan Pulau Sapokren.



Gambar 1.A.12 Snorkeling di Pulau Asbekor untuk survei output 1.3

## 3. Sub Komponen 3.3 Penatalayanan Sumber Daya Pesisir Oleh Masyarakat

#### 3.1 Paket Kegiatan 5 - Yayasan Terangi

#### a. Pembangunan Menara POKMASWAS

Hingga bulan September 2021, pembangunan menara Pokmasas di KKPD Misool, Raja Ampat sedang dalam tahap proses pengadaan kontraktor pelaksana pembangunan. Sedangkan untuk lokasi di Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), dan Kabupaten Manggarai, progres pembangunan menara pengawas telah mencapai 100%. Progress pembangunan Menara POKMASWAS yang dilakukan oleh Yayasan Terangi sampai dengan kuartal 3 2021 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 1.A.3.1 Progress pembangunan Menara Pengawas POKMASWAS

INFRASTRUKTUR	STATUS	PROGRESS
Menara Pengawas di Meosmanggara (SAP Raja Ampat)	Konstruksi	100%
Menara Pengawas di Sauwandarek (KKPD Selat Dampier)	Konstruksi	100%
Menara Pengawas di Harapan Jaya (KKPD Misol)	Pengurusan Perijinan	0%
Menara Pengawas di Sabu Raijua (TNP Laut Sawu)	Konstruksi	100%
Menara Pengawas di Rote Ndao (TNP Laut Sawu)	Konstruksi	100%
Menara Pengawas di Sumba Barat Daya (TNP Laut Sawu)	Penandatanganan Kontrak	100%
Menara Pengawas di Manggarai (TNP Laut Sawu)	Penandatanganan Kontrak	100%

#### b. Pembuatan Perahu Pengawas

Progres konstruksi pembuatan perahu pengawas untuk lokasi di Raja Ampat sudah mencapai 84,99 % untuk 4 unit perahu pengawas. Untuk progres konstruksi pembuatan perahu pengawas untuk Laut Sawu sudah mencapai 20,33 % untuk 5 unit perahu pengawas.

#### 3.2 Paket Kegiatan 6 - PILI

## a. Pembentukan dan Penguatan Panitia/ Pokja KMHA di Kabupaten Rote Ndao dan Raja Ampat

Salah satu kegiatan yang akan dilakukan adalah pengakuan dan perlindungan akses masyarakat adat melalui penguatan kelembagaan adat di tingkat kabupaten hingga tingkat desa. Salah satu langkah untuk menguatkan berjalannya struktural kelembagaan adat FKTAPB Kab. Rote Ndao adalah dengan adanya kegiatan pengukuhan oleh Maneleo Ina Huk sebagai Pelindung Forum Adat dan Bupati Rote Ndao selaku Pembina Forum Adat di Kabupaten Rote Ndao.

Kegiatan pengukuhan ini dilakukan dengan beberapa sesi dan beberapa kali pertemuan sebagai berikut:

- Diskusi dengan Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Rote Ndao tanggal 31 Agustus 2021 di Ruang Kepala Bagian Hukum Kab. Rote Ndao
- Gladi Resik Pengukuhan Pengurus Forum Komunikasi Tokoh Adat Peduli Budaya (FKTAPB) Kab. Rote Ndao pada tanggal 31 Agustus 2021 di Rumah Jabatan Bupati Kab. Rote Ndao.
- Pertemuan Pengukuhan Pengurus Forum Komunikasi Tokoh Adat Peduli Budaya (FKTAPB) Kab. Rote Ndao dilakukan secara offline dan online pada tanggal 1 September 2021.
- Diskusi secara offline secara terpisah dilakukan di Rumah Jabatan Bupati Rote Ndao dan Sekretariat FKTAPB
- Diskus secara online via zoom meeting yaitu 19 orang (10 perempuan dan 9 laki - laki).

Sedangkan finalisasi SK Panitia dan POKJA KMHA di Kabupaten Raja Ampat masih menunggu Kepala Bagian Hukum Kabupaten dan baru bisa dilakukan diskusi ulang untuk proses pengesahan. SK sudah ditandatangani oleh Bupati pada 23 Agustus 2021.

#### b. Finalisasi rencana pengelolaan RB-SFM bersama BKKPN Kupang

Pada triwulan ketiga 2021, PILI melakukan serangkaian diskusi untuk finalisasi RBSFM baik di lokasi Raja Ampat dan Laut Sawu. FGD finalisasi bersama dengan BKKPN Kupang Satker Raja Ampat dilakukan pada tanggal 18 September 2021. Untuk penyusunan RPP Desa Oelua dan Sotimori, kegiatan dilakukan dengan melibatkan Dinas Perikanan Kabupaten Rote Ndao, Kantor Diskoperindag Kab. Rote Ndao, Bapelitbang Kab. Rote Ndao, kepala desa Sotimori, serta pemangku kepentingan lainnya. Diskusi tersebut juga dilanjutkan bersama dengan BKKPN

Kupang Satker Rote. Pada tanggal 21 September 2021, dilakukan Diskusi Finalisasi Rencana Pengelolaan RB-SFM untuk Dua Lokasi Pilot yang bertempat di Hotel Salihara Bogor, bersama dengan ICCTF dan Bappenas.



Gambar 1.A.13 FGD Finalisasi Rencana Pengelolaan RBSFM Bersama BKKPN Kupang (Satker Raja Ampat) melalui Zoom Meeting

## c. Pendampingan penggunaan peralatan pendukung pengolahan hasil tangkapan

Selama bulan Agustus dilakukan proses pendampingan melalui rapat bulanan kelompok terutama untuk proses pengesahan kelompok pengawasan di Oelua serta kedua kelompok yang lain untuk di Kabupaten Rote Ndao. Sedangkan untuk di Raja Ampat diskusi informal untuk dukungan pengadaan alat dilakukan online dengan mitra TERANGI, terkait dukungan cold storage untuk produksi es batu di Kampung Mutus ditindaklanjuti dengan menyusun rencana sosialisasi dan mekanisme kerja kelompok di Mutus.

Selama bulan September 2021, dilakukan serangkaian diskusi dan proses pendampingan dengan kelompok melalui rapat rutin pendampingan penggunaan peralatan, baik untuk penerapan perikanan karang dengan prinsip RBSFM serta dalam pengolahan hasil tangkapan. Untuk lokasi di Raja Ampat dilakukan diskusi untuk pengembangan budidaya kerapu dengan alat bantuan KJA dari Paket Kegiatan 1 – TERANGI. Untuk itu, perlu dilakukan juga survei kondisi mikro dan sosialisasi kepada kelompok di Mutus, Raja Ampat. Untuk peralatan pendukung pengolahan hasil tangkapan, pendampaingan yang dilakukan berupa pelatihan pembuatan label dan pengemasan produk di Desa Oelua dan Sotimori, Kab. Rote Ndao.



Gambar 1.A.14 Pertemuan rutin bulanan KUB Bintang Selatan di Pantai Litianak

# B. COREMAP-CTI Asian Development Bank



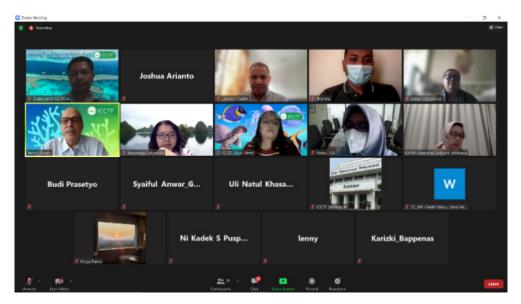
#### **Kegiatan COREMAP-CTI ADB**

## **Grant Package 1**

Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2021. Progress TIA masih rendah walaupun merupakan yang pertama, hanya 5% dari kontrak. Diperlukan komitmen dari mitra pelaksana untuk melakukan percepatan dalam implementasi project agar dapat mencapai waktu yang tepat sesuai dengan yang direncanakan yaitu pertengahan 2022.

Poin diskusi pada pertemuan ini adalah sebagai berikut:

- Hasil FGD dari Tourism Management System dan PES dapat segera disampaikan
- Identifikasi penerima manfaat infrastruktur harus dilakukan
- Dokumen pendukung kegiatan harus dilengkapi sebagai bukti
- Code of Conduct Mola-mola segera ter-update
- Dokumen safeguard dipenuhi dengan dilakukan diskusi lebih dulu dengan ICCTF
- Fokus terhadap SOP yang diusulkan agar dapat segera bergulir karena project tidak mengcover seluruhnya. Diharapkan dalam waktu dekat sudah bisa dipastikan
- Memprioritaskan kegiatan Survei Mola karena musimnya habis di bulan Agustus
- Komunikasi dengan ICCTF terkait barang-barang yang akan dimasukkan ke dalam bangunan pusat informasi. Jangan sampai untuk pendanaan barang ini mengorbankan kegiatan lain
- · Design pusat informasi memiliki ciri khas Bali
- Pengecekan kembali pengaruh perubahan lokasi atau design infrastruktur terhadap amandemen kontrak
- Follow-up kegiatan media publikasi
- Laporan administrasi dapat segera disampaikan sebagai syarat pencairan termin 2



Gambar 1.B.1 Diskusi Monev GP1 COREMAP-CTI ADB

#### **Grant Package 2 dan 5**

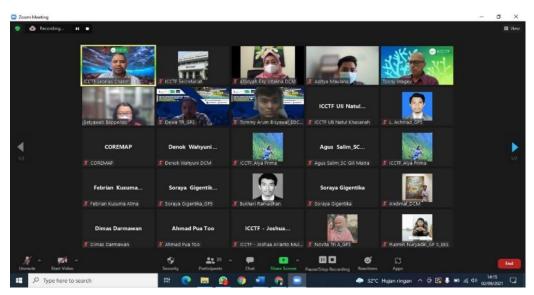
Pada tanggal 2 September 2021, dilaksakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi COREMAP-CTI ADB GP 2 dan GP 5. kegiatan ini membahas Progress Proyek GP2 dan GP5, Rencana Kerja Semester 2 GP 2 dan GP 5, serta strategi percepatan pelaksanaan program.

Progress untuk GP2 adalah sebagai berikut:

- Sudah didiskusikan SOP yang sudah ada, oleh karena itu SOP prioritas sudah diidentifikasi. Rencana drafting SOP bulan September dan selanjutnya diskusi public, target selesai tahun ini
- PES sudah dilakukan FGD untuk brainstorming, bulan September dan Oktober akan mengerucut ke diskusi bentuk naskah akademik. Diharapkan koordinasi waktu dengan Bappenas dalam penyusunan PES
- Status pondok informasi per-tanggal 30 Juli 2021 surat kesediaan menerima sudah ada dari Dinas Pariwisata, dan surat permohonan lahan sudah dikirimkan. Kepala Dinas masih diskusi terkait luas bangunan. Catatan UPP II pemenang, terkait infrastruktur tidak boleh ada toilet.
- Mooring Buoys menunggu hasil review rencana zonasi. Titik koordinat menjadi dasar dari UKL/UPL
- Survei penyu dan hiu belum dilakukan, diharapkan September karena Agustus PPKM. Tagging penyu harus dikoordinasikan procurement alat tagging

Progress untuk GP5 adalah sebagai berikut:

- Telah dilakukan review baseline data lokasi rencana survei restorasi dan rehabilitasi terumbu karang sebanyak 10 titik dan telah dipetakan, setelah itu akan dilakukan FGD untuk menentukan lokasi prioritas serta penentuan luas Kawasan
- · Telah dilakukan review data perikanan bersama penyuluh dan nelayan, mayoritas penangkap ikan dari luar pulau (mainland), data perikanan tangkap dan sarana penangkapan masih kurang untuk dijadikan baseline.
- Akan diadakan restrukturasi Pokmaswas karena anggota tidak mewakili ketiga pulau. Jumlah keanggotaan masih kurang dari target.
- Sudah ada Forum Koordinasi dan Kolaborasi Pengelolaan (FKKP) TWP Gili Matra namun masih minim kegiatan. Akan difasilitiasi komunikasi rutin dengan BKKPN.



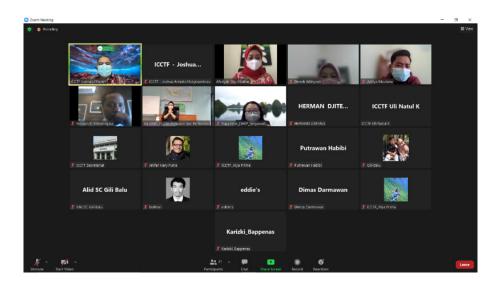
Gambar 1.B.2 Pembahasan monev GP2 dan GP5 COREMAP-CTI ADB

## **Grant Package 3**

Pada tanggal 3 September 2021, dilaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi COREMAP-CTI ADB GP 3. Seperti kegiatan pada sehari sebelumnya kegiatan ini membahas Progress Proyek, Rencana Kerja Semester 2, serta strategi percepatan pelaksanaan program.

Progress untuk GP3 adalah sebagai berikut:

- Kondisi Pokdarwis belum berkembang dan minim kegiatan
- Sudah ada SOP Pengawasan di Gili Balu namun bisa dimutakhirkan
- Penetapan Kawasan TPK Gili Balu dalam proses TTD Gubernur
- Bulan September akan ada koordinasi survei dan survei untuk penilaian daya dukung
- Belum ada realisasi terkait willingness to pay karena membutuhkan hasil survei daya dukung. Akan ada diskusi konsep dasar PES terlebih dahulu di bulan September.
- Terkait infrastruktur, tim GP3 diminta segera mengirimkan surat ke bupati agar segera diterima denahnya. Surat resmi saat ke Sumbawa akan segera dibuat
- Mengenai instalasi mooring buoys, perlu persetujuan ruang laut dengan data terumbu karang. Kondisi persetujuan ruang laut memerlukan persetujuan DJPRL-KKP yang direncanakan bulan ini akan diurus.



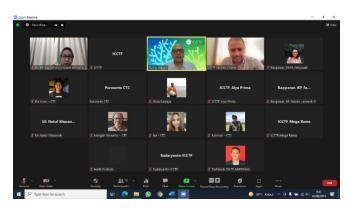
Gambar 1.B.3 Pembahasan Monev GP3 COREMAP-CTI ADB

# **Grant Package 4**

Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2021. Agenda pertemuan ini adalah mendapatkan informasi progress implementasi Grant Package 4 COREMAP CTI ADB. CTC merupakan mitra dengan jumlah kontrak paling tinggi dibanding mitra lainnya. Namun terdapat keterlambatan pelaksanaan proyek selama 4 bulan sejak tandatangan kontrak. Penyerapan termin 1 juga masih terhitung rendah, 7% dari kontrak. CTC diharapkan dapat menyusun strategi untuk percepatan di semester 2.

Poin diskusi pada pertemuan ini adalah sebagai berikut:

- Indikator capaian project GP4 dapat segera dibuat reportingnya
- Isu jalur wisata mangrove di Nusa Ceningan atau Nusa Lembongan dapat disampaikan perkembangannya
- Addendum kontrak terkait Perubahan lokasi pembangunan Menara pengawas di Crystal Bay dapat segera dilakukan
- Status penggunaan lahan dapat diperjelas



Gambar 1.B.4 Diskusi Money GP4 COREMAP-CTI ADB

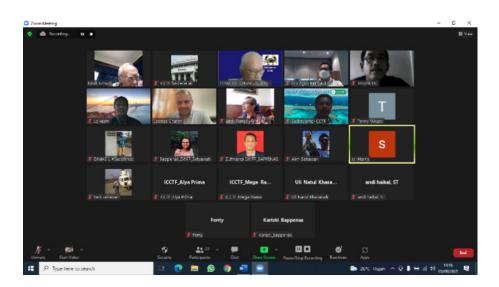
- Pembahsan DED untuk GP4
- Dokumen ADB safeguard dapat diselesaikan pada Agustus 2021
- Batas waktu penyerahan laporan bulanan Juli pada 10 Agustus
- Pekerjaan expert seaweed CTC terjadwal akan berakhir pada akhir tahun 2021
- Untuk atisipasi audit, mitra menyampaikan surat rencana perubahan lokasi ke PPK dan dibuat berita acara perubahan lokasi
- Berita acara perubahan lokasi segera dibuat sebagai dasar untuk amandemen kontrak
- Dokumen safeguard disiapkan oleh ICCTF dengan bahan informasi dari mitra
- · Anggaran kapal 200 juta untuk 1 unit kapal. Anggaran total kapal adalah 400 juta
- Membuat surat permohonan ijin ke Pemda untuk ijin berkegiatan saat PPKM dengan tetap menaati peraturan yang berlaku

## **Grant Package 6**

Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2021. Agenda pertemuan ini adalah mendapatkan informasi progress implementasi Grant Package 6 COREMAP CTI ADB. Sucofindo mengalami keterlambatan dalam pengajuan termin 2, pada kesempatan ini diidentifikasi kenapa bisa terlambat. Penyerapan semester 1 juga masih rendah, 7% dari nilai kontrak. Oleh karena itu Suofindo diharapkan dapat menyusun strategi untuk percepatan kegiatan dalam mencapai indikator tujuan.

Poin diskusi pada pertemuan ini adalah sebagai berikut:

- Dokumentasi hasil kegiatan rehabilitasi mangrove dapat diadakan
- · Hasil Cost benefit analysis dapat dipresentasikan untuk mendapat tanggapan
- Memastikan DED untuk dua unit Menara Pengawas di Pulau Namo dan Pulau Paseran
- Batas akhir penyelesaian dokumen ADB Safeguard Sosial dan Lingkungan dibulan Agustus ini
- Terkait status lahan pengurusan dokumen UKL-UPL saat ini sedang dalam proses terkendala oleh pergantian/mutase kepala bidang Dinas LHK
- Pelatihan dan praktek penanaman mangrove dibantu oleh LSM LOH
- Menara pengawas dalam tahap review oleh tim DED ICCTF
- Rencana aksi yang akan dilakukan di gili balu, yaitu pelatihan peningkatan pasca panen, manajemen usaha, pemasaran ikan tuna dan pelatihan perbaikan kemasan untuk masyarakat meliputi pelatihan pengetahuan pemasaran untuk masyarakat



Gambar 1.B.5 Diskusi Money GP6 COREMAP-CTI ADB

## Money dan Site Visit ke Gili Matra

Pada tanggal 29 September sampai dengan 2 Oktober 2021 dilaksanakan kegiatan monev ke Gili Matra. Maksud dari kegiatan ini adalah untuk melakukan diskusi dan tinjauan terhadap lokasi pelaksanaan kegiatan COREMAP-CTI ADB. Mitra pelaksana dalam kegiatan ini adalah PT. Duta Cipta Mandiri (DCM).

Pada hari pertama dilaksanakan kegiatan FGD Payment for Ecosystem Services (PES). Beberapa hasil diskusi pada pertemuan ini antara lain:

- Belum ada gambaran tentang konsep dan kajian tentang PES yang akan dilakukan di TWP Gili Matra
- Perlu dibuat list oleh konsultan data apa saja yang sudah ada didalam Kawasan dan bagaimana kajiannya serta bagaimana skema yg ditawarkan
- Konsultan perlu fokus pada kajian dan penyusunan skema PES. Yang perlu diperhatikan adalah kajian hukumnya di dalam PES ini dan aktifitas pemanfaatan yang dikenakan PNBP

Selanjutnya dilakukan tinjauan lapangan untuk monitoring dan evaluasi. Terkait infrastruktur, kondisi saat ini masih



Gambar 1.B.6 FGD Payment for Ecosystem Services (PES)

menelusuri status lahan melalui sekda KLU. Yang bisa digunakan di Selatan Gili Trawangan (sunset point), bentuk bangunan adalah pos pengawasan. Kemudian terkait Perda, bangunan tidak boleh lebih dari 4 lanta. Dan terkait DED, lantai 1 akan digunakan sebagai pos pengawasan dan lantai 2 untuk pemantauan.

Pada penutupan kegiatan, Direktur Kelautan dan Perikanan kemudian menyampaikan bahwa perlu ada komunikasi yang baik antara Bappenas, ICCTF, Mitra Pelaksana, Pemerintah Daerah, SKPD dan masyarakat. Selanjutnya diperlukan dukungan semua pihak agar pembangunan menara pengawas dan pondok informasi ini dapat berjalan dengan baik.



Gambar 1.B.7 Foto Bersama Komunitas Nelayan di Gili Air

# **Kegiatan COREMAP-CTI ADB**

# b. Program Master Degree COREMAP-CTI ADB

Pada tanggal 8 Juli 2021 dilaksanakan kegiatan interview dengan Amarullah Rosadi sebagai kandidat program Master Degree COREMAP-CTI ADB. Background beliau adalah lulusan dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. jurusan Ilmu Kelautan UNDIP. Pekerjaan saat ini aktif dalam kegiatan terkait mangrove dan setelah lulus pernah bekerja di beberapa tempat tentang sampah laut, project kelautan perikanan di WPP 715 dan juga konservasi.

Kegiatan pembahasan Beasiswa Master Degree kemudian dilanjutkan pada tanggal 22 Juli 2021. Pada pertemuan ini, turut hadir perwakilan University of Queensland, yaitu Grace Li dan Mark Holland. Pembahasan yang dilakukan meliputi rencana studi, prasyarat yang harus dipenuhi selama studi serta konsekuensi jika melewati batas waktu studi.

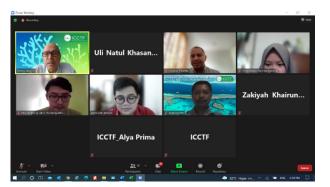
Selanjutnya pada tanggal 3 Agustus 2021 diadakan pembahasan rencana studi dan rencana penelitian serta sharing experience dan kendala dalam pembelajaran. Kegiatan



Gambar 1.B.8 Interview dengan kandidat program Master Degree COREMAP-CTI ADB

lapangan saat ini sedang didiskusikan di NTB oleh mitra, oleh karena itu mahasiswa diharapkan dapat berkomunikasi dengan mitra maupun *site coordinator* di lapangan guna pengumpulan data agar dapat dimulai dari sekarang. Hasil dari pertemuan ini adalah sebagai berikut:

- Pelibatan IPB/co-supervisor dalam setiap kegiatan yang dilakukan
- Pertemuan bersama mitra dan site coordinator ICCTF akan diagendakan
- Diagendakan pertemuan rutin mengenai pembahasan koordinasi *master degree* maupun sharing experience
- Diagendakan pertemuan dengan pihak IPB (Pak Zairion) untuk diskusi mengenai co-supervisor

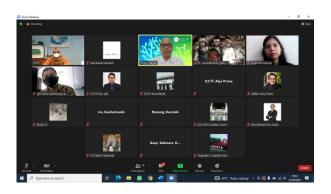


Gambar 1.B.9 Diskusi program Master Degree

# **Kegiatan COREMAP-CTI ADB**

# c. Proposal Grant Package 7

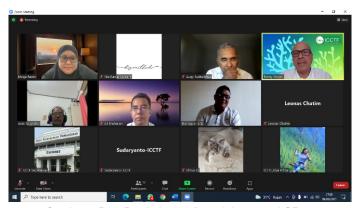
Pada tanggal 21 Juli 2021 diadakan opening proposal GP7. Agenda pada pertemuan ini hanya pembukaan amplop proposal disaksikan oleh semua kandidat yang menyampaikan. ICCTF telah menerima 3 proposal. Paket pertama dari PT. Kacindo, paket kedua dari Trans Intra Asia, dan paket ketiga dari PT. Geohetrands. Untuk selanjutnya Financial



Gambar 1.B.10 Pertemuan pembukaan amplop proposal GP7

proposal akan dibuka setelah proses penilaian technical proposal selesai dan sudah mendapatkan NOL dari ADB.

Selanjutnya diadakan pertemuan pada tanggal 9 Agustus 2021 dengan agenda briefing penilaian Financial Proposal GP7. Dari hasil evaluasi technical proposal: Rank 1 Geohetrands, Rank 2 TIA dan Rank 3 Kacindo. Hasil Technical Proposal sudah di kirimkan ke ADB dan menunggu NOL dari ADB.

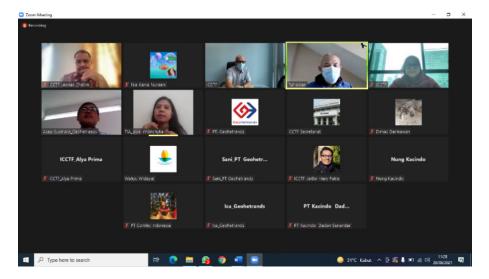


Gambar 1.B.11 Pembahasan financial proposal GP7

Selanjutnya dilakukan publikasi nilai Technical Proposal pada tanggal 20 Agustus 2021. Opening financial proposal dihadiri oleh perwakilan dari PT Kacindo, PT. TIA dan PT. Geohetrands. Perwakilan dari masing-masing perusahaan yang hadir selanjutnya

diharapkan mengisi tanda tangan diberita acara pembukaan financial proposal. Ada pun hasil penilaiannya adalah sebagai berikut:

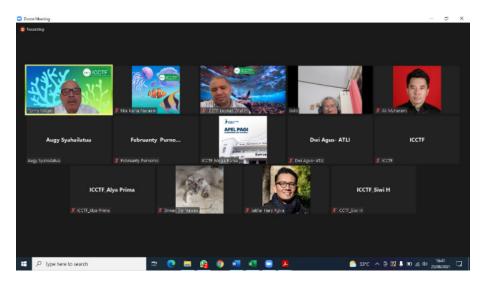
- Score technical Proposal PT. Kacindo: 776
- Score technical Proposal PT. TIA: 799
- Score technical Proposal PT. Geohetrands: 854



Gambar 1.B.12 Publikasi nilai Technical Proposal GP7

Evaluasi proposal finansial GP-7 COREMAP-CTI ADB dilakukan pada tanggal 25 Agustus 2021. Bobot dari financial proposal adalah 20% dari total bobot 1000 point. Dalam kegiatan ini ADB sudah mempersiapkan file excel untuk penilaian Financial Proposal, sehingga hasil akhirnya dapat segera diketahui. Ketiga kandidat konsultan, yaitu:

- 1. PT. Kacindo Danatya (Indonesia) in association with PT. Comlec Indonesia (Indonesia) and PT. Roda Bahari (Indonesia), selanjutnya disebut Kacindo;
- 2. 2) Joint venture between Trans Intra Asia (Pt) (Indonesia) and Yayasan Inisiatif Indonesia Biru Lestari (Indonesia), selanjutnya disebut TIA; dan
- 3. Joint venture between PT. Geohetrands (Indonesia), Reef Check Indonesia Foundation (Indonesia), School of Business - IPB University (Indonesia), and Yayasan Rekam Jejak Alam Nusantara (Indonesia), selanjutnya disebut Geohetrands.



Gambar 1.B.13 Pembahasan Evaluasi Financial Proposal GP-7

# **Kegiatan COREMAP-CTI ADB**

# d. Short Course Supply Chain Perikanan Tuna

# **Pembahasan awal TOR Training**

Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2021. Agenda pertemuan ini terdiri dari pembahasan TOR National Training ADB dan penyampaian informasi dari SFP dan ATLI. Isu yang diangkat adalah bagaimana Tuna Longline bisa mendapatkan sertifikasi seperti negara lain. Untuk mendapatkan nilai tambah, supply chain harus diperbaiki, oleh karena itu sertifikasi sangat penting. Hasil dari pertemuan ini antara lain sebagai berikut:

- ICCTF dan ADB sepakat menyelenggarakan national short course training khusus perikanan tuna (untuk Lesser Sunda adalah Longliners)
- Training akan dilaksanakan di Bali selama 4 hari
- Pelatihan melibatkan peserta dari pusat dan daerah. Peserta memiliki latar belakang terkait perikanan
- Indikator pelatihan yaitu implementasi ICZM terkait sustainable fisheries dan peningkatan kapasitas stakeholders terkait sertifikasi MSC.
- Agenda training saat ini masih bersifat tentative



Gambar 1.B.14 Diskusi pembahasan TOR Training ADB

# **Pelaksanaan Short Course Supply Chain** Tuna dan MSC Certification

Pada tanggal 6-8 September 2021, telah diadakan pelatihan Supply Chain Perikanan Tuna Longline dan Pencapaian MSC Certification yang dilaksanakan di Bali. Kegiatan selama 3 hari ini akan memberikan pemahaman kepada para peserta mengenai pelaksanaan pengelolaan supply chain perikanan tuna longline di Indonesia secara berkelanjutan dan Panduan Proses Sertifikasi Marine Stewardship Council (MSC).

Dalam sambutan pada hari pertama, Direktur Kelautan dan Perikanan Bappenas, menyampaikan bahwa Bappenas melakukan short course ini sebagai enabler agar terdapat benchmark dalam pengelolaan perikanan untuk menghasilkan produk premium dalam hal ini khususnya perikanan Tuna. Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai kesehatan dan kelestarian lingkungan, sehingga masyarakat menginginkan produk yang tersertifikasi baik dalam hal keramahan lingkungan maupun kesehatan, oleh karena itu diharapkan kesadaran para pelaku perikanan mengenai sertifikasi produk perikanan.

Materi pelatihan diberikan secara intensif dengan sela-sela penugasan kelompok melaui studi kasus agar seluruh peserta dapat memahami substansi secara optimal. Pada hari terakhir kegiatan, dilakukan post test dan hasilnya di atas 80% peserta sudah memahami dengan baik mengenai supply chain perikanan tuna longline dan MSC Certification. Kegiatan kemudian diakhiri dengan kunjungan lapangan ke pelabuhan untuk melihat secara langsung kapal tangkap tuna longline dan kantor syahbandar.

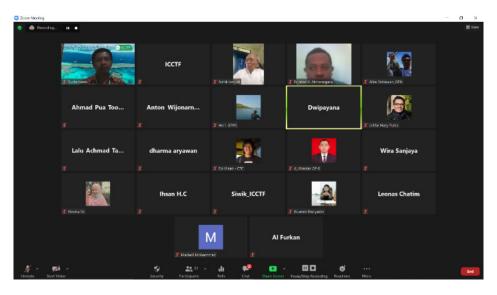
# **Kegiatan COREMAP-CTI ADB**

# e. Koordinasi dengan Mitra COREMAP-CTI ADB

# Penyusunan Dokumen Safeguard COREMAP-CTI ADB

Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2021 antara ICCTF dengan para mitra pelaksana. Pembahasan dalam pertemuan ini adalah sebagai berikut:

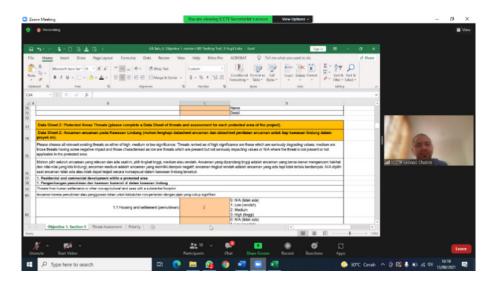
- ADB meminta Social Impact Assessment (Involuntary Resettlement Plan dan Indigenous People Plan). Seluruh dokumen dijadikan satu bersamaan dengan Mitigation Plan
- Penyusunan dokumen Environment oleh Dwipayana, IR-IP oleh Leonas
- Assessment Result (Public Consultation) dan Management Plan (Kelompok masyarakat yang terdampak proyek, berapa persen dampak) diharapkan disampaikan secara detail
- Diharapkan minggu pertama bulan Agustus dokumen-dokumen tersebut sudah lengkap dikirimkan ke ICCTF. Akhir Agustus diharapkan sudah bisa disampaikan kepada ADB



Gambar 1.B.15 Pembahasan Dokumen Safeguard COREMAP-CTI ADB

# Koordinasi dengan Mitra terkait Pengisian GEF Tracking Tools

Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2021. Agenda pertemuan ini adalah mengisi GEF Tracking Tool untuk assessment kawasan Nusa Penida, Gili Matra dan Gili Balu. Peserta kegiatan terdiri dari perwakilan GP 1-6. Dalam kegiatan ini peserta dipersilahkan berkoordinasi langsung dengan Pak Leonas untuk melengkapi data-data terkait safe guard. Hasil pada pertemuan ini kemudian akan dikirimkan ke masing-masing grup mitra.



Gambar 1.B.16 Pengisian GEF Tracking Tool

## **Undangan PT. DCM: FGD dan Identifikasi 2 Jenis SOP Prioritas**

Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2021. Agenda pada pertemuan ini adalah FGD Penyusunan Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Prioritas dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan TWP Gili Matra. Penyusunan SOP diawali dengan adanya Identifikasi yang kemudian dilakukan penyusunan. Hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan SOP ini adalah komunikasi dan koordinasi dengan Bappenas-ICCTF, Pemerintah Daerah Provinsi NTB dan Kabupaten Lombok Utara, Masyarakat setempat serta BKKPN Wil Ker Gili Matra, Mitra Pelaksana GP-2 harus mengawal pelaksanan dari SOP yang disusun Bersama dengan Pemangku kepentingan terkait khususnya di Kawasan Konservasi Perairan Gili Matra, serta Melakuan publikasi terkait penetapan SOP dan opersionalnya dengan menggunakan media cetak dan media sosial.



Gambar 1.B.17 Diskusi para peserta di dalam kegiatan FGD

# Undangan PT. DCM: Pembahasan Kegiatan Kajian PES

Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2021. Pertemuan ini bertujuan untuk menghasilkan kajian konsep pada Payment For Environment Services (PES). Latar belakang kajian konsep PES ini adalah guna menjaga kelestrian dan keberlanjutan Kawasan Konservasi dari tekanan, Pengelolaan membutuhkan pendanaan kontinyu serta, Pembayaran jasa lingkungan (PES) sebagai alternatif. Hal ini juga sesuai dengan kebijakan dari KKP untuk meningkatkan PNBP perikanan dan kelautan. Kesimpulan dari pertemuan ini adalah sebagai berikut:

- Dalam penyusunan konsep dokumen PES perlu pelibatan pihak-pihak yang terkait pariwisata
- Semua stakeholder mendukung dan mengapresiasi kegiatan penyusunan dan pengembangan skema PES beserta pengelolaannya
- Dibutuhkan pembinaan kelembagaan dari pelaku wisata khususnya snorkling untuk menjamin agar wisatawan nyaman dan berwisata sesuai dengan aturan yang telah dietapkan
- Masing-masing pemda dan BKKPN sudah satu pemahaman terkait dengan zonasi pengelolaan dalam hal PES
- Konsep PES ke depannya perlu mengakomodir retribusi yang berbeda untuk setiap kegiatan pariwisata yang berbeda
- Pihak Bapenda berharap ada pengembalian item pajak diving yang ditarik oleh pemerintah pusat dan dikembalikan pada item pajak hiburan sebagai sumber PAD Kab. Lombok Utara



Gambar 1.B.18 Pemaparan oleh Koordinator Perikanan Bappenas

# 1. Support for MPA Management and ETP NPOA Implementation



#### a. SOP Prioritas

Pada periode ini telah disepakati 2 SOP prioritas yang akan didukung dalam proyek COREMAP yaitu SOP Perijinan dan SOP Pelibatan Masyarakat. Kebutuhan SOP tersebut didapatkan melalui hasil kajian EVIKA Kawasan konservasi Nusa Penida dan FGD dengan UPT KKP Nusa Penida. SOP Prioritas tersebut juga sudah dikonsultasikan dengan Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati laut (KKHL) KKP.

#### b.Survei pemantauan dan daya dukung wisata Mola-mola di KKL Nusa Penida

Pada periode ini telah telah tersedia draft metode survei daya dukung wisata penyelaman di lokasi mola-mola dan draft Code of Conduct/ kode etik wisata penyelaman mola- mola. Kegiatan dilanjutkan dengan pengumpulan informasi yang nantinya akan menjadi referensi penetuan metode survei mola-mola. Berikut adalah hasil pengumpulan informasi awal untuk penyusunan metode survei daya dukung wisata mola-mola di Nusa Penida:

- Seluruh dive operator yang diwawancarai setuju terkait rencana dari UPT KKP Nusa Penida untuk melakukan pengelolaan wisata mola – mola berdasarkan dilai daya dukung Kawasan, namun masih meragukan implementasi pengelolaan tersebut dapat dilakukan oeh pemerintah.
- Penilaian lokasi kemunculan mola-mola yang terdiri dari Toyapakeh, Blue Corner, Crystal Bay, Manta Point, Gamat Bay, Buyuk, Ped, Sental, dan Manta Bay.
- 3. Kriteria cleaning station mola-mola
- Interaksi manusia ke mola-mola yang baik
- 5. Metode survei
- Kebijakan pengelolaan wisata mola-mola di dalam Kawasan Konservasi Perairan di Nusa Penida
- Peta Kawasan Konservasi Perairan di Nusa Penida
- Kapasitas daya dukung wisata mola-mola di lokasi penyelaman Toyapakeh, Blue Corner, Crystal Bay, Manta Point, Gamat Bay, Buyuk, Ped, Sental, dan Manta Bay

## c. Pembangunan Pusat Informasi Turis (Tourist Information Centre/TIC)

Pada periode ini telah disepakati lokasi pembangunan bangunan pusat informasi wisata antara Pemerintah Kabupaten Klungkung dengan DKP Provinsi Bali. Lokasi berada di halaman Kantor KKP Nusa Penida. Lokasi tersebut merupakan perubahan dari yang sebelumnya berada di Pulau Ceningan Kecamatan Nusa Penida. Pada periode ini juga telah tersedia draft DED bangunan pusat informasi wisata dan telah dilakukan proses administrasi pinjam pakai lahan. Terkait dengan pembangunan pusat informasi pariwisata, telah dilakukan persiapan survei dengan hasil berupa identifikasi tahapan survei yaitu:

- Pengumpulan data sekunder (referensi dan literatur)
- Pengumpulan data primer (survei lapangan, pengukuran/staking out/site marking, penyelidikan
- · Penyelidikan tanah/soil investigation termasuk penyelidikan air permukaan dan air tanah)
- Pengukuran dan Penyelidikan Tanah
- Penentuan Site Plan, Aksesibilitas, Utilitas dan Fasilitas
- Penyusunan Rencana desain sesuai dengan gambar rencana yang telah disetujui

Berdasarkan koordinasi intensif dengan pemerintah Provinsi Bali, telah tersedia surat dari pemerintah provinsi Bali Nomor B.22.523.32/1315/ UPTD.KKPB/Diskelkan tentang Persetujuan Pemanfaatan Lahan dan Pengelolaan Aset COREMAP CTI-ADB di Nusa Penida.



**PT Duta** Cipta Mandiri berkonsorsium dengan PT Cakra **Buana Aghna** dan **Yayasan Ekosistem Gili** Indah/Gili Eco Trust

#### a. Dokumen SOP Prioritas

Pada tanggal 12 Agustus 2021 dilaksanakan Pertemuan Koordinasi dan Identifikasi SOP Prioritas untuk mendukung Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Gili Matra di Kantor Wilayah Kerja TWP Gili Matra, BKKPN Kupang. SOP Prioritas yang akan disusun dan diupayakan untuk diimplementasikan penggunaannya dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan di TWP Gili Matra adalah:

- SOP Rehabilitasi dan Restorasi Terumbu Karang
- SOP Pengelolaan Wisata Selam: Kesesuaian dan Daya Dukung Lokasi

Selanjutnya pada tanggal 23 Agustus 2021 FGD untuk membahas lebih lanjut dua Jenis SOP Prioritas yang sudah diidentifikasi di Hotel Medana Bay Marina, Kabupaten Lombok Utara. SOP Rehabilitasi dan Restorasi Terumbu Karang akan mengatur:

- Kelengkapan administrasi
- Kesesuain/pemilihan lokasi yang dianjurkan
- Metode rehabilitasi/restorasi
- Sumber bibit karang,
- · jenis karang yang dianjurkan
- Pemeliharaan, pemantauan, dan pelaporan dari pengusul kegiatan rehabilitasi/ restorasi ke BKKPN Kupang; sistem pendanaan, bentuk pemeliharaan/ pemantauan, dan siapa yang melakukan
- Keterlibatan masyarakat local
- Adanya unsur pendidikan

Sedangkan SOP Pengelolaan Wisata Selam akan mengatur:

- Batasan lokasi wisata selam rekreasi berdasarkan jenjang dan jenis penyelaman
- Perilaku wisatawan selam
- Daya dukung lokasi prioritas penyelaman dan karakteristik
- Wisatawan harus memiliki tiket masuk
- Operator selam menyampaikan jenjang sertifikat wisatawannLevel penyelaman
- Pengaturan lokasi Wisata snorkling dan jumlah tamu yang bawa
- Operator selam wajib memliki standar keamanan wisatawan
- Mekanisme implementasi dan pengawasan



Gambar 1.B.19 FGD dua jenis SOP Prioritas

## **b.Visitor Management System**

Pada triwulan ini dukungan untuk survei pengembangan Visitor Management System (VMS) sudah dilaksanakan dan koordinasi dan sinkronisasi dengan BKKPN. Untuk kegiatan selanjutnya dalam menjajaki dan mengupgrade data di BKKPN akan dilaksanakan pada triwulan selanjutnya.

Berdasarkan diskusi intensif dengan BKKPN kupang, beberapa rekomendasi yang dihasilkan adalah:

- Mind map dan workflow terkait VMS dari hulu ke hilir beserta supporting system yang dibutuhkan
- Terdapat beberapa rekomendasi referensi sistem, cara kerja, workflow dan integrasi aplikasi berbasis smartphone apps, website dan aplikasi online pada desktop PC. Beberapa referensi aplikasi yang dapat dijadikan referensi dalam upgrading system BKKPN ke VMS antara lain adalah Si Chupang milik Balai KIPM Mataram dan E-Rinjani milik Balai Taman Nasional Gunung Rinjani
- · Kajian, pembuatan, ujicoba penggunaan, evaluasi, hingga launching sistem yang dapat dikembangkan
- VMS merupakan sistem terintegrasi one data one management, sehingga diperlukan dukungan banyak pihak, baik pengelola, mitra pengelola, kelompok masyarakat, serta sektor privat dan bisnis
- VMS perlu dilengkapi dengan user manual untuk pengelola dan pengguna
- VMS dapat menampilkan seluruh data, informasi dan pengetahuan yang secara simultan dan paralel juga dilakukan dalam 9 output lainnya dalam Grant Package 2

#### c. Payment for Ecosystem Services

Pada tanggal 25 Agustus 2021 dilaksanakan Pertemuan Koordinasi Kajian Konsep PES secara hybrid di Hotel Mina Tanjung, Kabupaten Lombok Utara dan via aplikasi zoom meeting. Jumlah keterlibatan peserta pada kegiatan ini adalah 38 orang, dimana 34 adalah laki-laki dan 4 adalah perempuan. Secara lebih detail, representasi gender dan jumlah peserta offline dan online dapat dilihat pada Tabel.

Tabel 1.B.1 Jumlah dan Representasi Gender Peserta Kegiatan

Gender	Jumlah (orang)	Presentasi (%)
Laki-laki	34	89
Perempuan	4	11
Total	38	100

Pada kegiatan ini, dihasilkan beberapa rekomendasi untuk dapat di tindaklanjuti dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Rekomenasi tersebut diantaranya adalah:

- a. Pariwisata diharapkan dilibatkan dalam menyusun konsep dokumen PES
- b. Semua stakeholder mendukung dan mengapresiasi kegiatan penyusunan dan pengembangan skema PES beserta pengelolaannya
- c. Dibutuhkan pembinaan kelembagaan dari pelaku wisata khususnya snorkeling untuk menjamin agar wisatawan nyaman dan berwisata sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan di zona TWP

- d. Masing-masing pemda dan BKKPN sudah satu pemahaman terkait dengan zonasi pengelolaan dalam hal PES.
- e. Konsep PES kedepannya perlu mengakomodir retribusi yang berbeda untuk setiap kegiatan pariwisata yang berbeda
- f. Pihak bapenda berharap ada pengembalian item pajak diving yang ditarik oleh pemerintah pusat dan dikembalikan lagi ke item pajak hiburan sebagai sumber PAD Kabupaten Lombok Utara



Gambar 1.B.20 Pelaksanaan FGD Kajian Konsep Payment for Environmental Services (PES)

Selanjutnya dilakukan FGD pembahasan PES dengan SKPD dan Pelaku di TWP Gili Matra secara hybrid pada tanggal 28 September 2021 di Sama Sama Hotel, Gili Trawangan. Hasil kegiatan ini diantaranya adalah:

- a. Setelah mendengarkan pemaparan dari pemateri maka peserta yang hadir memahami bahwa konsep PES adalah suatu skema untuk menyediakan insentif baik dalam bentuk uang atau bukan uang bagi pengelola lahan untuk mengelola dan melindungi lingkungan guna mempertahankan fungsi ekosistem
- b. Adanya rencana penarikan tarif 10 ribu kepada pemilik boat dan melibatkan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) yang ada
- c. Adanya rencana penarikan dana satu pintu, dengan legalitas yang jelas dan melihat peraturan-peraturan yang berlaku
- d. Perlu dilakukan pendekatan secara holistic kepada Masyarakat mengenai kajian **PES**

## d. Dinamika Populasi Hiu dan Penyu

Survei penyu pada musim bersarang dilakukan pada tanggal 13-30 September 2021 di Gili Matra. Kegiatan dilakukan melalui koordinasi dengan Wilker Gili Matra BKKPN Kupang, Pokdarwis, dan Pokmaswas Desa Gili Indah.



Gambar 1.B.21 Survei Penyu pada musim bersarang

## e. Capacity Building/training

Kegiatan pelatihan sedang dalam tahap penyusunan SOP rekrutmen peserta pelatihan. Hasil kegiatan yang didapatkan merupakan hasil sementara dari pertemuan/meeting by zoom dengan BKKPN. Adapun hasil yang didapatkan sementara yaitu calon peserta pelatihan terdiri dari pihak BKKPN, pokmaswas, pokdarwis, asosiasi wisata, masyarakat Gili Matra. Peserta pelatihan terdiri dari 20 orang 12 orang laki-laki, dan 8 orang perempuan.



# a. Tersusunnya SOP Untuk Peningkatan Efektivitas Manajemen Kawasan Gili Balu

Pelakasanaan kegiatan FGD 3 SOP Prioritas dilakukan di Hotel Aston Mataram pada tanggal 23 September 2021 dengan dihadiri oleh peserta yang berasal dari instansi-instansi terkait seperti Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, satker PSDKP wilker NTB, Syahbandar, Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan (CDK) Sumbawa-Sumbawa Barat, BKKPN Kupang, Universitas mataram, Universitas 45, Universitas Gunung Rinjani, dan Wildlife Conservation Society (WCS).



Gambar 1.B.22 Kegiatan FGD Identifikasi 3 SOP Prioritas

Pelaksanaan identifikasi 3 SOP mengacu pada Kepdirjen PRL No. 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA) yang mengharuskan suatu kawasan konservasi perairan memiliki SOP di dalam proses pengelolaannya. Lebih lanjut, pada keputusan tersebut menjelaskan 8 SOP penting yang harus dimiliki yaitu 1) Pengawasan, 2) Pemantauan sumber daya, 3) administrasi, 4) pengelolaan organisasi, 5) Penyadartahuan, 6) Pemberdayaan Masyarakat, 7) Perizinan dan pemanfaatan dan 8) Laporan Pelaksanaan Kegiatan. Berdasarkan FGD yang telah dilaksanakan oleh COREMAP-CTI GP3 maka diperoleh hasil identifikasi 3 SOP prioritas yang penting untuk Taman Pulau Kecil Gili Balu yaitu:

- 1) SOP Izin dan Pemanfaatan,
- 2) SOP Pengawasan,
- 3) SOP Pengelolaan Organisasi.

Selanjutnya dilakukan Kegiatan Sosialisasi Rencana Pengembangan SOP Prioritas di Kawasan Konservasi Gili Balu pada tanggal 24 September 2021 bertempat di Kantor GP3 Desa Poto Tano Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat. Kegiatan ini diikuti oleh Dinas kelautan dan Perikanan kabupaten Sumbawa Barat, CDK, Dinas Pariwisata Kabupaten Sumbawa Barat, Kepala Desa Poto Tano, Forum Pokmaswas, tokoh masyarakat.



Gambar 1.B.23 Sosialisasi Rencana Penyusunan 3 SOP Prioritas

Kegiatan sosialisasi diawali dengan penyampaian materi terkait kegiatan COREMAP-CTI GP3 di Gili Balu, kemudian dilanjutkan dengan materi pengembangan 3 SOP prioritas hasil dari FGD yang sebelumnya dilakukan. Dilanjutkan dengan penyampaian informasi terkait metodologi penyusunan SOP.

Adapun kesimpulan yang bisa diambil dari kegiatan Sosialisasi rencana penyusunan 3 SOP prioritas adalah sebagai berikut:

- SOP pengawasan bisa mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi NTB no 8 tahun 2020 tentang pengawasan dan penanggulangan kegiatan penangkapan ikan yang merusak sumber daya perikanan yang sudah ditetapkan tanggal 1 Oktober 2020.
- Sistem perizinan hampir semua menggunakan sistem online sehingga untuk membuat SOP perizinan tinggal menyesuaikan dengan aplikasi yang sudah ada.
- Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan yang aka nada dalam SOP pengawasan, Forum Pokmaswas meminta adanya pelatihan Sistem pengawasan menggunakan aplikasi SMART PATROL.
- Intensitas pengawasan di Kawasan Konservasi Gili Balu masih sangat kurang dan perlu ditingkatkan
- Adapun beberapa permasalahan terkait kegiatan pengawasan adalah belum adanya system pengawasan yang terjadwal, masih kurangnya sarana dan prasarana pengawasan, kurangnya support BBM
- Isu destructive fishing akan terus ada selama pengawasan masih kurang dan kesadaran masayarakat masih lemah.
- Dalam pembuatan SOP kelembagaan bisa memasukkan SOP terkait pokmaswas yang sudah ada di Gili Balu.

# b. Penguatan tata kelola TPK Gili Balu Melalui Pendampingan Penetapan Kawasan dan Revisi Rencana Pengelolaan Zonasi

Kawasan konservasi taman Gili Balu ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 6 September 2021 di Jakarta melalui Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 74 tahun 2021 tentang Kawasan Konservasi di Perairan Gili Balu di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kawasan Konservasi di Perairan Gili Balu di Provinsi Nusa Tenggara Barat dikelola dengan nomenklatur Taman Gili Balu di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan luas 5845,67 Hektare yang terdiri atas:

- a. zona inti dengan luas 608,69 Hektare;
- b. zona pemanfaatan terbatas dengan luas 4.947,78 Hektare; dan
- c. zona lain sesuai peruntukan kawasan berupa zona jalur lalu lintas kapal dengan luas 289,20 Hektare.

Rencana pengelolaan dan Zonasi kawasan konservasi Taman Gili Balu sebelumnya sudah ditetapkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat melalui keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor: 523.1-972 tahun 2016 tentang Rencana Pengelolaan Dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016-2036. Penetapan ini Bersama dengan beberapa kawasan konservasi daerah yang lainnya. Dalam surat keputusan tersebut, Rencana Pengelolaan dan Zonasi Gili Balu masih digabungkan dengan Rencana Pengelolaan dan Zonasi Taman Pesisir Penyu Tatar Sepang Sumbawa barat. Oleh karena itu perlu dilakukan Review Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Gili Balu.

Adapun poin-poin penting Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Gili Balu yang akan dibuat adalah:

- Rencana Pengelolaan dan Zonasi Taman Gili Balu yang nantinya akan dibuat disesuaikan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa pada suatu rencana pengelolaan setidaknya memuat beberapa bagian penting yaitu a) Tujuan dan sasaran yang terukur, b) kondisi biofisik, sosial, ekonomi dan budaya, c) tingkat pemanfaatan eksisting, d) potensi ancaman terhadap target konservasi, e) strategi tata kelola, perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan terhadap target konservasi, f) indikasi program, kegiatan, dan rencana pendanaan; g) rencana kemitraan dan jejaring pengelolaan Kawasan Konservasi; h) Zonasi Kawasan Konservasi; dan i) rencana monitoring dan evaluasi terhadap target pengelolaan.
- Rencana Pengelolaan tersebut adalah review dari rencana pengelolaan yang sudah ditetapkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor: 523.1-972 tahun 2016 tentang Rencana Pengelolaan Dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016-2036
- Rencana pengelolaan tersebut akan memenuhi kebutuhan sesuai yang dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 28/KEP-DJPRL/2020 Tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA).

## c. Laporan Daya Dukung Ekowisata di TPK Gili Balu

#### Kondisi Sosial

Beberapa aspek social yang menjadi perhatian dalam penentuan daya dukung ekowisata di TPK Gili Balu adalah kesiapan masyarakat, peranan wanita terhadap pembangunan pariwisata, penerapan standar sapta pesona, modalitas (modal kerja masyarakat), serta peranan pemerintah.

Masyarakat telah cukup siap dalam menghadapi kegiatan pariwisata di Desa Mereka. Hal ini dibuktikan dengan pengetahuan mengenai objek wisata dan dukungan masyarakat kepada pemerintah. Namun, sejauh ini masyarakat tidak mengetahui rencana yang akan dilakukan oleh pemerintah desa, kabupaten, provinsi ataupun pusat terhadap pembangunan pariwisata di desa mereka.

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada ke 32 responden perempuan menyatakan bahwa banyak factor yang menghambat para perempuan terlibat dalam kegiatan pariwisata, yang pertama dikarenakan jasa pariwisata masih dianggap merupakan perpanjang dari pekerjaan rumah tangga yang seharusnya menjadi pekerjaan perempuan, yang kedua faktor budaya membatasi hak dan keterlibatan perempuan di tempat kerja, ketiga Faktor agama yang masih memiliki peran kunci dalam menentukan norma-norma gender seperti mobilitas dan pekerjaan. Keempat adalah keterbatasan modal usaha, kelima minimnya pengetahuan perempuan informasi mengenai pariwisata dan akses teknologi, keenam adalah kurangnya dorongan dari pemerintah desa, kabupaten dan provinsi dalam meningktkan kemampuan perempuan. Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa masyarakat khsusunya perempuan mengetahui objek wisata yang ada didesa dan sangat setuju jika dikembangkan sebagai Kawasan Wisata. Karena kegiatan wisata dianggap dapat membuka peluang kerja dan menambah pendapatan perempuan.

Dari tujuh indikator sapta pesona yang dievaluasi, semua indicator secara rata-rata sudah terlaksana. Pertama, kondisi keamanan destinasi wisata baik di desa ataupun di pulau dapat dikatakan cukup aman, terbukti dengan kesiapan masyarakat menjaga keamanan lingkugan mereka (85%). Kedua, masyarakat mengaku akan selalu mengikuti tata tertib dari segala aspek (86%). Ketiga, kebersihan pada desa dan destinasi masih menjadi masalah terbesar, namun masyarakat siap menjaga kebersihan lingkungan apabila difasilitasi tempat pembuangan sampah (86%). Keempat, secara rata-rata keempat desa dapat dikatakan sejuk dengan persentasi 85%. Hal ini disebabkan oleh rendahnya minat masyarakat dalam menanam pohon dan tidak adanya lahan terbuka hijau. Kelima, semua responden sepakat untuk menjaga keindahan destinasi baik di lingkungan desa atau area pulau (87%). Keenam, Sebagian besar responden mengaku telah menerapkan prinsip keramahan kepada wisatawan yang datang. Terakhir, masyarakat desa siap memperkenalkan budaya dan ciri khas yang mereka miliki.

Pototano menjadi sangat strategis karena Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Provinsi NTB yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2013-2028 serta Rapperda RIPPARDA Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020 yang menetapkan Desa Pototano sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Daerah. Desa Poto Tano juga termasuk di dalam 99 desa wisata yang telah ditetapkan oleh Gubernur NTB melalui Surat Keputusan Gubernur NTB No. tentang Penetapan 99 Lokasi Desa Wisata di Provinsi NTB tahun 2019-2023. Oleh karena itu pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa Barat sangat mendukung semua kegiatan yang membangun pariwisata Gili Balu di Pototano termasuk kegiatan COREMAP GP3 ini.

#### Kondisi Ekosistem

Survei terumbu karang untuk daya dukung pariwiata tanggal 8-15 September 2021 di Gili Balu, Desa Poto Tano, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat. Survei Terumbu karang dilaksanakan sesuai dengan metode Underwater Photo Transect (UPT) (Giyanto, 2015). Stasiun survei tutupan terumbu karang dilakukan di 11 titik survei di TPK Gili Balu yang mana secara teknis di titik tersebut dilakukan pula survei ikan karang.

Kondisi terumbu karang di TPK Gili Balu memiliki variasi tutupan karang dan karang lunak di setiap Pulau. Stasiun survei Belang 1 dan Paserang 1 memiliki tutupan karang keras tertinggi yaitu 48,7% dan 47%, sebaliknya di Stasiun survei Namo dan Kalong memiliki tutupan terumbu karang keras terendah yang secara berturut-turut yaitu 2,1% dan 14%. Sementara itu, Karang lunak atau Soft Coral merupakan bagian terumbu karang yang memiliki persentase tutupan yang hampir dominan di seluruh stasiun survei. Stasiun Kambing 2 memiliki tutupan karang lunak tertinggi yang mencapai 68,69 %. Sementara itu, stasiun Paserang 2 menjadi stasiun dengan presentase kehadiran karang lunak terendah dengan 11%.

Survei Ikan karang untuk daya dukung pariwisata dilakukan tanggal 8-17 September 2021 di Gili Balu, Desa Poto Tano, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat. Survei ikan karang dilaksanakan sesuai dengan metode Underwater Visual Census (UVC) (English et al., 1997). Hasil Survei ikan karang menunjukkan bahwa lokasi survei Paserang 1 yang diketahui berada di Zona Inti TPK Gili Balu memiliki jumlah jenis ikan terbanyak yaitu 92 jenis ikan dan dengan kelimpahan ikan terpadat yaitu 14.87 individu/ m². Sementara itu survei Belang 3 memiliki jumlah jenis ikan paling sedikit yaitu 34 jenis. Namun demikian, jika diamati berdasarkan kelimpahan ikan karang, maka stasiun survei yang memiliki nilai kelimpahan terkecil yaitu Kenawa 3.

Survei Lamun untuk daya dukung pariwisata dilakukan tanggal 8-14 September 2021 di Gili Balu, Desa Poto Tano, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat. Survei komunitas lamun dilaksanakan sesuai dengan metode transek yang diperkenalkan oleh Hutomo dan Nontji (2014). Penilaian komunitas padang lamun di Gili Balu dilakukan di 5 Pulau yakni Pulau Kalong, Pulau Paserang, Pulau Namo, Pulau Kenawa, Pulau Belang dengan total 7 stasiun yang meliputi masing-masing 1 stasiun di Pulau Kalong, Pulau Paserang, Pulau Namo, Pulau Kenawa, dan 3 stasiun di Pulau Belang. Pulau Kenawa memiliki persentase tutupan lamun terendah dibandingkan pulau-pulau lain yang terlingkup dalam Gili Balu dengan tutupan sebesar 28.75%, dan hanya disusun oleh dua jenis lamun yakni Thalassia hemprichi dengan dominansi jenis 20.42%, dan Cymodocea rotundata sebesar 8.33%. Persentase tutupan lamun tertinggi dan persentase dominansi jenis tertinggi terdapat di stasiun KLO1 yang berada di Pulau Kalong dengan penutupan lamun sebesar 46.56 % dan spesies yang mendominasi yakni Thalassia hemprichi (23.49%).

#### d. Terbangunnya infrastruktur Pusat Informasi MPA dan Pusat Informasi Ekowisata

Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Publik Pembangunan Infrastruktur Dan Program COREMAP-CTI GP3 dilakukan pada hari selasa 3 Agustus 2021 di Kantor Cabang Dinas Kelautan Regional Sumbawa-Sumbawa barat, Desa Poto Tano, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat. Kegiatan tersebut dilakukan bersama perwakilan kelompokkelompok masyarakat lokal yaitu Seluruh Kepala Dusun di Desa Poto Tano, Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS), Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) di sekitar TPK Gili Balu, Polisi Khusus Perinanan, Camat Poto Tano, Perwakilan UKM, dan Pemiliki Boat wisata di TPK Gili Balu.



Gambar 1.B.24 Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Publik Pembangunan Infrastruktur Program COREMAP-CTI GP3

Berdasarkan Pertemuan yang telah dilakukan, terdapat beberapa Kesimpulan penting yang diperoleh yaitu:

- Secara Sosial, Masyarakat menerima dan Tidak ada penolakan terhadap pembangunan infrastruktur yang kan dilaksanakan oleh COREMAP GP3.
- Kelompok Masyarakat dilibatkan di dalam proses perencanaan, pembangunan dan pengelolaan infrastruktur.
- Koordinasi perlu dilakukan untuk memastikan kesesuaian ruang serta programprogram yang mungkin akan dilakukan oleh pemerintah daerah di lokasi pembangunan infrastruktur atau lokasi pembangunan.
- Penting untuk membangun dan menguatkan kelembagaan Kelompok Sadar Wisata di Sekitar Gili Balu

Kegiatan Koordinasi Kesesuaian Ruang Pembangunan Infrastruktur Ekowisata COREMAP-CTI GP3 dilakukan pada tanggal 12 Agustus 2021 di Grand Royal Hotel Taliwang - Kabupaten Sumbawa Barat. Kegiatan tersebut dilakukan bersama Perwakilan SEKDA KSB, perwakilan BAPPEDA KSB, Kepala Dinas Pariwisata KSB, Sekertaris Dinas PUPR KSB, Bidang Destinasi dan Pemasaran DISPARPORA KSB, Bidang Pengkajian dan Pemantauan Lingkungan DLH KSB, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu KSB dan Perwakilan Kelompok Masyarakat sekitar TPK Gili Balu (Gambar 9).

Berdasarkan Pertemuan yang telah dilakukan, terdapat beberapa kesimpulan penting yang diperoleh yaitu:

- Kesesuaian ruang harus disesuaikan DED yang ada di Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, koordinasi dengan investor yang ada ijin kelola, serta memastikan koordinasi sebelum kegiatan dilaksanakan secara intensif
- Untuk pusat informasi Ekowisata (EIC) hanya perlu dengan SPPL karena bangunannya tidak terlalu luas, tapi perlu memastikan dampak lingkungannya diminimalisis seperti system pembuangan limbahnya,
- Perlu disiapkan segera Rekomendasi dari TKPRD dan Surat resmi kepada Bupati untuk penggunaan lahannya
- Jika memungkinkan bangunannya harus mencerminkan kearifan local dan melibatkan masyarakat local dalam pembangunannya supaya pelibatan masyarakat local harus ada sejak awal
- Peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengisi EIC penting dilakukan sejak awal, serta memastikan EIC menjadi asset daerah agar dapat digunakan secara berkelanjutan
- Pengadaan infratsruktur sangat penting dalam pengembangan wisata Gili balu sehingga perlu koordinasi yang berkelanjutan



Gambar 1.B.25 Kegiatan Koordinasi Kesesuaian Ruang Pembangunan Infrastruktur Ekowisata COREMAP-CTI GP3

Menindaklanjuti pertemuan tersebut, COREMAP-CTI GP3 mengusulkan surat pada tanggal 8 September 2021 dengan nomor 29/OPR/IX/2021 yang bertujuan untuk mengajukan permohonan Pinjam Pakai Lahan untuk infrastruktur pusat informasi ekowisata yang bertempat di Desa Poto Tano, Kec. Poto Tano, Kab. Sumbawa Barat.

Kegiatan Koordinasi Kesesuaian Ruang Pembangunan Infrastruktur Ekowisata COREMAP GP3 dilakukan pada tanggal 23 September 2021 di Hotel Ifa Syariah, Taliwang, Kab. Sumbawa Barat. Kegiatan tersebut dilakukan bersama Perwakilan, Kepala Dinas Pariwisata KSB, Kepala Bidang Tata Ruang PUPRPP KSB, Bidang Destinasi dan Pemasaran DISPARPORA KSB, Bidang Pengkajian dan Pemantauan Lingkungan DLH KSB, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu KSB dan Kepala Desa Poto Tano.

Berdasarkan Pertemuan yang telah dilakukan, terdapat beberapa kesimpulan yang diperoleh yaitu:

- Pemerintah KSB melalui Dinas PUPRPP KSB sudah merekomendasikan Lokasi Lahan yang terletak di Segmen 3 (Gambar 12) dengan penjelasan titik lokasi sesuai dengan Surat Rekomendasi Dinas PUPRPP KSB No 600/616/DPU-PRPP/IX/2021 tanggal 23 September 2021.
- Penyerahan Bangunan dilakukan oleh COREMAP-CTI GP3, ICCTF dan BAPPENAS kepada BUPATI Kab. Sumbawa Barat yang kemudian BUPATI akan menetapkan Pengelolaan Bangunan Pusat Informasi Ekowisata kepada SKPD terkait.



Gambar 1.B.26 Koordinasi Kesesuaian Ruang Pembangunan Infrastruktur Pusat Informasi Ekowisata Gili Balu: Penentuan Lokasi Lahan Infrastruktur



Gambar 1.B.27 Rencana lokasi pusat informasi ekowisata Gili Balu

Keberadaan surat rekomendasi Dinas PUPRPP KSB tersebut menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah KSB untuk membuat surat keputusan pinjam pakai lahan yang mana akan ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Sumbawa Barat.

Perkembangan kegiatan penyusunan Dokumen DED Infrastruktur Pusat informasi Ekowisata/Ecotourism information Center (EIC) masih 10 % karena DED masih sebatas pembuatan layout kebutuhan lahan dan rencana denah infrastruktur EIC. Kebutuhan Layout dan denah tersebut sangat penting dibuat karena merupakan kebutuhan di dalam pengajuan surat permohonan pinjam pakai lahan yang akan di sampaikan kepada Bupati Kabupaten Sumbawa Barat. Finalisasi DED akan dilaksanakan pada periode selanjutnya setelah kepastian perizinan pinjam pakai lahan dapat diperoleh dari Bupati Kab. Sumbawa Barat.

e. Pengadaan dan Pemasangan 8 mooring Buoys di lokasi yang tepat untuk menopang kegiatan ekowisata

Survei ekosistem lokasi 8 moring buoys dilakukan pada tanggal 4-10 agustus 2021 di Desa Poto Tano, Kecamatan Poto Tano. Kabupaten Sumbawa Barat.



Gambar 1.B.28. Koordinasi Kesesuaian mooring buoys

survei dilaksanakan sesuai dengan metode penyelaman dengan mengambil data berupa tutupan karang, Kelimpahan dan jenis ikan, kedalaman dan arus permukaan. Titik-titik lokasi mooring merupakan titik lokasi yang direncanakan pada laporan pendahuluan atau Inception Report.

Secara umum, terdapat beberapa titik lokasi yang berubah dikarenakan lokasi yang tidak tepat untuk diletakkan mooring yang diebabkan oleh arus yang sangat kencang, dan lokasi wisata yang tepat untuk wisata air. Walaupun memiliki tutupan karang yang cukup baik di beberapa titik seperti Paserang 2 dan Kambing Belang 1, Mooring buoys masih tetap dapat letakkan di lokasi tersebut karena peletakkan mooring diletakkan pada lokasi yang dipastikan tidak terdapat karang.

Perkembangan kegiatan penyusunan Dokumen Desain Mooring, spesifikasi dan perencanaan biaya masih 50% karena masih dalam bentuk Desain mooring buoys dan spesifikasinya. Kebutuhan Bentuk Desain mooring buoys dan spesifikasinya tersebut sangat penting sebagai bahan untuk dikordinasikan kepada pihak-pihak terkait khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan NTB dan Cabang dinas Kelautan Sumbawa-Sumbawa Barat. Kordinasi harus dilakukan untuk memastikan titik mooring buoys serta spesifikasinya sehingga dapat dijadikan bahan dokumen penyusunan Persetujuan Ruang Laut.

Selanjutnya dilakukan kegiatan koordinasi Kesesuaian mooring Buoys dilakukan pada Hari Rabu, tanggal 22 September 2021 di Aston Inn Hotel, Mataram. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Cabang Dinas Kelautan Sumbawa, Sumbawa Barat, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelestarian Sumberdaya P3K, DKP NTB, Seksi Tata Ruang dan Pengelolaan Perairan P3K, DKP NTB, dan perwakilan NGO World Conservation Society Wilker NTB. Pertemuan dilakukan dengan tujuan untuk memastikan titik mooring buoys sesuai dengan zona kawasan konservasi yang diperbolehkan serta memastikan titik mooring buoys yang akan dilakukan oleh COREMAP-CTI GP3.

Pertemuan tersebut menyimpulkan beberapa hal penting yaitu:

- Semua titik sudah sesuai dengan alokasi ruang laut RZWP3K dan RPZ dengan titik pemasangan Mooring Buoys
- Untuk memenuhi persyaratan perizinan pemanfaatan ruang laut, COREMAP-CTI GP3 harus membuat dokumen persetujuan atau konfirmasi KKPRL 8 titik pemasangan Mooring buoys
- Konsultasi publik harus dilakukan bersama masyarakat untuk memastikan persetujuan masyarakat dengan membut berita acara konsultasi Publik
- Spesifikasi Mooring buoy harus sesuai dengan spesifikasi dan peraturan yang berlaku

# f. Terselenggaranya Kegiatan Capacity building kepada Komunitas, Sub-nasional, dan Nasional.

Implementasi COREMAP-CTI GP 3 di Gili Balu diharapkan dapat memberikan bantuan dalam tata kelola dan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi Perairan di Gili Balu sehingga kawasan dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimum dan berkelanjutan khususnya pada sektor pariwisata. Oleh sebab itu maka, kapasitas sumberdaya manusia sebagai masyarakat lokal di kawasan destinasi Wisata Gili Balu perlu ditingkatkan agar mencapai pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan melakukan identifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas masyarakat local melalui metode partisipatif dengan pelakasnaan Focus Group Discussion (FGD). Hasil FGD tentang penilaian kebutuhan peningkatan kapasitas pariwisata masyarakat dilihat dari table berikut ini:

Tabel 1.B.2 Hasil FGD Penilaian Kapasitas Pariwisata Masyarakat di TPK Gili Balu

No	Laki – laki	Perempuan
1	Pelatihan pengelolaan transportasi untuk pariwisata ke Gili Balu	Pelatihan Kuliner yang berdasarkan CHSE, Tata boga dan tata letak berbasis bahan dasar local
2	Pelatihan Peningkatan promosi wisata yang ada di Gili Balu	Pelatihan pengelolaan homestay yang tersartifikasi
3	Kebutuhn sertifikasi bagi Tour Guide	Pelatihan bahasa asing terutama bahasa Inggris
4	Kebutuhan alat atau tempat keselamatan ketika diving atau snorkeling dengan pelatihan tata kelola usaha diving dan snorkeling	Pelatihan Pembuatan oleh – oleh khas Gili Balu, cinderamata dan tour guide perempuan
5	Melaksanakan kegiatan perbaikan terumbu karang di kawasan Gili Balu dengan metode pelatihan konservasi	Pelatihan Pengolahan Sampah
6	Pelatihan dan pendampingan pembuatan Paket Wisata	Pelatihan pembuatan event-event local yang diselenggarakan masyarakat lokal
7	Pelatihan Tata Kelola destinasi yang berkelanjutan	Pelatihan cara penyajian makanan

# 2. Support for Ecosystem-based Resource Management Plans and Sustainable Marine-based Livelihoods



## 2.1 Paket Kegiatan 4 – Coral Triangle Center

Pada periode triwulan ketiga bulan Juli-September 2021, CTC telah melakukan beberapa pertemuan bersama para pemangku kepentingan, baik itu di tingkat Provinsi Bali, Kabupaten Klungkung, Kecamatan Nusa Penida, hingga tingkat paling bawah yaitu pertemuan dengan perwakilan desa, majelis adat, kelompok-kelompok

masyarakat dan para mitra terkait. Pertemuan bertujuan untuk mengoordinasikan dan menyelaraskan program pemerintah di berbagai tingkat dengan rencana kegiatan proyek yang akan dilaksanakan di Nusa Penida.

Kegiatan survei data dasar untuk ekosistem terumbu karang dan ekosistem mangrove, juga untuk kondisi awal budidaya rumput laut di Nusa Penida telah dilakukan. Hasil survei data dasar disampaikan dalam kegiatan diseminasi hasil survei data dasar dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terdiri dari berbaai unsur baik itu unsur pemerintah, asosiasi penyelam, nelayan budidaya, kelompok masyarakat hingga perwakilan majelis desa adat.

Hasil survei data dasar juga telah membantu tim untuk menentukan beberapa calon lokasi untuk program rehabilitasi mangrove dan terumbu karang di Nusa Penida. Selain faktor lingkungan, kondisi parameter oseanografi dan tingkat kerusakan. Kondisi sosial di beberapa wilayah target juga menjadi pertimbangan, mengingat salah satu keberhasilan dari program restorasi adalah pada fase pemeliharaan yang mana kita akan melibatkan secara aktif kelompok-kelompok masyarakat di wilayah target.

Pada periode kuartal ketiga ini CTC juga telah melaksanakan pelatihan terhadap kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) Gili Buana Desa Nusa Lembongan dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat saat pelaksanaan kegiatan pelatihan mengingat kegiatan tersebut dilaksanakan di tengah-tengah PPKM level 3.

Identifikasi terhadap kelompok target yang akan mendapatkan pendampingan melalui beberapa kegiatan pelatihan pengolahan rumput laut, manajemen bisnis dan pengemasan produk olahan hasil rumput laut pun telah teridentifikasi. Setidaknya ada tiga kelompok yang telah teridentifikasi dan berasal dari 3 Desa yaitu, (i) Desa Jungut Batu, (ii) Desa Suana, dan (iii) Desa Lembongan.

Adapun terkait dengan capaian efektivitas pengelolaan dan skema ekowisata di dalam kawasan konservasi Nusa Penida melalui pembangunan infrastruktur pos pengawasan, jalur mangrove dan menara pantau burung telah dilakukan serial rapat koordinasi yang

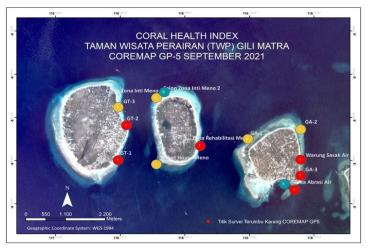
dilaksanakan di Bali dan Klungkung serta kunjungan lapangan untuk melihat kesesuaian lahan secara langsung dan dalam rangka identifikasi kepastian status kepemilikan lahan. Survei dilaksanakan bersama-sama dengan didampingi oleh perwakilan dari Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Klungkung melalui OPD terkait.

# PAKET KEGIATAN 🔾

PT Duta Cipta Mandiri berkonsorsium dengan PT Cakra Buana Aghna, PT Ciriajasa Engineering, dan Yayasan Ekosistem Gili Indah/Gili **Eco Trust** 

#### a. Survei Terumbu Karang di Kawasan TWP Gili Matra

Pada periode ini telah dilakukan survei ekosistem terumbu karang di TWP Gili Matra. Kesepakatan yang telah terbentuk melalui kegiatan FGD Survei Terumbu Karang sebelumnya, selanjutnya diimplementasikan melalui kegiatan survei terumbu karang itu sendiri secara langsung. Survei tersebut dilakukan selama 6 hari di wilayah perairan TWP Gili Matra yang titiknya juga telah disepakati bersama masyarakat dalam FGD Survei.



Gambar 1.B.29 Sebaran Coral Health Index di titik survei TWP Gili Matra

Di semua lokasi penyelaman di TWP Gili Matra, skor CHI (Coral Health Index) rata-rata adalah 3,7, yang menunjukkan kesehatan karang "rendah-sedang" pada skala CHI 1 hingga 10. Menurut skor CHI ini, lokasi tersehat di dalam TWP Gili Matra adalah Halik (6), Titik Hiu (5) dan Taman Patung (5). Sehubungan dengan zonasi TWP Gili Matra, tampak bahwa tiga terumbu tersehat semuanya ada di dalam zona 'Larang Penangkapan Ikan'. Namun, harus dicatat bahwa kesehatan yang lebih tinggi dari terumbu-terumbu ini belum tentu disebabkan oleh status perlindungan zonanya.

Terumbu karang ini mungkin telah ditentukan perlindungannya karena mereka sudah menjadi terumbu yang paling sehat ketika zona sedang diputuskan. Namun demikian, nilai zona larang tangkap untuk konservasi kesehatan terumbu karang terdokumentasi dengan baik dan oleh karena itu kita dapat mengasumsikan bahwa hal itu berperan dalam peningkatan kesehatan terumbu karang di zona 'Dilarang Memancing' di TWP Gili Matra. Rendahnya biomassa ikan (< 970 kg/ha) di semua titik survei.

# b. Penyusunan Dokumen Potensi Sumberdaya Perikanan dan Potensi Usaha (Livelihood) Di Kawasan Gili Matra

Kegiatan kapasitasi masyarakat di dalam Kawasan TWP Gili Matra dikhususkan bagi masyarakat

nelayan dan masyarakat yang memiliki usaha terkait dengan perikanan. Kegiatan awal dimulai sejak bulan Juli 2021 ketika tim tenaga ahli mengumpulkan data skunder dari dinas terkait dan penyuluh perikanan KKP. Data tersebut selanjutnya direview dan disimpulkan bahwa perlu adanya kegiatan pencuplikan data primer untuk menyempurnakan data skunder tersebut. Kegiatan pencuplikan data primer selanjutnya dilanjutkan dengan FGD Bersama masyarakat, BKKPN Kupang dan Pemerintah Desa untuk menyepakati dan menyeragamkan data yang akan dijadikan basis data awal potensi sumber daya perikanan dan livelihood. ToR kegiatan tersebut telah disusun dan dikirimkan kepada pihak ICCTF untuk direview.

#### FGD Kelompok Nelayan

Telah dilakukan FGD dalam rangka mengumpulkan informasi dari kelompok nelayan untuk penyusunan dokumen potensi sumberdaya perikanan dan potensi usaha (livelihood) di Kawasan Gili Matra.

Kegiatan FGD dibuka oleh Kepala Desa Gili Indah. Pada kesempatan tersebut, Kepala Desa Gili Indah menyampaikan bahwa Desa Gili Indah merupakan bagian dari kawasan konservasi TWP Gili Matra sehingga aktivitas perikanan tangkap dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku di kawasan konservasi. Disampaikan pula bahwa di Desa Gili Indah terdapat enam kelompok nelayan yang tersebar di Dusun Gili Air, Dusun Gili Meno, dan Dusun Gili Trawangan. Setelah itu, terdapat arahan dari Koordinator Wilayah Kerja Gili Matra - BKKPN Kupang Wilker Gili Matra. Pada kesempatan tersebut, disampaikan bahwa kegiatan COREMAP-CTI III yang dilakukan di Kawasan Gili Matra akan membantu meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi Gili Matra.

FGD ini menghasilkan beberapa kesepakatan, antara lain:

- 1. Kelompok nelayan yang ditetapkan untuk mendapatkan pendampingan pada kegiatan COREMAP CTI III adalah kelompok nelayan Cinta Damai 1 dari Gili Air, kelompok nelayan Meno Bahari 1 dari Gili Meno, serta kelompok nelayan Nagita (Nelayan Gili Trawangan). Keputusan penetapan kelompok tersebut telah dilakukan secara musyawarah.
- 2. Kelompok yang mendapatkan pendampingan akan mengurus legalitas kelompoknya minimal berupa akta notaris.

## > FGD Kelompok Usaha

Telah dilakukan Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka mengumpulkan informasi dari kelompok pengolah dan pemasar ikan untuk penyusunan dokumen potensi sumberdaya perikanan dan potensi usaha (livelihood) di Kawasan Gili Matra.

Dari hasil diskusi dan berbagai masukan pada kegiatan ini, maka dihasilkan informasi mengenai potensi sumberdaya perikanan di Kawasan Gili Matra sebagai berikut:

- 1. Kelebihan produk ikan dibandingkan sumber protein lainnya adalah protein yang tinggi, mudah dicerna, asam lemak tak jenuh, dan mengandung vitamin A dan D.
- 2. Produk ikan yang diolah tidak hanya daging saja, tetapi tulang, air hasil cucian ikan, kepala ikan, kulit ikan, bahkan bagian dalam perut ikan dapat diolah.
- 3. Produk olahan ikan diperbolehkan menggunakan pengawet makanan tetapi jumlahnya sesuai standar yang telah ditentukan. Hal utama yang arus diperhatikan dalam mempertahankan produk olahan ikan adalah mutu bahan baku ikan yang digunakan harus yang kualitas terbaik. Selain itu, teknik pengemasan juga mempengaruhi keawetan produk olahan ikan. Olahan ikan yang berminyak sebaiknya dijauhkan dari sinar matahari secara langsung. Adapun bahan alami yang dapat digunakan sebagai bahan pengawet diantaranya chitosan yang berasal dari kulit udang.
- 4. Jenis ikan yang paling banyak di sekitar Gili Matra adalah ikan lanter (sejenis ikan julung-julung), dimana jenis ikan tersebut diolah menjadi ikan kering. Jenis olahan yang memungkinkan dilakukan dengan ikan lanter tersebut adalah olahan bakso dan nugget. Pada dasarnya, apapun olahan ikannya, sangat penting untuk memperhatikan kemasan sebagai nilai jual.
- 5. Kelompok pengolah dan pemasar ikan membutuhkan pendampingan dari OPD terkait sehingga kelompok tetap eksis melakukan aktivitas pengolahan dan pemasaran ikan. Selain itu, perlu pula stimulan berupa sarana dan prasarana untuk mengembangkan kapasitas produk olahan.

# c. Skema surveilans dilaksanakan dan pos surveilans dan/atau infrastruktur lain yang relevan untuk surveilans ditetapkan untuk mendukung patroli KKP

Upaya pembangunan infrastruktur pengawasan di Kawasan TWP Gili Matra masih terus dilakukan. Upaya tersebut telah dilakukan melalui beberapa instansi pemerintah terkait namun belum menemukan kepastian lahan yang siap digunakan untuk pembangunan infrastruktur pengawasan. Koordinasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara (KLU) adalah upaya yang telah dilakukan di bulan Agustus 2021. Koordinasi dan diskusi dilakukan bersama sekertaris Bappeda KLU dan Asisten II Setda KLU.

Hasil koordinasi dan diskusi tersebut memberikan suatu dukungan verbal terhadap kegiatan pembangunan infrastruktur pengawasan di Desa Gili Indah. Sekertaris Bappeda KLU menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten memiliki lahan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pengelolaan Kawasan. Lahan yang dimaksud tersebut berada di Dusun Gili Air dan berlokasi di tengah pulau. Dukungan verbal juga diungkapkan oleh Asisten II Setda KLU terhadap rencana pembangunan infrastruktur pengawasan di TWP Gili Matra. Menurut Asisten II Setda KLU, pembangunan tersebut dapat dilakukan di atas sepadan pantai yang merupakan aset pemerintah KLU. Opsi tersebut dapat dipertimbangkan mengingat upaya yang dilakukan melalui pemerintah Provinsi belum mendapat kejelasan akibat berbagai faktor.



Gambar 1.B.30 Koordinasi program bersama Sekretaris Bappeda KLU

### d. Stakeholder Meeting

Pada hari ini Rabu, 8 September 2021 telah dilaksanakan stakeholder meeting di Aula Meeting Hotel Royal Singosari Vill Karang Gili Air. Pertemuan tersebut mengagendakan pengenalan program kegiatan COREMAP-CTI ADB GP2 dan GP5 kepada masyarakat yang dan pemangku kepentingan di TWP Gili Matra. Selain itu, pertemuan tersebut bertujuan untuk menyerap aspirasi stakeholder dalam menyukseskan program kegiatan GP2 dan GP5. Dalam pertemuan tersebut telah hadir berbagai stakeholder terkait dan perwakilan masyarakat yang ada di TWP Gili Matra.

Dari hasil diskusi dan berbagai masukan pada kegiatan ini, maka dihasilkan kesepakatan sebagai berikut:

- 1. Perlu adanya koordinasi antara GP2 dan GP5 dengan stakeholder terkait, baik tingkat dusun, desa, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU), Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan pusat.
- 2. Perlu dimunculkan atau dilakukan analisa potensi penurunan ekonomi terkait perubahan cuaca dan iklim.
- 3. Perlu mengkaji konsep pengelolaan pusat informasi untuk bergabung dengan pelayanan retribusi pemanfaatan Kawasan TWP Gili Matra
- 4. Perlu peningkatan kapasitas SDM untuk kelompok masyarakat yang bergerak dibidang pariwisata melalui pelatihan selam dan kolaborasi pemasaran pariwisata.
- 5. Perlu melakukan pembinaan kelompok nelayan agar kegiatan perikanan tangkap seimbang dengan kegiatan konservasi.
- 6. Perlu pendampingan kelompok pengolah dan pemasaran ikan terkait pengolahan dan pemasaran ikan, dimana pada kegiatan pemasaran perlu melibatkan BUMDes.
- 7. Peserta yang hadir pada kegiatan Stakeholders Meeting hari ini bersedia mendukung Forum Koordinasi Kolaborasi Pengelolaan (FKKP) Gili Matra
- 8. Dokumentasi dan materi kegiatan dari Mitra Pelaksana diinformasikan kepada Pemerintah Desa, BKKPN, dan Mitra pendukung lainnya.



Dalam peroiode ini GP6 telah melaksanakan capaiancapaian kegiatan yang diantaranya, terkait rehabilitasi mangrove bekerjasama/kolaborasi dengan LSM-LOH. Terlaksananya penanaman mangrove bersama yang dihadiri oleh Bupati dan perangkat pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa Barat dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tengara Barat serta komponen masyarakat.

Proses monitoring, pemeliharaan dan pengawasan rehabilitasi mangrove dilakukan secara periodik oleh masing-masing kelompok yang pembagian kerjanya sudah ditetapkan untuk efisiensi dan efektifitas. Setiap minggu pasca penanaman mangrove dilakukan monitoring oleh kelompok untuk melihat kemungkinan ada bibit yang tercabut atau mati karena makan oleh hama dan jenis binatang pengganggu yang lainnya. Jumlah bibit mangrove yang disiapkan adalah sekitar 3000 pohon untuk menyulam bibit yang mengalami kematian.



Gambar 1.B.31 Kegiatan monitoring dan perawatan

Beberapa progress yang tengah berjalan dan selesai dilaksanakan oleh Fisheries Specialist diantaranya adalah menyusun dan mengajukan TOR (Term Of reference) atau kerangka acuan kerja pelaksanaan FGD Pertukaran Pembelajaran Praktik perikanan Terbaik, koordinasi dengan instansi terkait, dan melaksanakan FGD Pertukaran Pembelajaran Praktik perikanan Terbaik. Koordinasi yang dilaksanakan selama bulan September 2021 diantaranya dengan Dinas Perikanan Kabupaten Sumbawa Barat, Kantor Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbawa Barat, Narasumber kegiatan FGD, Pokmaswas, kelompok nelayan, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Nusa Tenggara Barat.

Beberapa permasalahan perikanan di kawasan Gili Balu saat ini diantaranya adalah dominasi nelayan skala kecil dan tradisional, area jelajah berkisar di perairan pesisir, sudah padat armada kecil, wilayah pesisir terbuka, siapa saja bisa masuk, termasuk aktivitas yang merusak, Penggunaan teknologi yang terbatsa serta tantangan iklim, Beberapa SDI Fully exploited dan Over exploited, Konflik Nelayan, dan belum optimalnya pemberdayaan masyarakat.

Salah satu persoalan yang dihadapi dalam menjaga lingkungan yaitu dari faktor alam yang yang sangat dinamis dimana dalam kurun waktu 1 tahun terakhir, cuaca di lautan tidak menentu, gelombang yang cukup bear dan faktor manusia yang sebagian masih masih perlu ditingkatkan kepedulian dan pengetahuannya terhadap fungsi ekosistem dan kelestarian alam bagi manusia dan lingkungan. Oleh karena itu dengan ada nya dukungan dari Pemerintah dan tokoh masyarakat terkait dengan pemberian contoh dalam penanaman mangrove bersama tersebut, bisa memberikan pendidikan dan motivasi kepada masyarakat yang terkait ataupun yang melakukan aktivitas di laut secara langsung bisa lebih memahami fungsi keberadaan mangrove.

# 3. Short Course Supply Chain Perikanan Tuna dan Pencapaian Marine Stewardship Council (MSC) Certification

Short course ini dilaksanakan pada tanggal 6-9 September 2021 di Bali. Tujuan dari short course ini adalah untuk meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan terkait pengelolaan perikanan tuna longline untuk memenuhi standar sertifikasi produk yang meliputi best practice, analisis model, pengembangan dan simulasi untuk mendukung pelaksanaan RPJMN 2020-2024 terkait pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir dan laut.

Peserta pelatihan berjumlah 34 orang. Peserta berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Akademisi, LSM dan Kelompok Nelayan Lokal, didukung oleh 10 narasumber dari berbagai latar belakang. Di akhir Short Course, hasil pre-test dan posttest menunjukkan bahwa pemahaman peserta meningkat sekitar 85%. Oleh karena itu, short course "Supply Chain Tuna Fishery Longline and Achievement of Marine Stewardship Council (MSC)" ini dilaksanakan oleh ICCTF dengan harapan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan berkelanjutan di Indonesia.



Gambar 1.B.32 Pembawaan materi oleh narasumber

# 4. Master Degree Program

Tiga dari empat mahasiswa master degree program, yaitu Urai Ridho, Ratu Fathia, dan Zakiyah Chairunnisa telah menyelesaikan semester pertama tahun 2021 di University of Queensland, Australia melalui metode pembelajaran daring. Ketiga mahasiswa telah memenuhi syarat untuk melanjutkan ke semester berikutnya. Sementara satu mahasiswa yaitu Amrullah Rosadi baru memulai kegiatan perkuliahan pada bulan Juli 2021.

Pada semester yang kedua, dua mahasiswa akan memulai penelitian mereka. IPB University telah menunjuk tiga co-supervisor untuk membantu mahasiswa dalam melakukan penelitian mereka. Berikut daftar co-supervisor dengan nama mahasiswa dan topik penelitiannya.

Tabel 1.B.3 Pembagian supervisor dan topik penelitian

Supervisor	Mahasiswa	Topik Penelitian
Dr. Ir. Luky Adrianto, M.Sc	Ratu Fathia	Analysis of the Coral Reef Ecosystem Services Utilization in Gili Matra Marine tourism Park from a stakeholder Perspective
Dr. Ir. Ario Damar, M.Si	Zakiyah C	Carbon Balance Analysis in Gili Matra Marine Tourism Park
Dr. Fery Kurniawan, S.Kel, M.Si	Urai Ridho	Integrating Eudaemonic and Hedonic Approach to assess the impact of Marine Tourism and Marine Protection on Cultural Ecosystem Services: A case of Gili Matra Islands, Indonesia

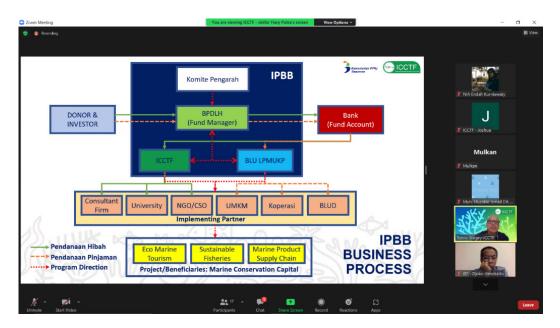
# C. BLENDED FINANCE



#### a. Pembahasan Skema Blue Ocean dengan BPDLH

Pada tanggal 10 Agustus 2021 telah dilaksanakan diskusi untuk membahas skema blue ocean dengan BPDLH. Kolaborasi utama yang diharapkan antara ICCTF dengan BPDLH adalah dalam hal sustainable blue financing. Dalam diskusi ini, skema blue ocean yang sudah ada mendapatkan masukan-masukan dari berbagai pihak. Masukan tersebut yaitu:

- Perlu ditambahkan peran dari kementerian-kementerian atau lembaga teknis dalam design sehingga dapat terlihat kolaborasinya/blended-nya
- Sisi private/korporasi perlu diperlihatkan dalam design (khususnya supply chain)
- Terkait perubahan iklim (blue carbon) perlu keterlibatan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), selain BLU LPMUKP
- Untuk blending berbagai project, perlu asset dari K/L teknis terkait seperti KLHK dan KKP
- Perlu tambahan KLHK dalam design, selain BLU LPMUKP
- Perlu ases legalitas dan leveling yang harus clear dari lembaga institusional dan windows yang ada



Gambar 1.B.33. Bagan Alir Proses IPBB

### b. Diskusi dengan Kehati

Tujuan dari diskusi ini adalah untuk menjalin kerja sama antara ICCTF dengan Kehati untuk berkolaborasi dalam mengembangkan suatu pilot project untuk menarik impact investment melalui skema blue finance. Melalui diskusi ini didapatkan ide contoh project seperti Eco Tourism di Raja Ampat karena ICCTF dan Kehati sama-sama memiliki program di sana. Pengembangan high value resort di Misool, Raja Ampat yang memiliki impact yang besar terhadap konservasi dan lingkungan dapat menjadi pilot project. Resort menjadi bisnis utama yang memberikan manfaat bagi NGO dan masyarakat sekitar untuk mengelola konservasi. Impact investment akan tertarik jika mampu menunjukan pipeline program dan melibatkan entrepreneur lokal menjadi suatu ekosistem bisnis yang sustainable dan berdampak bagi lingkungan dan masyarakat. Konsep project bersama antara ICCTF (COREMAP) dan Kehati (Blue Abadi) dapat diusulkan kepada BPDLH mengisi program biru. Perlu brainstorming ide-ide bisnis yang dapat dikembangkan menjadi project impact investment.



Gambar 1.B.34 Dokumentasi rapat dengan Kehati

# D. BLUE CARBON



Pada periode Triwulan ke-III TA 2021 belum ada kegiatan besar yang diselenggarakan oleh ICCTF dalam windows blue carbon. Hal ini dikarenakan pada periode tersebut ICCTF masih dalam proses menunggu hasil review oleh mitra pembangunan AFD -Perancis terhadap usulan proposal blue carbon project dan persiapan menjelang agenda COP 26 di Glasgow bersama DISER - Australia. Berikut adalah beberapa kegiatan yang dilaksanakan/diikuti oleh ICCTF selama periode Triwulan ke-III TA 2021:

### Undangan Strategi Pengelolaan Karbon Biru Indonesia

Pada tanggal 7 Juli 2021, ICCTF menghadiri undangan zoom Diskusi Pojok Iklim dengan tema "Strategi Pengelolaan Karbon Biru Indonesia". Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan dihadiri oleh peserta yang terdiri dari Kementerian/Lembaga, organisasi non-pemerintah, perguruan tinggi, dan sektor privat. Tujuan dari pertemuan ini adalah menyusun persepsi bersama terkait konsep pengelolaan dan pengembangan karbon biru di Indonesia. Dalam sambutannya, Ketua Dewan Pertimbangan Pengendalian Perubahan Iklim, Bapak Sarwono Kusumaatmadja, menyampaikan bahwa Indonesia memiliki basis sumber daya alam dan potensi karbon biru yang sangat kaya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Untuk menjaga keberlanjutannya, salah satu upaya yang diakukan Pemerintah adalah melakukan rehabilitasi mangrove sebagai salah satu program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Sebagai pemapar pertama, Direktur Kehutanan dan Sumber Daya Air, Kementerian PPN/BAPPENAS, Ibu Nur Hygiawati Rahayu, menyampaikan bahwa dalam RPJMN 2020-2024, perubahan iklim masuk ke dalam Prioritas Nasional 6 dengan program prioritas yaitu pembangunan rendah karbon dan peningkatan ketahanan bencana dan iklim. Proyek antar kementerian dan lembaga dalam hal ini antara lain rehabilitasi mangrove. Secara umum, tantangan tata kelola mangrove adalah degradasi ekosistem, kurangnya data dan metodologi terstandardisasi, kurangnya kapasitas teknis, koordinasi, pendanaan dan pilot project.

Selanjutnya, Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, KKP, Bapak Andi Rusandi menyampaikan bahwa ekosistem karbon biru berpotensi menyerap 50% karbon yang ada di atmosfer. Perluasan kawasan konservasi perairan dengan target 32,5 juta ha di tahun 2030, ditargetkan setidaknya 20 juta ha yang dikelola dengan baik sehingga ekosistem mangrove dan lamun dapat berfungsi secara optimal. Saat ini setidaknya 92.73% ekosistem lamun sudah masuk ke dalam kawasan konservasi.

Kemudian, Direktur Pengelolaan Sampah, Ditjen PSLB3, Bapak Novrizal Tahar, menyampaikan bahwa sampah merupakan salah satu 'predator' bagi ekosistem pesisir di Indonesia. Timbulan sampah di lautan berasal dari kebocoran sampah dari daratan ke perairan serta aktivitas di lautan. Saat ini, Indonesia sedang mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2018 tentang penanganan sampah laut, bahwa Indonesia akan menurunkan sampah laut sebesar 70% pada tahun 2025. Rencana aksi yang dilakukan meliputi lima kelompok kerja yang terintegrasi dengan berbagai lembaga.

Pemaparan terakhir disampaikan oleh Direktur Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring Pelaporan Verifikasi, Ditjen PPI, Bapak Syaiful Anwar. Beliau menyampaikan bahwa karbon biru atau coastal wetland perlu menjadi pertimbangan dalam menghitung keluaran dan serapan emisi GRK Indonesia. Untuk membangun mutual trust dan confidence sebagaimana dalam mekanisme Enhanced Transparency Framework, negara-negara diminta untuk menyampaikan laporan inventarisasi emisi GRK nasional sesuai pedoman dari IPCC. Dalam hal ini, mangrove yang diinventarisasi tidak hanya hutan mangrove saja, tapi juga mangrove di lahan yang tidak berhutan.

Penutupan kemudian disampaikan oleh Penasihat Senior Menteri LHK, Bapak Efransjah. Beliau menyampaikan bahwa Indonesia perlu mengetahui komunitas karbon biru yang dimiliki, salah satunya dengan inventarisasi GRK. Harapannya, vegetasi mangrove dapat menyumbang angka pengurangan karbon. Segala strategi umum, instrumen hukum, dan pengelolaan dalam upaya menjaga kesehatan lahan basah serta pengelolaan sampah dengan demikian perlu diseksamai sedemikian rupa sebagai fokus kontribusi aksi mitgasi dan adaptasi perubahan iklim.





Gambar 1.B.35 Pemaparan oleh narasumber kegiatan

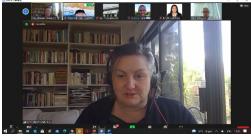
# Diskusi dengan DISER tentang COP Event

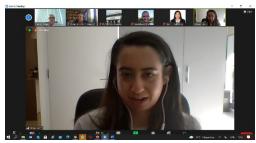
Pada tanggal 28 September 2021, ICCTF bersama dengan DISER - Australia mengadakan rapat zoom untuk membahas persiapan menjelang agenda United Nations Climate Change Conference COP 26 di Glasgow, UK. Sebagai pembukaan, Tonny Wagey menyampaikan bahwa Bappenas sangat mendukung Australia dalam COP 26, namun sayangnya Bappenas tidak dapat turut hadir secara langsung. Oleh karena itu Bappenas mengusulkan untuk menampilkan video opening remarks dari Bapak Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam sekitar 5-10 menit dan untuk sesi panel, Indonesia akan turut berpartisipasi secara online diwakili oleh Executive Director ICCTF. Sebagai bentuk dukungan lainnya, ICCTF juga akan membantu sirkulasi dan promosi kegiatan melalui media sosial.

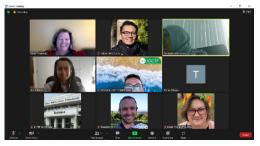
Dari jalannya diskusi, beberapa hal yang digaris bawahi antara lain paviliun Australia akan berlangsung sekitar satu sampai satu setengah jam, terdiri dari sesi Remarks dan Panel Expert & Discussion (Q&A). Untuk jumlah narasumber diperkirakan maksimal 3-4 orang dan DISER juga akan membuat video recorded untuk sambutan dari Australian Ambasssador. Topik kegiatan diusulkan berkaitan dengan Policy development dan implementation program. Selain itu, juga diusulkan agar topik kegiatan membahas 'grassroot' dari blue carbon serta terkait dengan blue financing untuk memastikan keberlangsungan program.

Pada akhir pertemuan, DISER menyampaikan akan berkoordinasi kembali dengan Australian Pavillion Secretariat. Pertemuan tersebut akan dilaksanakan sekitar tanggal 6 Oktober 2021. Kesimpulan dari pertemuan ini ICCTF dan DISER sepakat untuk bekerjasama dan berkolaborasi dalam mensukseskan terselenggaranya Australian Pavilion terkait Blue Carbon program pada COP 26.







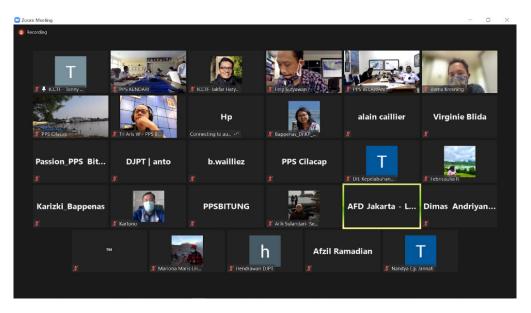


Gambar 1.B.36 Diskusi pembahasan persiapan COP 26 antara ICCTF dan DISER

# **Program Strategis** dan Penggalangan Dana (fundraising)

#### 2.1 **Pembahasan Grant Eco Fishing Port**

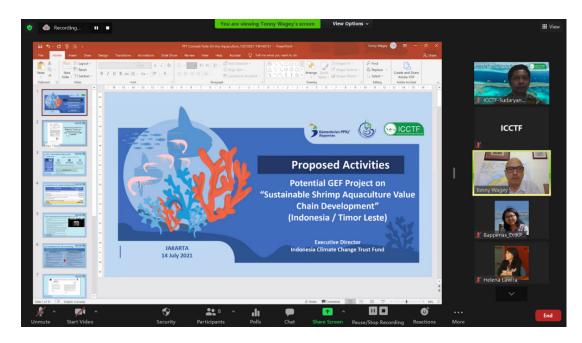
Pada tanggal 7 Juli 2021 telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Grant Eco Fishing Port secara online melalui Zoom. Rapat dihadiri oleh perwakilan dari AFD, CCI, DJPT-KKP, Bappenas, ICCTF, serta perwakilan dari Pelabuhan Belawan, Kendari, Bangka Belitung, dan Cilacap. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk mendiskusikan pendanaan hibah sebesar EUR 400.000 oleh AFD. Hibah akan dibagi menjadi dua yaitu untuk training sebesar 300.000 dan studi PPS Cilacap yang diintegrasikan dengan studi AMDAL sebesar 100.000. Materi training mencakup proses bisnis, management, infrastruktur, regulasi, tata kelola organisasi, pengelolaan produk perikanan, lelang, integrated management system dan generate revenue. Training juga akan mencakup pengelolaan sanitasi, energi dan produk. Pembelajaran juga didapatkan melalui kunjungan kerja ke Pelabuhan Perikanan di Prancis. Namun masih perlu technical meeting untuk membahas detail kegiatan, pembahasan tujuan dan topik-topik kegiatan Loan Agreement ditargetkan pada Q4 2021 (Desember), namun akan sedikit terhambat karena terdapat penambahan PPS Cilacap.



Gambar 2.1 Diskusi Grant Eco Fishing Port

### Pembahasan "Sustainable Shrimp Aquaculture Value Chain Development"

Pada tanggal 14 Juli 2021 telah dilaksanakan pembahasan mengenai Sustainable Shrimp Aquaculture yang dihadiri oleh perwakilan ADB, Bappenas, serta ICCTF melalui Zoom. Pertemuan ini membahas mengenai pemanfaatan pakan buatan dan konsep tambak udang yang akan dipakai, apakah tambak intensif atau tambak silvofishery. Terkait konsep tambak diperlukan dukungan paper dan masukan teknis dari KKP.



Gambar 2.2 Pemparan oleh Executive Director ICCTF

Pembahasan mengenai Sustainable Shrimp Aquaculture Value Chain Development dilanjutkan dengan Pembahasan Tindak Lanjut Proposal bersama Direktorat Jendral Perikanan Budidaya KKP pada tanggal 23 Agustus 2021 melalui Zoom. Pertemuan ini membahas GEF Proposal terkait program kajian strategis dengan fokus pakan udang dan mendiskusikan komponen-komponen dalam PIF Document. Setelah pertemuan ini Bappenas akan menyampaikan surat pengantar dokumen PIF kepada DJPB-KKP untuk diteruskan kepada GEF OFC agar mendapatkan Endorsement Letter. Melalui pertemuan ini diharapkan pinjaman dan hibah dapat tuntas pada bulan Oktober dan November 2021. Pada Februari 2022 ditargetkan loan agreement sudah ditandatangani.



Gambar 2.3 Dokumentasi suasana diskusi

#### **ICCC - ADB Knowledge Event Repository** 2.3

Konferensi ini dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2021. International Climate Change Conference (ICCC) adalah platform untuk membahas praktik internasional yang dapat membantu negara berkembang anggota ADB seperti transisi Indonesia ke ekonomi rendah karbon dan pemulihan COVID-19 yang tangguh dan inklusif. Agenda pada konferensi ini membahas berbagai inisiatif yang diambil terkait perubahan iklim, kendala yang dihadapi dalam mengatasi perubahan iklim, dan mengidentifikasi solusi yang mungkin dilakukan. Konferensi ini juga menyoroti peran mitra pembangunan multilateral seperti ADB dalam mendukung aksi iklim di Indonesia dan negara lain.



Gambar 2.4 Pertemuan ICCC kerjasama antara Kemenkeu dan ADB

#### 2.4 Diseminasi katalog WIPO GREEN/WIPO GREEN **Catalogue Dessimination Event**

Pada tanggal 2 September 2021, ICCTF mengikuti undangan WIPO GREEN CATALOGUE DISSEMINATION EVENT dengan tema "Technological Options for The Treatment and Valorization of Palm Oil Mill Effluent (POME) in Indonesia". Dalam pertemuan ini disampaikan penjelasan mengenai pendekatan WIPO di antaranya: riset terkait perubahan iklim, ketahanan pangan, dan kebutuhan lingkungan, riset teknologi, mempertimbangakan kebutuhan bersifat lokal/solusi global, membangun dialog antara pencari dan penyedia, memberikan materi pengetahuan tentang teknologi di berbagai sektor, pendekatan terfokus, basis data WIPO GREEN sebagai alat utama, bekerja melalui konsultan dan asosiasi industri dan investor. WIPO GREEN yang merupakan platform online untuk pertukaran teknologi. Ini mendukung upaya global untuk mengatasi perubahan iklim dengan menghubungkan penyedia dan pencari teknologi ramah lingkungan.





Gambar 2.5 Pemaparan mengenai WIPO Green Acceleration Project

# 2.5 Undangan Focus Group Discussion (FGD) Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah yang Berketahanan Iklim

Pada tanggal 8 September 2021, ICCTF mengikuti undangan FGD Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah yang Berketahanan Iklim. Pada pertemuan ini dilakukan penjelasan mengenai Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon Daerah, Nationally Determined Contibution (NDC) Indonesia, dan Penyusunan dan Internalisasi Pembangunan Rendah Karbon Daerah Provinsi DKI Jakarta. Beberapa masukan dari hasil diskusi terkait perubahan iklim diantaranya adalah sebagai berikut:

- Perlu disusun siapa aktor-aktor yang rentan terhadap perubahan iklim kemudian diadakan simulasi bila terjadi bencana, pembentukan wilayah tanggap bencana, memperkuat early warning system
- PKRD Jakarta harus menyusun daftar teknologi ya bisa memitigasi perubahan iklim, sistem perhitungan (basis informasi) yang terukur, sehingga bisa disusun strategi di tahun berikutnya.

Masalah pendanaan dari mana dan kerjasama vertikal dan horizontal antar kota aglomerasi, meningkatkan pendidikan dan informasi pada masyarakat.

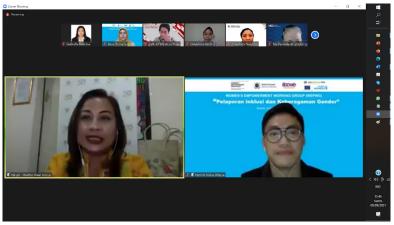


Gambar 2.6 Pembahasan pada sesi breakout room

# 2.6 Multi Stakeholder Dialog (MSD) ke-8 "Reporting Gender Inclusion and Diversity"

Pada tanggal 9 September 2021, ICCTF mengikuti undangan Dialog Multi Pihak mengenai Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender. Secara garis besar, agenda pertemuan ini membahas Pelaporan Inklusi dan Keberagaman Gender. Yono Reksoprodjo selaku Team Member VP WEPs & SME Development, Indonesia Global Compact Network (IGCN) dan VP Corporate Affairs, Sintesa Group dalam sambutannya menyampaikan bahwa, penelitian Morgan Stanley menunjukkan pelibatan perempuan dalam bisnis bisa meningkatkan ekonomi hingga 2,7%, dan untuk mencapai kesetaraan gender, diperlukan aksi bersama yang terukur untuk menentukan langkah strategis menuju kesetaraan gender.

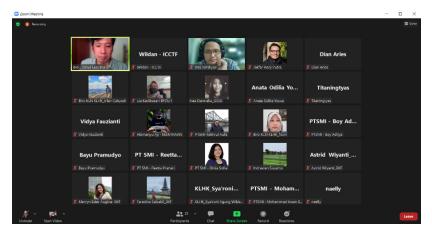
Yuli Adiratna, Direktur Bina Pemeriksaan, dalam pemaparannya kemudian menambahkan bahwa Perempuan punya fungsi ganda dimana selain bekerja terdapat juga fungsi dalam keluarga, yakni merawat keluarga. Maka perlu didukung upaya untuk mewujudkan perlindungan pekerja perempuan dalam hal: Zero Accident, Zero Harasssment, dan Zero Discrimination. Harapannya dengan adanya berbagai kebijakan ini dapat membuat perempuan mampu bekerja, berdaya, dan berkontribusi dalam pembangunan nasional.



Gambar 2.7 Diskusi mengenai pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender

#### 2.7 Pertemuan Teknis Climate Finance Focal Point

Pada tanggal 20 September 2021, ICCTF mengikuti undangan pertemuan teknis Climate Finance Focal Point. Pada pertemuan ini CFFP memperkenalkan platform dalam bentuk website yang didalamnya nanti akan menjadi semacam one stop shopping yang menampilkan seluruh pendanaan - pendanaan yang ada di Indonesia. Berdasarkan hasil diskusi, forum memberikan masukan agar website tersebut juga menyediakan project digest dari proyek-proyek yang ada serta menyertakan hyperlink agar pengakses dapat membuka langsung website terkait proyek tersebut.

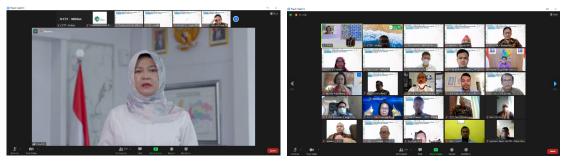


Gambar 2.8 Peserta pertemuan teknis CFFP

### 2.8 Lokakarya Nasional Penyusunan Neraca SDL Indonesia

Pada tanggal 23 September 2021, ICCTF mengikuti undangan Loknas Penyusunan Neraca Sumber Daya Laut (SDL) Indonesia. Dari pertemuan ini, diharapkan seluruh perserta mendapatkan informasi terkini tentang kebijakan dan program pembangunan yang mendukung penyusunan ocean account di Indonesia.

Sebagaimana diketahui, Neraca SDL mendukung penerapan prinsip blue economy. Penerapan Neraca SDL ini juga mendukung UU no. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. Pendekatan digunakan sebagai indikator antara keberlanjutan ekonomi dan ekologi laut. Namun karena neraca SDL adalah hal yang relatif baru dalam bidang Keautan dan Perikanan, ada sejumlah tantangan seperti luasnya wilayah perairan, pendanaan, sumberdaya tenaga dan waktu, serta ketersediaan data. Selain itu bagimana memproyeksikan nilai tersebut secara accountable karena kekayaan tersebut sebagian besar dalam bentuk potensi.



Gambar 2.9 Peserta Lokakarya Nasional Penyusunan Neraca Sumber Daya Laut Indonesia

#### 2.9 Undangan Perayaan Hari Maritim Nasional

Pada tanggal 23 September 2021, ICCTF mengikuti undangan Perayaan Hari Maritim Nasional. Kegiatan pada acara ini meliputi Pemutaran video seni dan budaya, Pemutaran Ucapan Selamat Hari Maritim Nasional ke-57 dari para akademisi dan pimpinan BUMN, serta Pemutaran film Sejarah dan Konsep Hari Maritim Nasional.

Dalam acara ini, Deputi Bidang KSDA Bappenas, Arifin Rudiyanto, mewakili Menteri PPN/Bappenas menyampaikan Pidato pengenai mengenai Arah Pembangunan Maritim Indonesia. Beliau menjelaskan mengenai pentingnya budaya maritim yang kuat untuk perkembangan bahari, mengoptimalkan kelautan, dan perlunya upaya pembangunan dari hulu-hilir. Strategi utamanya adalah dengan cara memperkuat politik maritim dan ekonomi maritim melalui inisiatif strategik seperti NKRI sebagai Poros Maritim Dunia, memperkuat pertahanan maritim di Asia Timur, Penguasaan SDA migas, perikanan, wisata dengan dukungan sarana dan prasarana, serta mengoptimalkan konektivitas kelautan.





Gambar 2.10 Penyampaian pidato oleh para narasumber

# Komunikasi, Outreach dan Kemitraan

Berbagai kegiatan komunikasi dan publikasi yang terkait dengan penanggulangan perubahan iklim bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas mengenai dampak perubahan iklim, sekaligus mensosialisasikan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah, khususnya Bappenas pada satker ICCTF dalam melaksanakan komitmen penurunan emisi Gas Rumah Kaca. Pada tahun 2020 hingga di tahun 2021 ini, kegiatan komunikasi dan publikasi ICCTF juga diarahkan untuk mendukung implementasi Bappenas dalam konteks RPJMN serta monitoring ekosistem pesisir prioritas dan Rehabilitasi Terumbu Karang.

Kegiatan komunikasi ICCTF terbagi atas dua strategi yaitu komunikasi internal dan eksternal. Melalui kegiatan-kegiatan komunikasi ini, eksistensi ICCTF sebagai satusatunya lembaga perwalian dana perubahan iklim yang dimandatkan oleh pemerintah di Indonesia diharapkan dapat lebih dikenal dan diakui, baik oleh pemangku kepentingan di dalam maupun luar negeri. Komunikasi internal kepada seluruh staf ICCTF di semua level untuk meningkatkan manajemen pengetahuan seluruh staf tentang visi-misi ICCTF, menginternalisasi nilai-nilai strategis organisasi, dan membangun solidaritas staf agar terbangun suatu budaya kerja positif di ICCTF.

Sedangkan untuk kegiatan komunikasi eksternal, ICCTF menekankan pada pengenalan visi-misi organisasi, peranan strategis organisasi, serta eksistensi dan fungsi dari pengembangan program-program ICCTF. Selain itu juga menyebarluaskan capaian serta pembelajaran program-program ICCTF yang layak untuk disebarluaskan dan direplikasi di daerah lainnya yang memiliki karakteristik dan permasalahan serupa. Upaya pengenalan dan penjangkauan publik ICCTF dilakukan secara intens dengan pola yang beragam dan target yang variatif. Pola komunikasi yang diterapkan secara umum tidak hanya dalam bentuk sosialisasi dan ekspose program-program ICCTF, tetapi juga dalam bentuk kunjungan ke lokasi program, pameran dan seminar, optimalisasi sosial media dan website ICCTF, serta peningkatan relasi dengan media melalui kegiatan press conference. Komunikasi lebih fokus pada komunikasi eksternal melalui penyelenggaraan kegiatan kick-off, seminar publik, serta pelatihan.

#### 3.1 Media Sosial

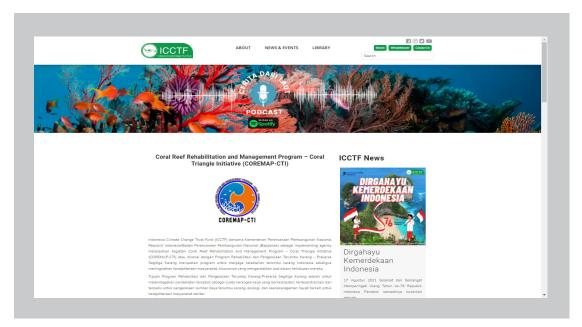
Pada triwulan ketiga 2021 ini ICCTF melakukan strategi pendekatan komunikasi digital karena dinilai lebih interaktif dan real time, melalui pengelolaan media sosial ICCTF yang terdiri atas Facebook (https://www.facebook.com/IndonesiaClimateChangeTrustFund); Twitter (@ICCTF\_ID); Instagram (@icctfofficial); Youtube (ICCTF Official) dan website ICCTF (https://www.icctf.or.id/). ICCTF berupaya untuk selalu mengoptimalkan kanal informasi yang tersedia termasuk media sosial dengan memperbaharui penyebaran konten informasi dan foto - foto kegiatan terkini yang dilakukan oleh ICCTF dan para mitra pelaksana di daerah. Portofolio pengelolaan media sosial ICCTF pada periode triwulan ketiga terangkum pada Gambar dan Tabel di bawah. Adapun laporan traffic dari media sosial yang dikelola oleh ICCTF terangkum dalam infografis berikut.

# JUMLAH PENGIKUT Per 30 September 2021 1035 TWITTER 607

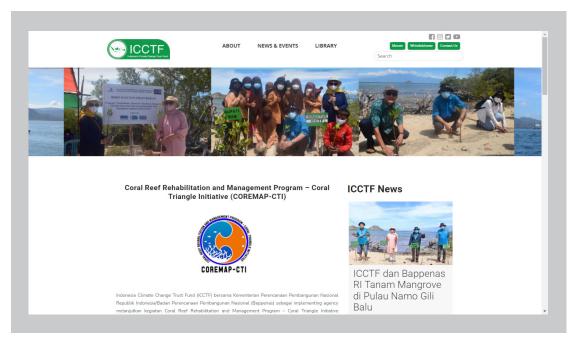
Gambar 3.1.1 Infografis Perkembangan Akun Sosial Media ICCTF: Facebook, Twitter dan Instagram pada kuartal 3 Tahun 2021.



Gambar 3.1.2 Pop-up Ucapan Selamat Hari Raya Idul Adha 1442 H pada Kuartal 3 (Bulan Juli) Tahun 2021.

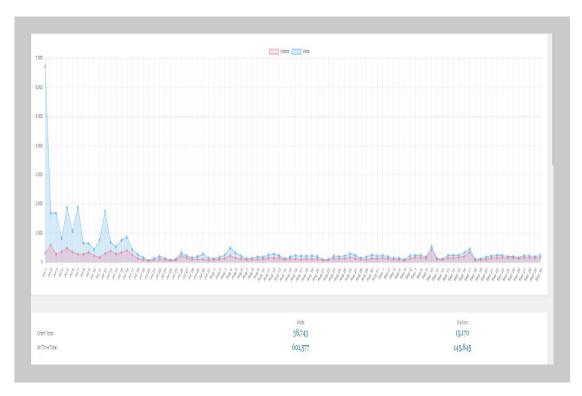


Gambar 3.1.3 Homepage Website ICCTF pada Kuartal 3 (Bulan Agustus) Tahun 2021.



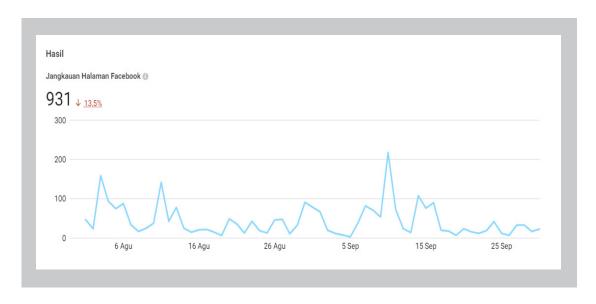
Gambar 3.1.4 Homepage Website ICCTF pada Kuartal 3 (Bulan September) Tahun 2021.

Pada Bulan September 2021 IT dan Communication sedang melakukan perubahan pada system wordpress dengan mengubah builder dari WPBakery menjadi Elementor. Pada masa tersebut website ICCTF sering berada dalam kondisi Maintenance mode.

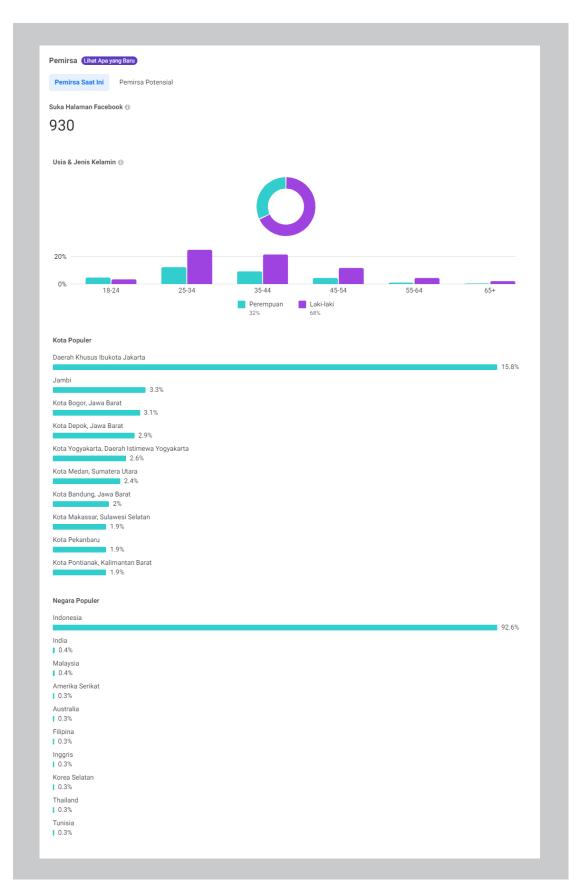


Gambar 3.1.5 Hasil Jangkauan Visit & Visitor Website ICCTF kuartal 3 Tahun 2021.

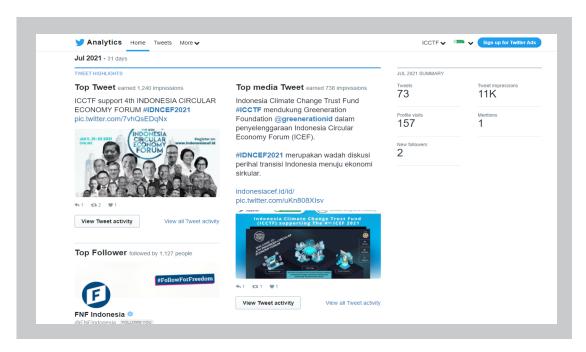
Grafik berwarna merah pada gambar di atas merupakan jumlah visitor website ICCTF, sedangkan yang berwarna biru merupakan jumlah visit.



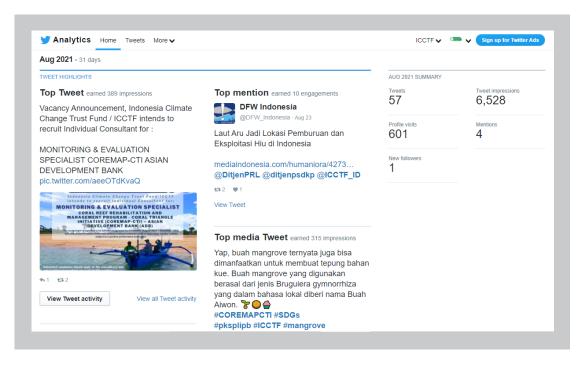
Gambar 3.1.6 Hasil Jangkauan Halaman Facebook Akun Indonesia Climate Change Trust Fund pada Kuartal 3 (Juli, Agustus dan September) Tahun 2021.



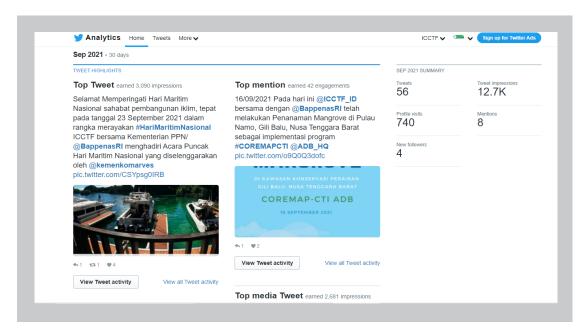
Gambar 3.1.7 Hasil Jangkauan Halaman Facebook Akun Indonesia Climate Change Trust Fund pada Kuartal 3 (Juli, Agustus dan September) Tahun 2021.



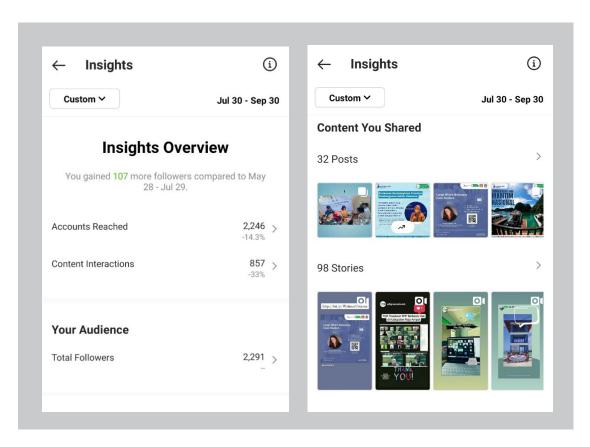
Gambar 3.1.8 Hasil Jangkauan Halaman Twitter Akun Indonesia Climate Change Trust Fund pada Kuartal 3 (Bulan Juli) Tahun 2021.



Gambar 3.1.9 Hasil Jangkauan Halaman Twitter Akun Indonesia Climate Change Trust Fund pada Kuartal 3 (Bulan Agustus) Tahun 2021.



Gambar 3.1.10 Hasil Jangkauan Halaman Twitter Akun Indonesia Climate Change Trust Fund pada Kuartal 3 (Bulan September) Tahun 2021.



Gambar 3.1.11 Hasil Jangkauan Halaman Instagram Akun Indonesia Climate Change Trust Fund pada Kuartal 3 (Juli, Agustus dan September) Tahun 2021.

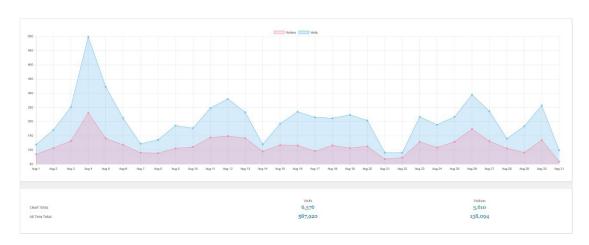
Sementara itu untuk pengelolaan website, traffic merekam sekitar 38.743 kali jumlah kunjungan ke halaman website ICCTF dengan 15.170 total pengunjung dari awal bulan Juli hingga periode akhir September 2021. Pada triwulan ketiga 2021 ini, tim komunikasi juga memperbarui tampilan website ICCTF dengan pembaruan layout pada halaman utama. Beberapa laman dalam website ICCTF pembaruan foto kegiatan, homepage ICCTF, ICCTF History, ICCTF Organization Structure-Organogram, ICCTF Publication, Previous Event, Pop-up Information, ICCTF Video Gallery, dan tentunya ICCTF News. Beberapa judul artikel yang tayang di ICCTF News periode Juli-September 2021, di antaranya dapat terlihat pada Tabel 3.1.1 dibawah ini.

Tabel 3.1.1 Daftar Judul Artikel yang telah tayang di ICCTF News pada Kuartal 3 di bulan Juli, Agustus & September 2021.

NO	TANGGAL	JUDUL ARTIKEL		
1.	2 Juli 2021	PKSPL Inisiasi Kampung IPB University di Raja Ampat.		
2.	2 Juli 2021	Pandemi dan Timbulan Sampah di Gili Trawangan, Meno, dan Air.		
3.	5 Juli 2021	Kampanye Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Lautan.		
4.	8 Juli 2021	Ground Check Lokasi Rencana Pembangunan Pusat Informasi Wisata KKP Nusa Penida.		
5.	26 Juli 2021	"Makan Meting" Pelibatan Ekosistem Lamun dalam Ketahanan Pangan Masyarakat Pesisir.		
6.	26 Juli 2021	Hari Mangrove Sedunia 2021: Cuplikan Rehabilitasi Mangrove di Kawasan Gili Balu.		
7.	29 Juli 2021	Buah Aiwon: Buah Mangrove yang Bisa Dimakan.		
8.	30 Juli 2021	Bappenas: Harmonisasi Kunci Tata Kelola Perikanan.		
9.	03 Agustus 2021	Penanaman Terumbu Karang dengan Teknik Transplantasi Rock Pile oleh Mitra COREMAP-CTI yaitu PKSPL-IPB.		
10.	04 Agustus 2021	Talkshow: Pentingnya Memahami Krisis Iklim oleh Program Manager ICCTF.		
11.	06 Agustus 2021	Pelatihan Komunikasi Bisnis Dasar oleh Mitra COREMAP-CTI yaitu Reef Check Indonesia.		
12.	17 Agustus 2021	Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia 76 Tahun.		
13.	30 Agustus 2021	Koordinasi Kajian Pembayaran Jasa Lingkungan Gili Matra Program COREMAP-CTI ADB.		
14.	6 September 2021	Short Course Supply Chain Perikanan Tuna Longline dan Pencapaian Marine Stewardship Council (MSC) Certification.		
15.	10 September 2021	Peningkatan Kapasitas Masyarakat Gili Matra Melalui Koordinasi Pemangku Kepentingan.		
16.	14 September 2021	Siaran Pers Dialog Penerapan Perikanan Berkelanjutan dan Terukur.		
17.	14 September 2021	Kebijakan Pembangunan Perikanan dan Kelautan Berkelanjutan.		
18.	15 September 2021	Langkah Bappenas dan KKP Genjot Produksi Perikanan RI.		
19.	16 September 2021	Bappenas dan KKP rekomendasikan perikanan berkelanjutan dan terukur.		
20.	16 September 2021	Siaran Pers: COREMAP-CTI ADB Merehabilitasi Mangrove di Gili Balu Sumbawa Barat.		
21.	22 September 2021	ICCTF dan Bappenas RI Tanam Mangrove di Pulau Namo Gili Balu.		
22.	24 September 2021	Perikanan Berkelanjutan Prioritas Pembangunan Sektor Kelautan.		



Gambar 3.1.12 Hasil Jangkauan Halaman Website Akun Indonesia Climate Change Trust Fund pada Kuartal 3 (Bulan: Juli) Tahun 2021.



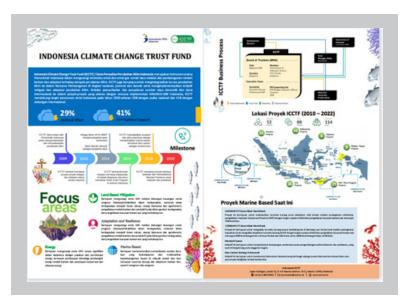
Gambar 3.1.13 Hasil Jangkauan Halaman Website Akun Indonesia Climate Change Trust Fund pada Kuartal 3 (Bulan: Agustus) Tahun 2021.



Gambar 3.1.14 Hasil Jangkauan Halaman Website Akun Indonesia Climate Change Trust Fund pada Kuartal 3 (Bulan: September) Tahun 2021.

#### 3.2 Produksi Media

Pada Kuartal 3 ini Indonesia Climate Change Trust Fund melakukan komunikasi massa secara digital. ICCTF dan mitra pelaksana COREMAP-CTI melakukan produksi media baik secara digital dalam bentuk cetak, visual, serta audio. Produksi media secara digital untuk mendukung kegiatan sekretariat termasuk Design Layout Factsheet COREMAP-CTI World Bank 2020, dan Design Layout Factsheet ICCTF 2021 yang dapat dilihat pada gambar 3.2.1 dan 3.2.2



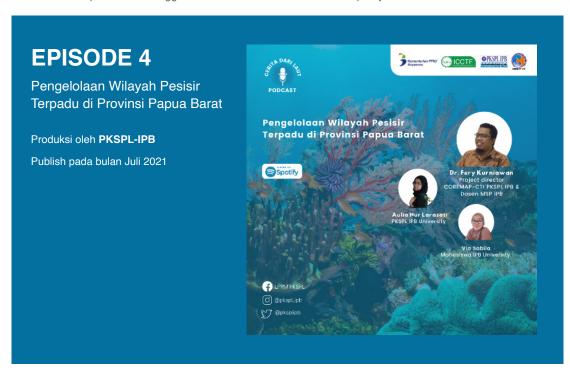
Gambar 3.2.1 Tampilan layout dan publikasi Factsheet ICCTF 2021.



Gambar 3.2.2 Tampilan layout dan publikasi Factsheet COREMAP-CTI World Bank 2020.

Produksi media digital secara audio berupa Podcast yang juga dilakukan untuk mendukung kegiatan kampanye program COREMAP-CTI, produksi ini bekerja sama dengan mitra pelaksana COREMAP-CTI World Bank.

Tabel 3.2.1 Tampilan Daftar Unggahan Podcast "Cerita dari Laut" di Spotify.







Pada kuartal kedua yang lalu, ICCTF telah menyuarakan kampanye untuk merayakan World Oceans Day 2021 dengan mengisi petisi dan menggunakan Twibbon secara online di sosial media yang sejalan dengan program COREMAP-CTI. Pada kuartal ketiga ini dilakukan pengiriman hadiah kepada para partisipan Twibbon berupa Merchandise ICCTF atas dukungannya telah ikut serta pada kegiatan online tersebut. Hadiah telah dikirimkan melalui vendor pengiriman untuk didistribusikan langsung.



Gambar 3.2.3 Kumpulan Twibbon World Oceans Day.

Tabel 3.2.2 Pengiriman Hadiah Kepada Peserta Twibbon World Oceans Day via JNE.

NO.	NAMA	SOSMED	ALAMAT	MERCHANDISE
1	Indah	Instagram	RSS Oesapa Blok M no 13, Kec. Kelapa lima, Kota Kupang KODE POS 85228 NOMER TELPON 087789491501	Pouch + map
2	Andre Saputra	Instagram	Blok E05 Kluster Marwah, BTN Grand Muslim, Terong Tawah, Labuapi, Lombok Barat, NTB, KODE POS 83112 NOMER TELEPON 081353788090	Pouch + map
3	Hermadi Tjarna	Instagram	Kuricang X Blok VD No 17 RT 04 RW 10 Kel. Pondok Ranji, Kec. Ciputat Timur, Tangsel KODE POS15412 NOMER TELPON 081218288067	Pouch + map
4	Vos Bet	Instagram	Cijahe Legacy Blok C no 12. kelurahan: Curug Mekar Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor, KODE POS 16113 NOMER TELPON 081374773337	Pouch + map
5	Mega Natasha Indah	Instagram	Jl. Masjid Cibuluh No. 5 RT 003/003 Bogor Utara, Kota Bogor, kode pos 16151 nomer telepon 088975926975	Pouch + map
7	Nur Jannah	Instagram	Jalan Sidodadi, gang 2 sebelah barat (gang yang tengah), RT.11, RW.07. Desa Pringu, Kec. Bululawang, Kab. Malang, Jawa Timur, KODE POS 65171, NO TELPON 085704049314	Pouch + map
8	Langeng Arief	Instagram	Sawit RT 02 No. 083, Panggungharjo, Sewon, Bantul, DIY, KODE POS 55188 NOMER TELEPON 087738425554	Pouch + map
9	Muhammad Fadhil Haritsah	Instagram	Jalan Senam Indah Nomor 22, RT/RW:01/05, Karanganyar, Indramayu, Jawa Barat. kode pos 45213 nomer telepon 085715204596	Pouch + map
10	Naseer	Instagram	Gang Haji Lamri No 6B RT 06 RW 10 Kel Sukmajaya, Kec Sukmajaya Kota Depok kode pos 16412, nomer telepon 08119100570	Pouch + map
11	Miftahul Huda	Instagram	RT 16 RW 51 Sinduadi Mlati Sleman Yogyakarta, Kode pos 55284, NOMER TELEPON 081320168346	Pouch + map

12	Erta	Instagram	JI. Malaka IV no.31 Rt.04/08 Kel. Malaka Sari Kec. Duren Sawit Jakarta Timur Kode pos : 13460, NOMER TELEPON 081325245305	Pouch + map
13	Firly Rahman	Instagram	Ceger Residence, Jalan SMP 160 nomor 7H, ceger, cipayung. Jakarta Timur Kode pos: 13820, nomer telepon 0857 2159 2234	Pouch + map
14	Fajar Nofriansyah	Instagram	Komplek polri ulujami blok A no 8 Rt 001 Rw 006 kec pesanggrahan kel ulujami jaksel 12250, nomer telepon 081952907666	Pouch + map
15	Nieko OS	Instagram	Binong Permai P 21 No. 26, RT 009/009, Curug, Kab. Tangerang, Banten Kode pos : 15810 , nomer telepon 082123888602	Pouch + map
16	Andy Azka	Instagram	JI cipinang pulo maja no 22 Rt 002 / 011 jatinegara jakarta timur KODE POS 13410, NOMER TELEPON 089680105910	Pouch + map
17	Raafi	Instagram	JI. H. Mugeni III No.01 Rt01/Rw06, Kelurahan Pisangan baru, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta nomer telepon 085814468688	Pouch + map
18	Raphael Kamil	Instagram	Perumahan metland Menteng Jl. Menteng Kartika II blok B3 nomor 14 Rt 15 Rw 07 Kel. Ujung Menteng, Kec.Cakung, Jakarta Timur 13690, no.tlp 081290370307	Pouch + map
19	Rayhard Edward	Instagram	Perumahan metland Menteng Jl. Menteng Kartika II blok B3 nomor 14 Rt 15 Rw 07 Kel. Ujung Menteng, Kec.Cakung, Jakarta Timur 13690, no.tlp 0821-1912-1249	Pouch + map
20	Nur Dyana	Instagram	Reni Jaya, Jl. Bratasena II Blok BB 1 No. 6, RT 003/014, Pondok Benda, Pamulang Kode Pos:15416	Pouch + map
21	Aris Budi Arto	Twitter	Taman Pulo Gebang, Jl. Gebang Intan III, Blok C2/15, Rt 007/013, Cakung Timur, Cakung, Jakarta Timur. Kode Pos: 13910 NOMER TELEPON 082125232787	Pouch + map

#### 3.3 Media Monitoring

Pada Kuartal 3 ini Indonesia Climate Change Trust Fund melakukan Media Monitoring terhadap kegiatan yang melibatkan media massa baik cetak maupun online. Pada September 2021 ini Indonesia Climate Change Trust Fund melakukan Media Monitoring terhadap kegiatan yang melibatkan media massa di antaranya:

#### 1. Dialog Penerapan Perikanan Berkelanjutan dan Terukur di Jakarta

# 1) Siaran Pers Dialog Penerapan Perikanan Berkelanjutan dan Terukur -Jakarta

Kondisi sumber daya perikanan saat ini tidak sama dengan kondisi sumber daya perikanan satu dekade yang lalu, apalagi tiga dekade lalu, dimana sumber daya perikanan masih dalam status melimpah. Sekarang ini, dapat dikatakan sumber daya perikanan di setiap Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Indonesia, terutama yang dekat dengan pantai/pesisir (<12 mil), mengalami degradasi karena tekanan penangkapan yang tinggi. Berkurangnya sumber daya perikanan ini akan mempengaruhi masyarakat pesisir terutama para nelayan, yang mayoritas adalah nelayan kecil (5-10 GT) dengan wilayah penangkapan di sekitar pantai. Kelompok masyarakat pesisir ini merupakan masyarakat yang rentan terhadap kemiskinan ditambah dengan permasalahan lainnya seperti isu pendidikan, kesehatan seperti isu stunting, akses terhadap usaha, dan lain-lain. Di tambah adanya kondisi pandemi COVID-19 yang berkepanjangan semakin memperparah kehidupan masyarakat pesisir, nelayan pada khususnya.

Kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir ini menjadi salah satu perhatian utama pemerintah selain petani dan masyarakat rentan lainnya. Kebijakan apapun yang disusun dalam sektor perikanan ini harus ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan rumah tangga perikanan. Oleh karenanya, kebijakan yang berorientasi pengelolaan yang berkelanjutan baik dari aspek ekonomi, sosial dan lingkungan berbasis science-based policy sangat diperlukan untuk menuju pengelolaan yang transparan, akuntabel dan mengakomodasi kompleksitas serta dinamika sumber daya dan usaha perikanan. Dalam konteks inilah Bappenas mendorong Penerapan Perikanan Berkelanjutan menjadi kebijakan perencanaan pembangunan disektor Kelautan dan Perikanan.

"Bappenas telah menjadikan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) sebagai basis dalam pembangunan perikanan berkelanjutan yang merupakan program prioritas dalam RPJMN 2020-2024", ujar Direktur Kelautan dan Perikanan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Sri Yanti, dalam keterangan tertulis pada Dialog Penerapan Perikanan Berkelanjutan dan Terukur di Jakarta, Selasa (14/09/2021).

la mengatakan, untuk menunjang perencanaan pembangunan sektor Kelautan dan Perikanan yang berbasis ilmu pengetahuan (Science based policy) , Bappenas melakukan beberapa kajian ilmiah seperti studi bioekonomi perikanan udang di Laut Arafura (WPP 718), studi perikanan alat tangkap cantrang di perairan Utara Jawa meliputi Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah sampai Jawa Timur (WPP 712). Salah satu studi lainnya yang tidak kalah penting dan g sedang mulai kami rintis, yaitu studi supply chain perikanan Tuna di WPP 713 dan 573. Harapannya berbagai kajian ini dapat menjadi model percontohan dalam menyusun kebijakan sektor kelautan dan perikanan untuk berbagai jenis komoditas lainnya melalui pengelolaan yang transparan dan berbasis sains untuk mewujudkan perikanan berkelanjutan.

Sejalan dengan hal ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga telah mengeluarkan konsep penangkapan ikan terukur dalam mengelola sumber daya perikanan guna menjaga ekosistem laut dan pesisir yang sehat dan produktif, serta menjadikan Indonesia lebih makmur dari sisi ekonomi maupun sosial.

"Kegiatan ekonomi harus seimbang dengan ekologinya, sesuai arahan Pak Menteri Kelautan dan Perikanan. Di mana setiap aktivitas di ruang laut, harus memperhatikan kesehatan lautnya," ujar Dirjen Perikanan Tangkap KKP, Muhammad Zaini.

#### 2) Hasil Studi Perikanan Bappenas

Dengan menggunakan pendekatan simulasi dinamika berbasis data hasil tangkapan dan parameter ekonomi lainnya, analisis bioekonomi perikanan udang di Laut Arafura menunjukkan bahwa potensi ekonomi yang tinggi dapat dicapai dengan pengendalian input, dalam hal ini jumlah kapal optimal, yang diijinkan. Dari dua jenis tipe alat penangkapan udang yang dijadikan sampel mewakili mayoritas aramada yang beroperasi, yakni armada dengan target udang putih dan udang dogol (banana prawn) serta target udang windu dan udang dogol (tiger prawn) diperkirakan perikanan ini memperoleh manfaat ekonomi per kapal antara Rp. 25 – 50 milyar per tahun. Untuk mencapai pemanfaatan ekonomi yang optimal ini diperlukan alokasi jumlah kapal yang optimal dengan kisaran 50 – 70 kapal dan secara gradual dievaluasi sesuai dengan kapasitas biologi udang di Laut Arafura. Dengan alokasi optimal sebesar itu, hasil simulasi menunjukkan bahwa potensi PNBP yang diperoleh per kapal akan mencapai Rp. 400 – 700 juta per tahun.

"Bappenas juga ingin mendorong peningkatan Penerimaan Nasional Bukan Pajak (PNBP) dari sektor Kelautan dan Perikanan, dari studi Bioekonomi ini juga kita bisa mensimulasikan berapa potensi yang bisa diterima negara", ujar Sri Yanti.

Pendekatan bioekonomi ini juga sedang dilakukan untuk perikanan cantrang, ditengah kebijakan penggantian alat tangkap cantrang yang didisinyalir memberikan nilai ekonomi yang tinggi namun dapat merusak ekosistem laut dan mengancam keberlanjutan sumberdaya perikanan karena tingkat selektifitasnya yang rendah. Studi ini akan dilakukan secara mendalam tentang bagaimana pengelolaan yang baik untuk perikanan cantrang agar tidak menimbulkan kerusakan ekosistem, namun juga tidak menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang luas. Sebagai tools, bioekonomi ini menjadi instrumen yang terbaik untuk mengukur kondisi stok ikan dan manfaat ekonomi optimum yg dapat diperoleh. Harapannya dari studi ini dapat disimpulkan apakah introduksi kebijakan baru tersebut dapat diterapkan dengan memberlakukan aturan pengelolaan dan pembatasan jumlah kapal yang berpegang pada keseimbangan ekologi dan ekonomi, yakni usulan jumlah kapal optimum (optimum effort). Selanjutnya, kajian bioekonomi ini direncanakan akan dilakukan untuk menunjang studi supply chain perikanan tuna, khususnya Tuna Longline yang akan mulai dilaksanakan pada akhir 2021.

Berbagai kajian bioekonomi ini masih terus akan disempurnakan seiring dengan ketersediaan data yang lebih komprehensif. Namun demikian, studi ini dapat menjadi acuan awal untuk pengelolaan perikanan berkelanjutan yang berbasis kaidah-kaidah ilmiah yang transparan dan akuntabel. Harapannya perikanan berkelanjutan yang telah menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional ini dapat terwujud dimulai dari beberapa jenis komoditas utama di beberapa WPP tertentu sesuai karakteristiknya hingga mencakup jenis lainnya hingga ke seluruh penjuru Indonesia.

## 3) Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur KKP

Langkah pertama dalam menerapkan konsep Penangkapan Ikan Terukur, yakni terlebih duhulu mengetahui kesehatan stok ikan di setiap WPP. Kemudian diatur jumlah ikan yang boleh ditangkap, jumlah kapal yang menangkap, termasuk alat tangkapnya.

Dirjen Perikanan Tangkap KKP, Muhammad Zaini menambahkan, penerapan konsep penangkapan ikan terukur bertujuan untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan di Indonesia. Sebab nantinya pendaratan ikan tidak lagi berpusat di Pulau Jawa melainkan di pelabuhanpelabuhan yang sudah ditentukan. Sehingga masyarakat setempat di luar Pulau Jawa akan dapat memperoleh nilai tambah dari hasil penangkapan beserta proses industrialisasi di hilir.

Saat ini KKP tengah menyiapkan infrastruktur pendukung termasuk ekosistem industri untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk infrastruktur skema yang diusulkan adalah melalui perbaikan fasilitas pelabuhan yang sudah ada dan membangun pelabuhan baru. "Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 akan menjadi salah satu terjemahan dari penangkapan ikan terukur dalam bentuk kebijakan", ujar Dirjen Zaini. Permen tersebut tidak hanya untuk kepentingan ekologi dan ekonomi, tapi juga menekan terjadinya konflik sosial di tengah masyarakat hingga menjaga kedaulatan negara. Salah satu poin penting Permen ini adalah mengganti dan memodifikasi beberapa jenis alat tangkap ikan yang berpotensi memberi dampak negatif terhadap sumberdaya perikanan berserta lingkungan perairannya.

Hasil rekomendasi studi bioekonomi yang dilakukan oleh Bappenas di WPP 718 Laut Aru-Arafura sangat membantu dalam menerapkan kebijakan Perikanan Terukur oleh KKP menuju pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Studi ini dapat menjadi model untuk pengelolaan beberapa jenis komoditas utama lainnya di 11 WPP sehingga memberikan kepastian berusaha di bidang perikanan dengan tidak mengganggu sumber daya perikanan oleh alat tangkap tertentu seperti jaring hela berkantong. Dengan demikian kekhawatiran sumber daya perikanan akan habis dapat dicegah. Hasil studi inipun mendukung kebijakan pembayaran pungutan hasil perikanan (PHP) dari sebelum produksi menjjadi pasca produksi sebagai insentif bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan untuk berproduksi lebih efisien.

"Kami sangat menyambut baik bahwa rekomendasi studi bioekonomi perikanan yang dihasilkan Bappenas dapat digunakan sebagai alat (tool) dalam pelaksanaan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur yang diinisiasi KKP", ujar Sri Yanti.

"KKP juga menyambut baik dan akan memanfaatkan hasil kajian bioekonomi dari Bappenas tersebut guna mewujudkan Penerapan Perikanan Berkelanjutan dan Terukur untuk dapat mewujudkan target PNBP Perikanan di 11 WPP mencapai Rp. 12 Triliun pada 2024", tegas Zaini.

Tabel 3.3.1. Daftar Unggahan Publikasi Media Pada Kegiatan "Dialog Penerapan Perikanan Berkelanjutan dan Terukur di Jakarta".

No	Nama Media	Judul Berita	Link	Tgl Terbit
1.	Tempo	Perikanan Berkelanjutan Priotitas Pembangunan Sektor Kelautan	https://nasional.tempo.co/ read/1506122/perikanan- berkelanjutan-prioritas- pembangunan-sektor-kelautan	14 September 2021
2.	Indopos.co.id	WPP Dijadikan Basis Pembangunan Perikanan berkelanjutan	https://indoposco.id/wpp-dijadikan- basis-pembangunan-perikanan- berkelanjutan/	14 September 2021
3.	Setiafakta.com	Bappenas dan KKP Rekomendasikan Perikanan Berkelanjutan dan Terukur	https://www.setiafakta.com/ekono- mi/pr-1161163462/bappenas-dan- kkp-rekomendasikan-perikanan- berkelanjutan-dan-terukur	14 September 2021
4.	Pikiranrakyat.com	Tingkatkan Produksi Perikanan, Bappenas-KKP Rekomendasikan Perikanan Berkelanjutan dan Terukur	https://seputarcibubur. pikiran-rakyat.com/nasional/ pr-1782595725/tingkatkan- produksi-perikanan-bappenas- dan-kkp-rekomendasikan- perikanan-berkelanjutan-dan- terukur	14 September 2021
5.	industry.co.id	Bappenas dan KKP Rekomendasikan Perikanan Berkelanjutan dan Terukur	https://www.industry.co.id/ read/93218/bappenas-dan-kkp- rekomendasikan-perikanan- berkelanjutan-dan-terukur	14 September 2021
6.	tribunnews.com	Langkah Bappenas dan KKP Wujudkan Penerapan Perikanan Berkelanjutan dan Terukur	https://www.tribunnews. com/nasional/2021/09/14/ langkah-bappenas-dan-kkp- wujudkan-penerapan-perikanan- berkelanjutan-dan-terukur	14 September 2021
7.	Pokokberita.com	Bappenas dan KKP Rekomendasikan Perikanan Berkelanjutan dan Terukur	https://www.pokokberita.com/ bappenas-dan-kkp-rekomendasi- kan-perikanan-berkelanjutan-dan- terukur	14 September 2021
8.	Antaranews.com	Bappenas dan KKP Rekomendasikan Perikanan Berkelanjutan dan Terukur	https://www.antaranews.com/ berita/2392781/bappenas-dan- kkp-rekomendasikan-perikanan- berkelanjutan-dan-terukur	14 September 2021
9.	Kompas.id	Sistem Kontrak untuk Industri Perikanan Diberlakukan pada 2022	https://www.kompas.id/baca/ ekonomi/2021/09/15/sistem- kontrak-untuk-industri-perikanan- diberlakukan-di-2022/	14 September 2021
10.	Fortuneidn.com	Upaya Pemerintah Wujudkan Sektor Perikanan Berkelanjutan	https://www.fortuneidn.com/ news/bayu/upaya-pemerintah- wujudkan-sektor-perikanan- berkelanjutan	14 September 2021

11.	Viva.vo.id	Langkah Bappenas dan KKP	https://www.viva.co.id/	14
		Genjot Produksi Perikanan RI	berita/bisnis/1404499-	September
			langkah-bappenas-dan-kkp-	2021
			genjot-produksi-perikanan-	
			ri?utm_source=dlvr. it&utm_medium=twitter	
10	Cian avals and	Dennence den KKD	_	14
12.	Siapgrak.com	Bappenas dan KKP Rekomendasikan Perikanan	https://siapgrak.com/artikel/kxm86q	September
		Berkelanjutan dan Terukur	Killiooq	2021
13.	pariwisataindonesia.	Tingkatkan Produksi	https://pariwisataindonesia.	14
13.	id	Perikanan, Bappenas-KKP	id/berita/tingkatkan-produksi-	September
	Id	Rekomendasikan Perikanan	bappenas-kkp-rekomendasikan-	2021
		Berkelanjutan dan Terukur	perikanan-berkelanjutan-dan-	2021
		,	teruku/	
14	Koran Indoposco	WPP Jadi Basis Pembangunan		
		Perikanan Berkelanjutan  WPP Jadi Basis Pembangunan Perikanan  Germanya Basis Pembangunan Pembangunan  Germanya Basis Pembangunan Pembangunan  Germanya Basis Pembangunan Pembangunan  Germanya Basis Pembangunan  Germanya Basis Pembangunan  Germanya Basis Pemban		Machine Control of the Control of th

### 2. Penanaman Mangrove, Monitoring & Evaluasi COREMAP-CTI ADB di Gili Balu.

# 1) Siaran Pers: COREMAP-CTI ADB Merehabilitasi Mangrove di Gili Balu Sumbawa Barat.

Gili Balu - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Bappenas, Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCT) bersama Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, PT Sucofindo, dan PT. Cakra Buana Aghna beserta para mitra melaksanakan kegiatan penanaman mangrove di Pulau Namo, Gili Balu, Nusa Tenggara Barat pada tanggal 16 September 2021. Pelaksanaan rehabilitasi mangrove ini merupakan implementasi dari program Coral Reef Rehabilitation and Management Program - Coral Triangle Initiative (COREMAP-CTI) dengan dana hibah Asian Development Bank.

Kegiatan Penanaman Mangrove di Kawasan Konservasi Perairan Gili Balu, NTB ini diawali dengan Pembukaan dan Arahan oleh Dr. Ir. Sri Yanti JS, MPM selaku Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian PPN/ Bappenas. Kemudian dilanjutkan dengan Peresmian Penanaman Mangrove oleh Dr. Tonny Wagey Direktur Eksekutif Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF). Penanaman Mangrove di Pulau Namo, Gili Balu Nusa Tenggara Barat dilakukan secara simbolis oleh Bupati Sumbawa Barat bersama dengan Direktur Kelautan dan Perikanan Bappenas, Direktur Eksekutif ICCTF, Direktur Sucofindo serta stakeholder setempat.Dr. Tonny Wagey selaku Direktur Eksekutif ICCTF melakukan Penanaman Mangrove di Pulau Namo, Gili Balu Nusa Tenggara

Barat bersama para siswa dan siswi setempat sebagai bentuk motivasi guna mengajarkan peran penting Konservasi Sumber Daya Alam kepada para generasi muda.

Kawasan Perairan Gili Balu memiliki potensi ekosistem pesisir yang cukup lengkap, baik dari ekosistem terumbu karang, ekosistem lamun, ekosistem mangrove dan ekosistem pantai dan bebatuannya. Total luas area ekosistem mangrove di Kawasan Gili Balu adalah 568,2 Hektar, yang terdapat di Pulau Kalong, Pulau Namo, Pulau Kenawa, Pulau Paserang, Pulau Kambing dan Pulau Belang.

Tiga ekosistem di wilayah pesisir yaitu ekosistem terumbu karang, ekosistem mangrove dan ekosistem padang lamun sangat penting peranannya, tidak saja dari sisi lingkungan hidup, tapi juga penting bagi perekonomian masyarakat, terutama nelayan dan pembudidaya ikan. Selain itu, juga menjadi sumber plasma nutfah, nursery ground, dari sisi fisik sebagai break water dan dari segi sosial budaya ekosistem pesisir juga merupakan bagian dari kerarifan lokal yang tumbuh berkembang dan dijaga oleh masyarakat pesisir. Oleh karena itu, ekosistem tersebut harus dijaga bersama.

"Kesadaran masyarakat dalam mengoptimalkan fungsi dan keberadaan ekosistem mangrove masih perlu ditingkatkan. Untuk itu perlu upaya rehabilitasi salah satunya melalui penanaman mangrove. Upaya dari COREMAP-CTI ini tentu saja perlu didukung dari pemerintah dan masyarakat Sumbawa Barat, mulai dari kesiapan lahan, keberlanjutan pengelolaan atas infrastruktur atau sarana dan prasaran, keberlanjutan untuk menjaga ekosistem, dan kegiatan lain di daerah yang saling melengkapi," pesan Dr. Ir. Sri Yanti JS, MPM selaku Direktur Kelautan dan Perikanan Bappenas dalam kegiatan rehabilitasi mangrove di Pulau Namo.

Hutan mangrove atau hutan bakau di Gili Balu memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat terutama masyarakat pesisir dan pulaupulai kecil, antara lain sebagai sumber mata pencaharian bagi masyarakat, karena menghasilkan berbagai produk bernilai ekonomi terutama sebagai penghasil produk kayu, ikan, kerang, kepiting dan lain-lain serta dapat dijadikan sebagai kawasan wisata alam maupun untuk pendidikan. Di beberapa daerah, peranan ini berkurang, akibat kerusakan ekosistem mangrove dan menurunnya kualitas lingkungan pesisir. Mangrove merupakan salah satu bentuk ekosistem hutan yang unik dan khas serta terdapat pada daerah pasang surut di wilayah pesisir, pantai, dan atau pulau-pulau kecil dan merupakan potensi sumber daya alam yang sangat potensial. Hutan mangrove memiliki nilai ekonomi dan ekologis yang sangat tinggi, tetapi sangat rentan terhadap kerusakan apabila kurang bijaksana dalam mengelola dan melestarikannya.

Hasil survei awal oleh PT Sucofindo yang dilakukan pada Maret 2021 menunjukkan bahwa kondisi mangrove di Gili Balu relatif bagus, walaupun ada beberapa yang perlu direstorasi, agar lebih baik dan dapat dimanfaatkan dengan lebih optimal. Kerjasama dan peran serta masyarakat yang lebih tinggi dan maksimal sangat dibutuhkan. Jumlah bibit mangrove yang akan ditanam sekitar 25.000. Persiapan bibit, penanaman dan pemeliharaan melibatkan masyarakat setempat. Sebelumnya PT. Sucofindo (Persero) yang menjadi pelaksana Paket 6 COREMAP-CTI dana hibah ADB telah melakukan pelatihan mengenai Mangrove selama 2 hari, bekerjasama dengan Yayasan Olah Hidup (LOH) Sumbawa, yang diikuti oleh perwakilan masyarakat dari 4 desa, yaitu Desa Poto Tano, Senayan, Tuananga, dan Kiantar. Peranan unsur masyarakat termasuk perempuan juga didorong dalam kegiatan COREMAP-CTI ini dengan melibatkan sebanyak 30% perempuan dalam pelatihan. Setelah pelatihan dan praktek, masyarakat diberdayakan untuk melakukan pembibitan dan penanaman, kemudian dilanjutkan dengan pemeliharaan. Puncak acara penanaman dilaksanakan pada tanggal 16 September 2021 di Pulau Namo dan Pulau Kalong.

Puncak acara penanaman mangrove di Pulau Namo juga dihadiri oleh Bupati Sumbawa Barat Dr. Ir. H. W Musyafirin, M.M. Beliau menyampaikan, bahwa walaupun kewenangan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil tidak lagi menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, akan tetapi pendampingan dan pembinaan tetap dilakukan sesuai kewenangan yang ada, karena masyarakat pesisir menjadi masyarakatnya Kabupatan Sumbawa Barat. Beliau berharap masyarakat menjaga ekosistem dengan baik.

Selain Mangrove, diharapkan juga memperhatikan Padang Lamun dan ekosistem terumbu karang yang juga sangat potensial. "Indonesia memiliki luas kawasan mangrove terbesar di dunia, dimana ekosistem mangrove dan lamun ini memiliki kemampuan menyerap karbon dari gas rumah kaca (blue carbon) yang berperan sangat penting dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Menjaga ekosistem karbon biru ini juga sejalan dengan strategi yang sedang disusun oleh ICCTF yakni Indonesia Blue Carbon Strategy Framework (IBCSF)," ujar Direktur Eksekutif ICCTF, Dr. Tonny Wagey.

Tabel 3.3.2. Daftar Unggahan Publikasi Media Pada Kegiatan Penanaman Mangrove dan Monitoring Evaluasi COREMAP-CTI ADB di Gili Balu.

No	Nama Media	Judul Berita	Link	Tgl Tebit
1.	Siarpost.com	Lestarikan Lingkungan Perairan Gili Balu Sumbawa Barat ICCTF dan Bappenas RI Tanam Mangrove	http://siarpost.com/2021/09/17/ lestarikan-lingkungan-perairan- gili-balu-sumbawa-barat-icctf-dan- bappenas-ri-tanam-mangrove/	17 September 2021
2.	Siarpost.com	Potensi Melimpah Gili Balu Sumbawa Barat Jadi Salah Satu Kawasan Konservasi Perairan	http://siarpost.com/2021/09/17/ potensi-melimpah-gili-balu- sumbawa-barat-jadi-salah-satu- kawasan-konservasi-perairan/	17 September 2021
3.	Kobarksb.com	Sumbawa Barat Miliki 16 Pulau Kecil Bupati Mulai Hijaukan 8 Pulau	https://www.kobarksb. com/2021/09/17/sumbawa-barat- miliki-16-pulau-pulau-kecil-bupati- mulai-hijaukan-8-pulau/	17 September 2021
4.	Infopublik.com	ICCTF dan Bappenas RI Tanam Mangrove di Pulau Namo Gili Balu	https://infopublik.id/kategori/ nusantara/565256/icctf-dan- bappenas-ri-tanam-mangrove-di- pulau-namo-gili-balu	17 September 2021
5.	Infopublik.com	Potensi Pariwisata Gili Balu Sumbawa Barat Melimpah	https://infopublik.id/kategori/ nusantara/565255/potensi- pariwisata-gili-balu-sumbawa- barat-melimpah	17 September 2021
6.	Idntimes.com	Merawat Keindahan 8 Pulau di Gili Balu Sumbawa Barat	https://ntb.idntimes.com/travel/ destination/ahmad-viqi/merawat- keindahan-8-pulau-di-gili-balu- sumbawa-barat	23 September 2021
7.	Harian Radar Sumbawa	Bappenas dan ICCTF Tanam Mangrove di Gili Namo	SUMBAWA BARAT  Brain Frankers  Bappenas dan ICCT Tanam Mangrove di Gili Namo  Bappin KSB  Berlian Appesia  Mangrove di Gili Namo  Britan Appesia  Mangrove di Gili Namo  Man	





### 1. Laporan Audit Tahun 2021

Sebagai bentuk pertanggungjawaban yang menganut prinsip transparansi dan akuntabel, Laporan Keuangan ICCTF setiap tahunnya diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Negara. Pada tahun 2021 ini BPK sudah melakukan audit Laporan Keuangan Satuan Kerja Majelis Wali Amanat ICCTF Tahun Anggaran 2020 sebagai bagian dari Laporan Keuangan Konsolidasi Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Bappenas dan hasil opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sedangkan audit untuk kegiatan Hibah Asian Development Bank (ADB) dan World Bank (WB) Tahun Anggaran 2020 juga diaudit oleh BPK Audit Khusus di tahun ini dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

### 2. Informasi Keuangan Periode Juli-September 2021

Sebagai satu-satunya Lembaga Dana Perwalian Perubahan Iklim Nasional di Indonesia, ICCTF selalu memegang prinsip akuntabiltas dan transparansi dalam setiap kegiatan terkait keuangan sehingga, prinsip tata kelola organisasi dapat tercapai.

Bagian Keuangan ICCTF secara rutin mengadministrasikan, menyiapkan dan melaporkan semua kegiatan pelaksanaan secara tertib dan sesuai dengan kaidah tata kelola yang baik. Pada tahun 2021 ICCTF mengelola dana Rupiah Murni APBN sebesar 6,59M dan dana Hibah Luar Negeri (Hibah Terencana) sebesar 44,82M sehingga total dana yang dikelola ICCTF Tahun Anggaran 2021 adalah 51,41M. Capaian pada kuartal 3 tahun 2021 adalah sebesar 34,01M yaitu 66,29% dari total dana yang dikelola.

Tabel Rincian Penyerapan Dana sampai dengan bulan September tahun 2021

Sumber Dana	Anggaran	Penyerapan		Sisa Anggaran
APBN - ICCTF	6.592.015.000	4.299.662.211	65%	2.292.352.789
Hibah – WorldBank (Reksus)	25.650.000.000	24.790.936.651	96%	859.063.349
Hibah – Asian Development Bank (Reksus)	19.170.000.000	4.991.831.185	26%	14.178.168.815
TOTAL	51.412.015.000	34.082.430.047	66%	17.329.584.953

### 3. Operasional / Kesekretariatan

Sampai pada Triwulan 3, jumlah tenaga professional yang mendukung kegiatan ICCTF berjumlah 28 Orang yang terdiri dari 15 konsultan dengan penugasan time base, 2 konsultan output base, 1 konsultan intermittent dan 10 tenaga jasa lainnya. Penyebaran gender terdiri dari 19 jenis kelamin laki-laki dan 10 jenis kelamin perempuan sebagai berikut:

No	Nama	Posisi	Pendanaan
1	Gabriel A. Wagey	Executive Director	Rupiah Murni (APBN)
2	Mega Gusti Rama	Finance and Operation Manager	Rupiah Murni (APBN)
3	Anggri Heravanthi	Accounting Specialist	Rupiah Murni (APBN)
4	SiwiHandinah	General Adm dan HR Coordinator	Rupiah Murni (APBN)
5	Gabrella Sabrina	Communication and Digital Off.	Rupiah Murni (APBN)
6	Muhammad Wildan Kautsar	Knowledge Management Officer	Rupiah Murni (APBN)
7	Joshua Arianto M	Program Officer	Rupiah Murni (APBN)
8	Affalia Maydi Hatika	Communication Assistant	Rupiah Murni (APBN)
10	Deta Kurnia Soundra	IT Officer	Rupiah Murni (APBN)
11	Eko Wahyudi	Finance and Administration Officer COREMAP-CTI WB	Rupiah Murni (APBN)
12	Uli Natul Khasanah	Adminstration Officer	Rupiah Murni (APBN)
13	Agus Salim	Logistic and General Support	Rupiah Murni (APBN)
14	Sugihartono	Office Assistant	Rupiah Murni (APBN)
15	Muhamad Nuryanto	Pengemudi	Rupiah Murni (APBN)
16	Nur Jali	Procurement Officer	Rupiah Murni (APBN)
17	Andrian Firmansyah	Tenaga Operasional Perkantoran	Rupiah Murni (APBN)
18	Februanty Suyatiningsih	Monev Specialist COREMAP CTI WB	Hibah LN World Bank
19	Dwipayana	ESSF COREMAP CTI WB	Hibah LN World Bank
20	Irvan Ahmad Fikri	Program Officer COREMAP CTI WB	Hibah LN World Bank
21	Alya Prima Syanti	Financial Management Specialist COREMAP CTI ADB	Hibah LN ADB
22	Leonas Chatim	Project Team Leader COREMAP-CTI ADB	Hibah LN ADB
23	Nia Kania	Administration Officer COREMAP CTI ADB	Hibah LN ADB
24	Dimas Darmawan	Procurement Specialist COREMAP CTI ADB	Hibah LN ADB

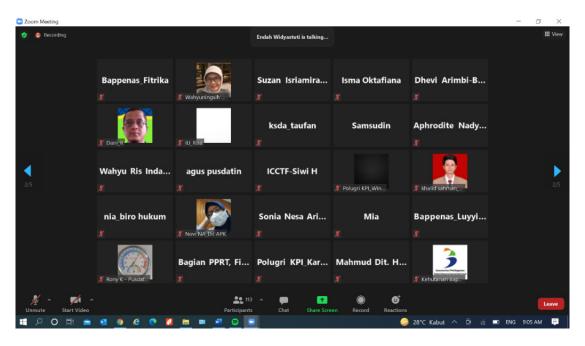
Pada awal bulan September 2021, konsultan Program Manager ICCTF mengundurkan diri dari penugasannya sebagi Program Manager di ICCTF.

Dalam upaya pemenuhan kebutuhan staf, sampai kuartal 3 ini masih terdapat 1 posisi yang masih dalam proses rekrutmen/pengadaa yaitu konsultan Monev Specialist COREMAP-CTI ADB. Proses pengadaan sudah sampai pada tahap penandatanganan kontrak. Sesuai dengan persetujuan, konsultan Monev Specialist Coremap-CTI ADB akan mulai aktif pada pertengahan bulan Oktober 2021.

Kegiatan-kegiatan Sekretariat ICCTF yang dilaksanakan sepanjang triwulan 3 yaitu:

# 1. Bimbingan Teknis Pengisian Data untuk Pelaksanaan Vaksin Covid-19 bagi keluarga pegawai Bappenas.

Pada tanggal 2 Juli 2021 telah dilakukan Bimtek Pengisian Data untuk Pelaksanaan Vaksin Covid-19 bagi keluarga pegawai Bappenas. Bimtek dilaksanakan setelah mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh Biro SDM Bappenas yang kemudian disampaikan kepada seluruh staff ICCTF. Bimtek berisi sosialisai rencana pelaksanaan vaksin bagi seluruh keluarga pegawai Bappenas, jadwal vaksin, serta sosialisasi cara pengisian form yang berisi informasi NIK, Riwayat penyakit, alamat serta kontak telepon peserta vaksin.



Gambar 1. Diskusi bimbingan teknis

# 2. Rapat Petunjuk Teknis Koreksi Penyusutan Aset Tetap Tidak Susut pada Satker MWA ICCTF TA 2020 tanggal 9 Juli 2021.

Rapat diinisiasi oleh ICCTF dengan mengundang narasumber dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Rapat diadakan untuk menindaklanjuti Surat Anggota II BPK RI Nomor: 46/S/IV-XV/05/2021 tanggal 31 Mei 2021 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 dan Surat dari Menteri Keuangan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Republik Indonesia Nomor: S-281/MK.6/2021 tanggal 30 Juni 2021 tentang Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020.

Tujuan diadakannya rapat adalah agar pelaksanaan kegiatan administrasi pada Satker ICCTF dapat dilaksanakan secara akuntabel.

### 3. Rapat persiapan refocusing anggaran

Tanggal 23 Juli 2021 diadakan rapat persiapan refocusing anggaran. Rapat diadakan oleh Biro Perencanaan Organisasi dan Tata lakasana Kementerian PPN/Bappenas. Rapat membahas perihal adanya rencana pemotongan anggaran di Kementerian PPN/Bappenas. Pada rapat ini, ICCTF diminta untuk mengajukan besaran usulan anggaran untuk refocusing. ICCTF telah melakukan exercise terkait pengurangan pagu anggaran pada Satker ICCTF. Berdasar exercise tersebut, besaran pemotongan untuk refocusing maksimum diusulkan sebesar Rp400.000.000,-. Kegiatan utama satker ICCTF adalah pendampingan terhadap proyek COREMAP-CTI, yang akan berakhir di Juni 2022 (WB) dan Desember 2022 (ADB). Untuk itu, tahun 2021 merupakan tahun penting bagi ICCTF untuk melakukan pendampingan untuk memastikan pekerjaan mitra pelaksana diselesaikan dengan baik. Pemotongan tersebut diambil dari belanja – belanja di bawah ini:

- Belanja Paket Meeting Luar Kota dan Belanja Modal: alokasi anggaran dipotong semua untuk pemotongan 4, sehingga sisa anggaran adalah Rp0,-
- 2. Belanja Perjalanan Dinas Biasa: masih disisakan sedikit untuk pendampingan proyek Hibah, untuk quality control/pemeriksaan infrastruktur di lokasi yang tidak bisa dilakukan secara online oleh konsultan teknik.
- Belanja lainnya.

Sedangkan belanja yang masih dipertahankan adalah:

- Belanja penanganan Covid 19, untuk kebutuhan dalam penanganan covid yang terdiri dari Swab Tracing, Pulsa Internet.
- 2. Belanja jasa konsultan dan jasa lainnya, yang merupakan sisa pembayaran gaji PPNPN Satker MWA ICCTF
- 3. Belanja kebutuhan kantor sampai dengan akhir tahun.

### 4. Rapat Pembahasaan Pekerjaan Renovasi Ruangan tanggal 29 Juli 2021

Renovasi ruangan rencananya dilaksanakan dari 5 Juli – 4 Agustus 2021. Tetapi dikarenakan adanya pembatasan aktivitas, pekerjaan renovasi menjadi tertunda dan tidak bisa selesai tepat waktu. Untuk itu diusulkan adanya perpanjangan pekerjaan renovasi. Untuk itu dilaksanakan rapat Pembahasan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Renovasi Ruangan. Rapat ini membahas progress pengerjaan renovasi ruangan serta kendala-kendala yang dialami. Pembahasan dipimpin oleh Pak Zulfriandi, dengan kesimpulan sebagai berikut :

PPK memberikan perpanjangan waktu selama 2 minggu, Pekerjaan renovasi bisa dilaksanakan pada masa PPKM level 4 dengan pertimbangan:

- Kegiatan renovasi termasuk sector kritikal yaitu konstruksi, bisa dilakukan slama masih mendapatkan Izin;
- Lebih efektif dan aman karena mengurangi kemungkinan kontak langsung atau tidak langsung antar pekerja renovasi dan Staff kantor ICCTF dan PPK ICCTF; dan
- iii. Waktu pelaksanaan dalam Kontrak Pekerjaan yang terus berjal
- Perlu adanya surat tugas dan izin dari pihak manajemen Gedung Lippo iv.
- Termin pembayaran di konsultasikan dulu dengan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dan Procurement Specialist ADB - ICCTF
- Kegiatan Renovasi ruangan dinyatakan selesai pada tanggal 17 Agustus 2021 vi.



Gambar 2. Diskusi pembahasan renovasi ruangan

### 5. Training aplikasi STEP (Systematic Tracking of Exhange in Procurement)

Training dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2021. Training dibimbing oleh Ibu Tuti dan Pak Andre dari bagian Procurement World Bank. Peserta training terdiri dari bagian program dan operation ICCTF.

Tujuang training STEP ini adalah untuk memperbaharui pengetahuan staf ICCTF dalam pengelolaan system pengadaan, dimana semua pengadaan harus tercatat dalam STEP. STEP Ini adalah merupakan aplikasi dari World Bank yang digunakan untuk melacak semua proses pengadaan yang dibiayai dari hibah/pinjaman World Bank.

Fungsi STEP itu sendiri adalah sebagai berikut:

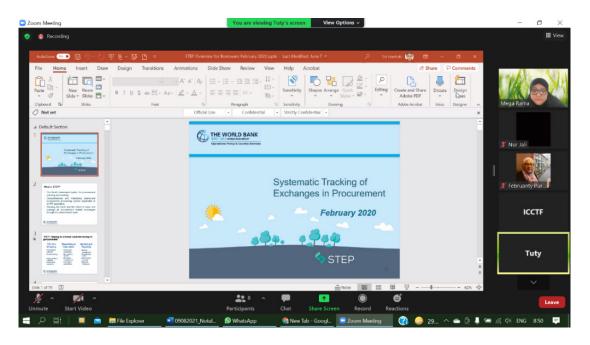
### Planning & Tracking Proses 1.

Yaitu proses awal procplan dimana dokumen-dokumen diupload untuk mendapatkan NOL (no Objection Letter) dari WB dan pengingat jika ada dokumen yang perlu di lengkapi jika ada yang tidak sesuai atau kurang.

- 2. Sebagai Dokumen Management dan bisa di download document tersebut. Dan bisa mempublikasikan Project yang dilaksanakan
- Sebagai monitoring jika ada trouble di dalam project yang dilaksanakan dan mencari solusi.

Sebagai tindaklanjut dari training ini adalah:

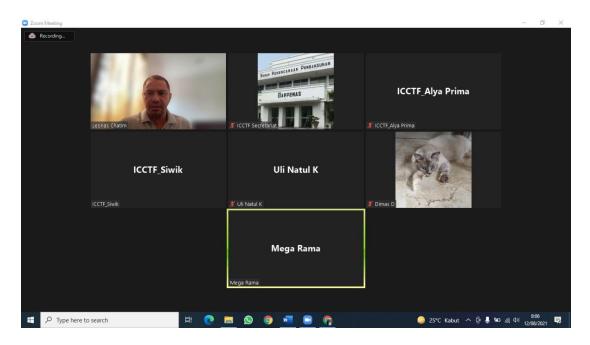
- Tim ICCTF terlebih dahulu menyiapkan dokumen untuk diapload untuk digunakan dalam traning selanjutnya.
- Akan diadakan training secara berkala sampai materi tersampaikan secara menyeluruh.



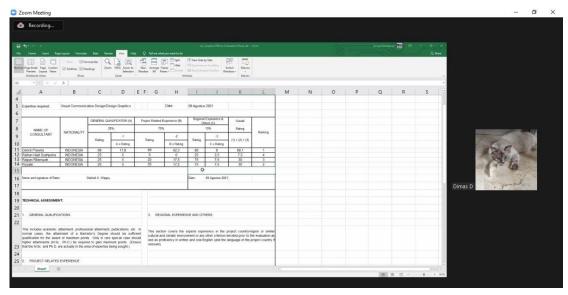
Gambar 3. Paparan training STEP

## 6. Rapat pembahasan Proses Pengadaan Creative Officer

Rapat dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2021. Rapat ini diadakan sebagai tindak lanjut dari agenda yang sudah mundur dari semula 6 Agustus 2021. Proses rekruitmen Creative Officer ini dilakukan dengan cara pelamar mengirimkan lamaran melalui CMS dan email. Namun yang akan diproses adalah pelamar yang melamar melalui CMS sebanyak 4 orang. Telah dilakukan evaluasi berdasarkan pada background Pendidikan, pengalaman kerja, kemampuan membuat design, pengalaman bekerja dengan pemerintah/NGO dan kemampuan berbahasa. Hasil evaluasi akan dikirim kan tanggal 12 Agustus 2021, dan wawancara dengan evaluator dijadwalkan tanggal 13 Agustus 2021.



Gambar 4. Diskusi pengadaan creative officer COREMAP-CTI ADB

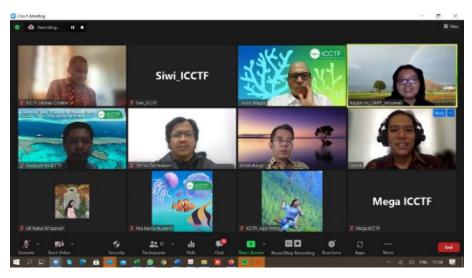


Gambar 5. Creative Officer evaluation sheet

# 7. Interview Pemenang Calon Creative Officer

Sebagai kelanjutan dari proses pengadaan Creative Officer, tanggal 16 Agustus 2021, dilakukan Interview pemenang calon Creative Officer, Interview dilakukan pada candidate nomor 1 yaitu Sdr. Derick Prawira. Interview dilakukan oleh Tim Pengadaan Konsultan ICCTF.

Hal-hal ditanyakan meliputi seberapa jauh pengetahuanKandidate tentang ICCTF, pemahaman terhadap Job description sebagai Creative Officer dan pengalamannya selama ini. Kandidat sangat menguasai substansi dari pekerjaan sebagai Creative Officer, dan berpengalaman bekerja sebagai Creative Officer maupun design di bebarapa lembaga diantaranya di ICCTF dan di MCAI. Kandidat dinyatakan lulus dan akan dilanjutkan dengan Negosiasi harga.



Gambar 6. Interview creative officer

## 8. Negosisiasi Harga Calon Creative Officer

Negosiasi dilakukan pada tanggal 27 Agustus 2021. Negosiasi dilakukan antara Tim Pengadaan ICCTF, PPK Program PPN XIV Satker MWA ICCTF dan Pemenang Creative Officer.

Pada Negosiasi ini terjadi kesepakatan antara ke dua belah pihak dan sepakat Creative Officer akan memulai pekerjaan pada tanggal 1 September 2021.



Gambar 7. Negosiasi harga calon creative officer

### 9. Rapat pembahasan Calon Monev Specialist ADB

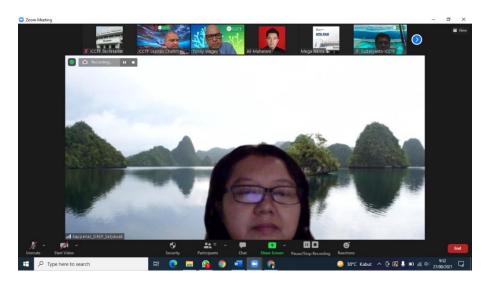
Rapat diadakan pada tanggal 27 Agustus 2021 dandiikuti oleh Tim Pengadaan Konsultan ICCTF, Finance and Operation Manager dan Staf PIU ADB

Hal-hal yang dapat disimpulkan sebagai :

- 1) 4 (empat) orang kandidat yang akan diinterview, yaitu:
  - 1. David Kunthel
  - 2. Supriyono
  - 3. Galih Adhi Pramono
  - 4. Wiwit Widiyanto

Urutan di atas bukan urutan ranking, tetapi jumah orang yang akan diundang interview yaitu berjumlah 4 (empat) orang (penentuan ranking akan dilakukan setelah interview /wawancara) yang dijadwalkan Senin, 30 Agustus 2021

- Kandidat diminta untuk mengirimkan contoh laporan monev yang pernah di buat baik individual /kelompok dalam Bahasa Inggris, paling lambat Sabtu, 28 Agustus 2021.
- 3) Selain kemampuan Monev dan program, calon Monev Specialist di harapkan juga memiliki kemampuan :
  - Kemampuan dalam Bahasa Inggris;
  - memiliki pengalaman membangun sistem Monitoring atau monitoring tools (excel atau google) karena ADB membutuhkan banyak form yang harus di update secara berkala, seperi update keterlibatan kelompok perempuan dalam laporan, secara system bisa terupdate



Gambar 8. Diskusi pengadaan Monev Specialist COREMAP-CTI ADB

### 10. Interview Kandidat Money Specialist ADB

Interview dilakukan pada tanggal 30 Agustus 2021. Kandidat yang di-interview berjumlah 4 orang: David Kunthel, Supriyono, Galih Adhi Pramono dan Wiwit Widiyanto.

Kesimpulan ranking pemenang sebagai berikut:

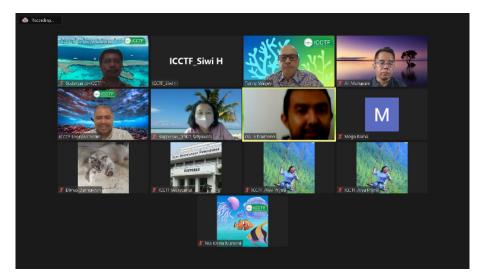
1) Ranking 1: Wiwit Widiyanto

2) Ranking 2: Galih Adhi P

3) Ranking 3: Supriyono

4) Ranking 4: David Kunthel

### 11. Negosiasi Monev Specialist COREMAP-CTI ADB



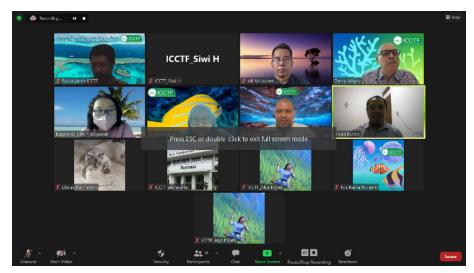
Gambar 9. Interview kandidat Monev Specialist COREMAP-CTI ADB



Gambar 10. Kandidat 3 (Supriyono)

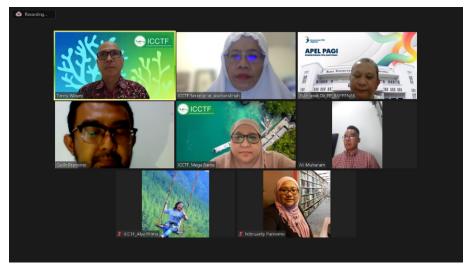


Gambar 11. Kandidat 1 (Wiwid)



Gambar 12. Kandidat 4 (David)

Pada tanggal 30 Agustus 2021 diadakan negosiasi monev specialist COREMAP-CTI ADB. Kandidat ranking 1 menyatakan mengundurkan diri dari calon Monev Specialist dikarenakan sudah menerima pekerjaan dari tempat lain. Negosiasi kemudian dilanjutkan kandidat ranking 2 yaitu Sdr. Galih Adhi P dan tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Penandatanganan kontrak akan dilakukan pada taggal 20 Oktober 2021, yang juga merupakan hari pertama masuk kerja untuk Monev Specialist ADB.

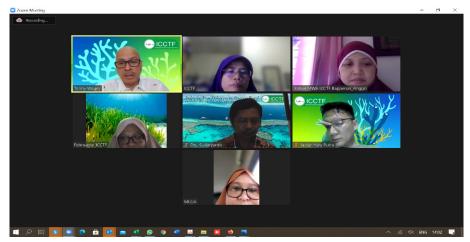


Gambar 13. Negosiasi Monev Specialist COREMAP-CTI ADB

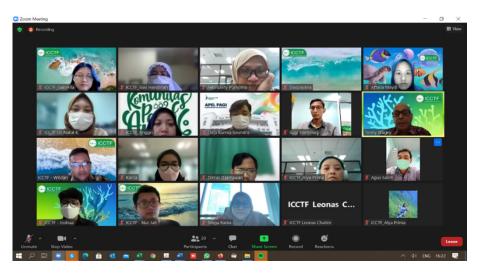
# 12. Rapat rutin manajemen dan koordinasi staf

Rapat rutin diadakan pada tanggal 9 Juli 2021, 14 Juli 2021, 21 Juli 2021, 30 Juli 2021, 20 Agustus 2021 dan 22 September 2021.

Rapat membahas menyeluruh mengenai perencanaan, evaluasi dan monitoring kegiatan-kegiatan ICCTF yang meliputi kegiatan Hibah World Bank, Hibah ADB, Blended Finance dan Kegiatan yang dibiayai rupiah murni (APBN).



Gambar 14. Diskusi rutin manajemen



Gambar 15. Diskusi All Staff









